

Percakapan dengan

Elga Sarapung



Elga Sarapung, (Augustina Elga Joan Sarapung), Direktur the Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei) dan menjadi anggota Executive Committee di the Asian Conference on Religion and Peace (ACRP). Ia menempuh studi pascasarjana pada Ecumenical Institute, Bossey, Genewa, Swiss dan memperoleh gelar master (Theology-Ecumenical Study) pada Groningen University, Belanda (1990).

Pendidikan pluralisme diarahkan pada pembangunan masyarakat Indonesia yang pluralis, bebas, dan demokratis. Hal tersebut harus dibarengi dengan liberalisme agama, sebagai wujud keterbukaan dan kritisisme, suatu sikap yang sangat penting dalam kehidupan majemuk, tanpa harus menghapus identitas keagamaan. Sehingga, agama tidak lagi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal non-duniawi sebaliknya sekularisme hanya berhubungan dengan hal-hal duniawi. Karena itu pula, agama jangan diukur menurut ketentuan resmi yang dibuat negara. Sebaliknya, agama harus “keluar” menjangkau realitas dengan menyentuh serta turut merespon berbagai persoalan kemanusiaan.

Oleh banyak kalangan sekularisme begitu saja diartikan sebagai anti-agama. Akibatnya resistensi terhadap paham ini begitu kuat, terutama, di kalangan agamawan. Tetapi, menurut pandangan Anda, apa sebenarnya sekularisme?

Secara pribadi, sejak awal, saya tidak mempunyai problem dengan istilah tersebut. Ketika banyak orang mempunyai pandangan ihwal sekularisme yang berarti bertolak belakang dengan kepercayaan agama, menurut saya tidak sepenuhnya benar. Memang, dari beberapa pengalaman sejarah di beberapa negara Eropa, kesimpulan ini bisa dianggap benar. Demikianpun dari segi kata yang memiliki arti soal-soal “keduniawian”, yang kemudian dengan sertamerta dilawankan pada soal-soal yang berdimensi “surgawi” – dan itu diidentikkan dengan agama. Kesimpulan semacam ini sebenarnya perlu didiskusikan lagi. Sebab, dua wilayah yang oleh banyak orang atau kelompok tertentu dipertentangkan secara hitam-putih, dan kita diharuskan memilih yang putih, dalam hal ini agama, bukanlah wilayah-wilayah yang begitu mudah untuk ditarik garis tegasnya – untuk dipisahkan.

Dalam kenyataannya, orang yang sekular tidak selalu menolak agama atau beragama. Atau sebaliknya, tidak semua orang yang menolak agama atau tidak mau beragama secara otomatis dapat disebut sekular. Bagi saya analogi-analogi seperti ini terlalu sederhana dan dangkal. Boleh jadi seseorang tidak mau beragama atau menolak agama atau tidak mau pusing dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama lebih karena faktor-faktor lain. Mungkin saja agama mereka adalah “agama sekular” itu sendiri, yang tidak bisa diukur dengan rumusan-rumusan baku sehingga dapat didefinisikan sebagai agama atau yang belum tentu diterima oleh semua pihak, apalagi dipertanggungjawabkan. Celakanya, dalam konteks masyarakat kita, definisi tentang apa itu agama diukur dengan syarat-syarat yang sudah menjadi “standard” ketetapan negara, pemerintah Indonesia – dalam hal ini Departemen Agama. Misalnya tentang apa itu agama atau bagaimana suatu kepercayaan dari sekelompok orang bisa disebut agama?

Akibatnya, semua orang terlanjur mendefinisikan agama sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal non-duniawi, sementara sekularisme berhubungan hanya dengan soal-soal duniawi. Karena itu, sudah saatnya sekarang kita menentang definisi yang terlalu menyederhanakan ini.

Karena itu, tidak aneh jika banyak di antara kita yang masih tidak tahu apa arti sekularisme sebenarnya. Terlebih lagi mereka yang suka dan percaya

sekularisme dengan begitu saja “menghitam-putih”-kan persoalan. Ini penyakit yang menjangkiti orang-orang Indonesia. Belum paham betul dengan persoalan yang tengah dihadapi, tetapi mereka sudah dengan cepat menciptakan tuduhan, justifikasi, bahkan kadang-kadang melakukan aksi atau tindak kekerasan terhadap apa atau pihak yang dituduhkan. Salah satu penyebabnya, bisa jadi, tidak ada penjelasan yang memadai tentang sekularisme, bahkan tidak di dunia pendidikan sekalipun, apalagi di lingkungan pendidikan agama. Kalau pun ada – dugaan saya lebih banyak soal “hitam-putih”-nya. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah, sedang dan selalu berada dalam kehidupan dunia modern yang dalam banyak hal, sebenarnya, dari situlah sekularisme dimulai dan mempengaruhi kehidupan manusia.

Jadi untuk bisa mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat tentang sekularisme dan apa hubungannya dengan agama, tidak lain lewat pendidikan, yaitu pendidikan yang tidak normatif, yang terbuka kepada pemikiran-pemikiran sekular, bahkan pemikiran sekular yang membincang agama. Oleh karena itu, penting juga kita mulai dengan melakukan perga-

ulan yang terbuka dan kritis terhadap persoalan keduniaan, termasuk juga keagamaan. Dalam kondisi seperti ini, kita sangat memerlukan keterbukaan dan sikap kritis. Sebab, ketika masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang benar tentang persoalan keduniawian dan keagamaan, mereka cenderung memandang segala sesuatunya secara hitam-putih: baik-buruk, benar-salah, halal-haram dan sebagainya.

Untuk bisa mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat tentang sekularisme dan apa hubungannya dengan agama, tidak lain lewat pendidikan, yaitu pendidikan yang tidak normatif, yang terbuka kepada pemikiran-pemikiran sekular, bahkan pemikiran sekular yang membincang agama. Oleh karena itu, penting juga kita mulai dengan melakukan pergaulan yang terbuka dan kritis terhadap persoalan keduniaan, termasuk juga keagamaan. Dalam kondisi seperti ini, kita sangat memerlukan keterbukaan dan sikap kritis. Sebab, ketika masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang benar tentang persoalan keduniawian dan keagamaan, mereka cenderung memandang segala sesuatunya secara hitam-putih: baik-buruk, benar-salah, halal-haram dan sebagainya.

halal-haram dan sebagainya. Karena itu ketika mereka mendapatkan informasi umum ihwal sekularisme yang dinilai negatif langsung ditangkap mentah-mentah.

Efek positif lain dari pendidikan yang benar adalah, supaya kita tidak terjebak pada sikap mudah menuduh, berprasangka dan menjustifikasi secara hitam-putih, tetapi melihat, mempelajari dan menilainya secara obyektif. Bagaimanapun juga, hal-hal seperti itu menjadi bagian dari kehidupan di dunia dan menjadi problem keindonesiaan yang menuntut sikap kedewasaan beragama sebagai pengalaman konkret. Ingat, dunia tidak bergerak mundur, tetapi maju. Saya salah seorang yang percaya bahwa paham sekularisme yang telah berlangsung di abad-abad lampau mengalami perkembangan dan perubahan, sebagaimana juga paham dan sikap keagamaan seseorang atau masyarakat.

Sebagai upaya mendiseminasikan gagasan sekularisme, apakah untuk sekarang ini masih efektif untuk membedakan sekularisme dan sekularisasi sebagaimana dilakukan oleh Nurcholish Madjid ataupun para agamawan atau teolog yang menentang sekularisme lantaran trauma dengan sejarah kemunculan paham tersebut di Eropa?

Saya kira penting untuk membedakan sekularisme dan sekularisasi. Sebab, kita tidak bisa menghindar dari perdebatan tentang keduanya: apakah sebagai proses atau sudah menjadi etika atau sebuah paham atau sebagai entitas hidup. Hanya, lagi-lagi sebaiknya kita tidak terjebak pada pemahaman istilah atau kata saja. Ada dua hal yang perlu dielaborasi di sini. *Pertama*, paham tentang sekularisme yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Misalnya, apakah semua hal yang menyangkut makna dan implikasi makna dari kata itu selalu negatif, karena itu perlu ditolak? Karena kalau tidak dilakukan upaya untuk mendudukkannya secara tepat, nanti yang terjadi sebagaimana yang sudah saya katakan tadi: orang hanya melihat dan memahami konsep ini secara hitam-putih, karena yang dikatakan mereka bahwa semua itu tidak baik dan bertentangan dengan agama. Kesimpulan, sekularisme negatif, karena tidak baik; agama positif, karena dianggap baik. Padahal sejarah kemunculan dan perkembangan agama-agama sampai sekarang banyak ditingkahi peristiwa-peristiwa yang tidak selamanya baik. Sejarah gelap terdapat dalam setiap agama.

Yang *kedua*, manakala konsep ini dipahami lantas terjadi proses sekularisasi, pada tataran itu lalu sudah mulai menginternalisasi dan membentuk, entah itu dalam kelompok masyarakat atau pada tingkat individu, gambaran mereka tentang segala sesuatu yang kemudian disebut sebagai sekular. Tetapi, lagi-lagi karena kurangnya informasi seputar gagasan itu, maka ukuran yang dipakai oleh kelompok tertentu ketika melihat itu semua lalu dengan gampangnyanya mengatakan sebagai tidak beragama, misalnya.

Pertanyaannya kemudian, apakah orang yang sekular itu hanya bisa diukur dari tidak beragama, tidak ke gereja, tidak ke masjid dan seterusnya? Saya kira ini cara berpikir dan memahami

persoalan yang sempit tentang istilah sekularisme, sekular dan sekularisasi. Padahal, saya melihat gagasan ini sebagai hal yang positif dan menjadi bagian dari proses perkembangan dan proses perubahan yang alamiah. Kita tidak bisa menempatkan semua ini semata-mata negatif, karena dalam

Liberalisme agama justru menjadi wujud dari keterbukaan dan kemampuan melakukan kritik diri, yaitu sikap yang sangat penting dalam kehidupan yang majemuk, tanpa harus menghilangkan atau menghapus identitas keagamaan.

kehidupan sehari-hari kita juga tertolong dengan proses tersebut. Bila begitu cepat menyimpulkan bahwa gagasan-gagasan tersebut tidak baik dan harus ditolak, maka sebenarnya kita tengah menciptakan kenyataan kontradiktif yang tidak sepenuhnya cocok dengan realitas, tetapi lebih kepada pikiran dan emosi traumatis.

Orang kemudian lebih mudah melihat sekularisme dari sudut negatifnya saja. Mereka berkaca pada pengalaman Eropa Timur atau Skandinavia, di mana negara-negara di sana, yang menganut paham sekular, masyarakatnya menjadikan anti-agama sebagai life style. Terkadang, justru tidak sebatas anti-agama yang pasif, tetapi mereka menyerang agama, misalnya kasus Jylan Posten, atau mungkin penggambaran negatif yang berlebihan sebagai bentuk penghinaan terhadap Yesus atau gereja, sebagai institusi agama, yang kerap dilakukan oleh para seniman.

Saya curiga, jangan-jangan semua itu bukan semata-mata karena mereka sudah terjebak pada yang kita namakan atau kita bayangkan sebagai sekular

atau karena sudah menganut paham sekularisme – sebagaimana yang ada dalam konsep pemikiran kita. Sebab, bisa jadi ada faktor lain di sana. Kenapa mereka sampai menentang atau menolak agama dengan ekspresi-ekspresi yang berlebihan. Saya kira itu bukan lantaran mereka sudah “fanatik” dengan kehidupan sekular atau karena faktor sekularisme dan sekularisasi. Sebab, harus dicek juga hal-hal yang terdapat dalam agama-agama. Boleh jadi ada faktor dari dalam agama-agama yang mengundang mereka untuk melakukan hal seperti itu. Di sini kesulitannya kita untuk bisa bersikap objektif. Penyederhanaan yang jauh dari sikap objektif inilah yang kerap memicu kalangan-kalangan tertentu di Indonesia dalam merespon hal-hal yang terutama berkaitan dengan terancamnya kesakralan agama. Ketika terjadi sesuatu terhadap diri atau kelompok kita, yang segera muncul adalah sikap untuk melihat kesalahan sepenuhnya berada di luar diri atau kelompok kita. Tidak ada usaha untuk melihat ke dalam, melakukan introspeksi diri. Sehingga merusak kerap sebagai satu ekspresi yang logis dari satu masyarakat yang memang sedang menahan amarah dan sarat dendam atau lebih karena kebodohan.

Lalu, apakah setiap sikap yang demonstratif dalam menyudutkan agama kemudian adil jika kesalahannya dituduhkan kepada yang kita sebut sebagai model hidup yang sekular itu? Kalau menurut saya, tidak. Bahwa dunia mereka dunia sekular, ya. Tetapi perbuatan agresif dan destruktif mereka terhadap agama merupakan hal yang berbeda. Efek dari sikap hidup yang sekular mungkin hanya menjadi salah satu faktor, tetapi bukan faktor utama.

Ada semacam penilaian yang berbeda terhadap implikasi dari gerakan Reformasi Protestan yang dirintis oleh Luther. Reformasi dalam Kristen di samping telah membuka pintu kebebasan bagi umat Kristiani untuk menafsirkan Alkitab dan cara keberagamaan mereka, juga dianggap bertanggung jawab atas pola hidup sekular yang belakangan kian permisif dan secara moral sangat dekadent, sebagaimana tercermin dalam kehidupan orang-orang Barat, lantaran otoritas keagamaan yang dipegang gereja berangsur-angsur runtuh, dan masyarakat lebih mengutamakan individualisme beragama, jika tidak menjadi ateis. Dapatkah Anda sebagai seorang Kristen menanggapi penilaian semacam itu?

Saya tidak tahu, apakah gerakan Reformasi dari Abad Pertengahan itulah yang menyebabkan terjadinya dekadensi moral di kalangan gereja saat ini, dengan contoh macam-macam hal yang Anda sebutkan tadi. Mungkin juga,

tetapi lebih baik ada penelitian khusus tentang hal itu. Menurut saya, untuk sedikit lebih objektif, kita perlu melihat pada berbagai perubahan tatanan kehidupan dunia yang terjadi di mana-mana dengan sangat luar biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial-budaya-politik serta dunia pendidikan (formal dan non-formal) yang sangat pesat dan mengubah dunia secara signifikan, semua ini jelas mempengaruhi cara berpikir banyak orang, yang kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan ketika akan atau harus memilih, apa yang akan dilakukan, disikapi dan lain sebagainya. Termasuk dalam soal beragama.

Kalau implikasi (yang diang-gap) negatif semacam itu hendak kita namakan sekularisme, apakah memang demikian? Saya pikir saya juga sekular – bila soal ke gereja dan tidak ke gereja menjadi ukuran (bagi orang Kristen). Saya jarang (lebih banyak tidak) ke gereja, tetapi saya tetap menghargai orang lain dan menghargai kehidupan. Anda bisa cek perkataan saya ini. Apa ini bisa disebut negatif karena tidak ke gereja? Bagaimana dengan orang yang rajin ke gereja atau tegas mengatakan beragama, tetapi dalam hidupnya tidak terbuka kepada orang lain

yang berbeda dengan dirinya, atau tidak menghargai kehidupan secara bertanggungjawab? Bagaimana mungkin mengukur bahwa dengan kita beragama berarti tidak sekular dan karena itu positif, baik. Sebaliknya, yang tidak beragama karena tidak ke gereja maka negatif, tidak baik – dan itu disebut sekular atau yang sudah kental dengan paham sekularisme.

Saya pikir saya juga sekular – bila soal ke gereja dan tidak ke gereja menjadi ukuran (bagi orang Kristen). Saya jarang (lebih banyak tidak) ke gereja, tetapi saya tetap menghargai orang lain dan menghargai kehidupan. Anda bisa cek perkataan saya ini. Apa ini bisa disebut negatif karena tidak ke gereja? Bagaimana dengan orang yang rajin ke gereja atau tegas mengatakan beragama, tetapi dalam hidupnya tidak terbuka kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya, atau tidak menghargai kehidupan secara bertanggungjawab? Bagaimana mungkin mengukur bahwa dengan kita beragama berarti tidak sekular dan karena itu positif, baik. Sebaliknya, yang tidak beragama karena tidak ke gereja maka negatif, tidak baik – dan itu disebut sekular atau yang sudah kental dengan paham sekularisme.

Saya tidak ke gereja bukan karena anti-gereja atau karena menilainya secara hitam-putih atau karena saya sekular. Saya juga punya kelemahan tentunya. Tetapi saya mau katakan bahwa ada hal lain, yaitu sikap kritis saya terhadap gereja. Apakah sikap seperti ini sekular? Silakan saja bila ada yang mengatakan demikian, tetapi lagi-lagi saya katakan, tidak sesederhana itu untuk layak melakukan justifikasi.

Saya pikir apa yang telah dilakukan Luther saya setuju sekali. Saya ingin dan berharap agar sekarang ada orang-orang seperti Luther yang berani melakukan hal yang sama terhadap agamanya dari “dalam”. Di dalam agama Kristen Protestan harus ada orang seperti dia, begitupun di dalam Islam atau di agama manapun harus ada orang seperti Luther, Calvin – lepas dari kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi keberanian dan keterbukaan mereka untuk melakukan otokritik dan reformasi dari dalam, itu penting. Karena persoalan agama-agama atau pluralisme agama, tidak saja persoalan antaragama, tetapi terutama juga persoalan intra-agama, yaitu persoalan dalam diri agama sendiri. Bahwa Reformasi kemudian memberikan implikasi orang malas ke gereja, perlu dipertanyakan. Menurut saya sikap itu lebih karena pilihan dari apa yang digumuli yang bersangkutan. Misalnya, karena ada faktor bosan ke gereja.

Ketika saya pertama kali berkhotbah, baru saya mengerti mengapa jemaat senang atau tidak senang mendengar khotbah pendeta. Makanya ada jemaat yang pilih-pilih, kalau pendeta si A yang khotbah, misalnya, tidak mau ke gereja. Sudah khotbahnya panjang, tidak enak didengar lagi; tema khotbah tidak relevan; dan cara pendeta atau pastor berkhotbah atau menyampaikan *homile* tidak bisa dimengerti karena terlalu tinggi bahasa teologianya. Selain doanya panjang, suasana juga sangat monoton, tidak dialogis, tidak ada hal-hal yang menarik di dalam gereja. Faktor berikutnya, bisa saja mereka kritis kepada gereja karena doktrin gereja yang eksklusif, masih konservatif, tidak relevan dengan tantangan konteks kehidupan yang ada sekarang, di samping juga pergaulan gereja terbatas, kegiatan berkisar dengan ritual belaka dan rutinitas institusi gereja. Mungkin saya salah seorang yang berada dalam kelompok ini, tetapi saya masih merasa penting sekali untuk hidup “bergereja” – dengan cara saya. Meskipun jarang sekali ke gereja tetapi saya tetap merasa penting untuk mempertahankan pergaulan saya dengan gereja. Itu basis komunitas saya, terlebih lagi saya bekerja di satu lembaga seperti ini (Interfidei, yang berkonsentrasi dalam upaya dialog antar-iman dan agama). Kalau saya sama

sekali hilang hubungan dengan gereja, bagi saya tidak ada gunanya saya bekerja di lembaga seperti ini.

Sekularisasi atau sekularisme juga berimplikasi terhadap gagasan privatisasi agama di mana akhirnya agama masuk atau dikandangkan saja sebagai wilayah pribadi bukan lagi wilayah publik. Apa pandangan Anda dengan gagasan privatisasi agama ini?

Saya setuju dalam arti bahwa pengalaman keberagamaan kita di Indonesia sangat lain. Soal wilayah publik dan privat agama atau beragama, sebaiknya tidak dilihat sesempit itu. Karena dalam konteks kita di sini, justru privatisasi agama hampir tidak kelihatan sebagai sebuah semangat yang disadari.

Sebab, semua tentang agama hampir-hampir berada di wilayah publik, apalagi hal itu diatur oleh negara. Hampir tidak jelas, mana wilayah privat dan mana yang publik. Semua dimasuki negara. Ini yang membuat ketidajelasannya negara, makanya jadi *amburadul*.

Saya, salah seorang yang setuju dengan perlunya privatisasi agama atau beragama, dalam arti yang luas, bukan eksklusif. Di situ negara tidak bisa ikut campur. Sementara, dalam konteks sosial-publik, ada hal yang perlu diatur dan dilindungi negara, misalnya soal menjalankan kegiatan sosial keagamaan. Namun begitu ada wilayah yang tidak perlu dimasuki negara, misalnya menentukan apakah suatu kegiatan spiritual bisa diakui sebagai agama atau tidak? Sebab, mengapa hal seperti ini harus tergantung pada pengakuan negara? Padahal, agama sendiri juga sama sekali tidak punya hak sehingga harus melegalkan status bahwa ini agama dan itu bukan agama. Artinya, negara hanya mengatur bagaimana agama-agama bisa hidup berdampingan secara baik, tetapi bukan dengan cara represif, melainkan sebagai badan konsultatif dan fasilitator.

Dalam konteks pembicaraan ini, apa yang saya katakan perihal mengapa saya merasa dan menganggap penting untuk tetap mempertahankan hubungan

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan pluralisme bukan relativisme ... pluralisme bukanlah gagasan yang menggerus iman. Pluralisme juga tidaklah menganjurkan perpindahan agama atau membuat, apalagi memaksa orang lain berpindah agama.

saya dengan gereja, lagi-lagi, lebih karena aspek sosial – bagaimana beragama bisa dihayati dan dimaknai dalam ruang publik. Di sana saya ketemu banyak orang, berkenalan dengan banyak orang dan melihat ada semangat agama berperan di sana, sekalipun mungkin lebih banyak yang simbolistis. Tetapi, tidak apa, memang kita baru sampai pada taraf itu. Saya yakin akan mengalami perubahan dan perkembangan. Alasan berikutnya, karena paduan suara dan musiknya bagus. Tapi yang paling utama faktor sosial, dan saya pikir di situlah alasan mengapa masih membuat saya bertahan. Saya tetap Kristen walaupun saya tidak ke gereja.

Terkait dengan persoalan ini, dalam kesempatan-kesempatan di mana saya berbicara tentang hal ini, saya selalu mengatakan bahwa suatu agama bukanlah agama atau jangan disebut agama kalau dibatasi atau membatasi diri dalam ruang lingkup keagamaan yang institusional atau ritual saja. Agama harus keluar, menjangkau realitas dunia di mana dia berada, menyentuh dan turut merespon berbagai persoalan kemanusiaan yang semuanya ada di dunia. Dia ada di dunia dan untuk dunia.

Sebagai reaksi atas gagasan privatisasi agama, kemudian muncul konsep deprivatisasi agama yang digagas oleh Jose Casanova – kendatipun gagasan dan praktik teologi pembebasan bergerak dalam lingkup yang hampir serupa. Inti dari deprivatisasi agama adalah upaya bagaimana agama tetap punya fungsi dan peran publik untuk berbuat secara sosial atau mengemban misi profetis dalam merespon ketimpangan dan ketidakadilan.

Kalau saya berbicara di dalam lingkungan gereja atau di pertemuan apapun dalam kelompok Kristen maupun antaragama, gagasan semacam itu kerap saya sampaikan. Sebab, agama-agama harus kembali ke “core” pemaknaannya, yaitu menjadi jalan pembebasan bagi manusia. Ketika orang menyinggung tentang apa sebenarnya fungsi agama, saya selalu bilang, “agama kalau tidak berfungsi sosial, tidak mempunyai peran pada hal-hal kemanusiaan atau kehidupan umat, kehidupan manusia yang lebih luas, maka agama itu mandul.” Bahkan secara tajam saya katakan, “jangan sebut agama atau beragama kalau tidak mau peduli dengan realitas kehidupan: kemiskinan, ketidakadilan, dan lain sebagainya.” Kalau bilang saya beragama, maka akan salah sekali kalau keberagamaan saya sebatas melaksanakan hal-hal yang rutin atau ritual. Beragama harus langsung terlibat dalam kehidupan sehari-hari, dengan

kemiskinan, ketidakadilan, dengan persoalan hak asasi manusia dan segenap problem kita sekarang ini.

Selama ini kita beragama hanya berkaitan dengan institusi dan ritualnya; atau hanya memikirkan soal agama *an sich*: bagaimana membesarkan jumlah umat, bagaimana membangun gedung gereja atau masjid yang lebih baik, lebih bagus, bagaimana supaya teks-teks kitab suci dapat ditaati sebagaimana adanya. Kalau begini model keberagamaannya, yang terjadi adalah faktor individualitas yang terpojok dalam *frame* yang sangat sempit. Jangan heran kalau kemudian agama dikenal hanya sebagai kumpulan larangan, sehingga kalau kita beragama lantas hanya cara pandang hitam-putih yang ada di benak kita. Sehingga atas dasar itu pula kita gemar melakukan penilaian terhadap persoalan hidup: ini boleh dan itu tidak boleh, dan seterusnya. Seolah-olah kita berada hanya pada dua dunia ini. Patut disayangkan sekali bahwa keberagamaan kita masih terjebak pada pola seperti ini. Akhirnya, kita akan kerepotan sendiri kalau melulu melihat atau memberlakukan agama seperti itu. Bagaimanapun, menurut saya, itu bukan inti dari agama.

Selama ini kita beragama hanya berkaitan dengan institusi dan ritualnya; atau hanya memikirkan soal agama *an sich*: bagaimana membesarkan jumlah umat, bagaimana membangun gedung gereja atau masjid yang lebih baik, lebih bagus, bagaimana supaya teks-teks kitab suci dapat ditaati sebagaimana adanya. Kalau begini model keberagamaannya, yang terjadi adalah faktor individualitas yang terpojok dalam *frame* yang sangat sempit. Jangan heran kalau kemudian agama dikenal hanya sebagai kumpulan larangan, sehingga kalau kita beragama lantas hanya cara pandang hitam-putih yang ada di benak kita. Sehingga atas dasar itu pula kita gemar melakukan penilaian terhadap persoalan hidup: ini boleh dan itu tidak boleh, dan seterusnya. Seolah-olah kita berada hanya pada dua dunia ini.

Jika model keberagamaan masyarakat Indonesia masih terjebak pada hal-hal yang sifatnya normatif, ritualistik dan tidak sensitif terhadap problem kemanusiaan, kiranya diperlukan injeksi agar dapat keluar dari batas-batas itu.

Liberalisme menawarkan alternatif keberagamaan yang bebas dan bertanggung jawab. Namun, apa lacur, banyak orang memahami liberalisme sebagai paham yang memberi ruang kebebasan tanpa batas, segalanya diperbolehkan. Akibatnya di Indonesia, yang masih kental dengan budaya ketimurannya, paham ini terus dicurigai dan bahkan ditentang. Menurut pandangan Anda apa sebenarnya liberalisme dan semangat apa yang patut dikedepankan dari paham ini?

Menurut saya penolakan masyarakat terhadap liberalisme, kurang lebih, faktor penyebabnya hampir sama seperti resistensi mereka pada sekularisme. Walaupun liberalisme dapat dikatakan relatif baru untuk masyarakat Indonesia – khusus dalam khazanah keagamaan – tetapi kemunculannya langsung mendapat respon yang kurang baik. Menurut saya memang benar kebanyakan orang lebih memahami liberalisme sebagai paham yang mengedepankan kebebasan, termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Namun demikian, kebebasan bukan tanpa batas atau yang sama sekali tidak dapat dibatasi. Kebebasan di sini lebih sebagai sikap atau ekspresi yang tentu saja dibatasi menurut ukuran-ukurannya yang tidak bisa kita patok atas dasar ukuran kita sendiri. Tetapi, ada ukuran bersama, yaitu etika kebebasan yang perlu dibangun supaya liberalisme agama, di satu pihak, tidak menjadi bangunan tembok fundamentalisme sempit. Di pihak lain, liberalisme agama justru menjadi wujud dari keterbukaan dan kemampuan melakukan kritik diri, yaitu sikap yang sangat penting dalam kehidupan yang majemuk, tanpa harus menghilangkan atau menghapus identitas keagamaan.

Terkait dengan liberalisme dalam beragama, maka persoalan yang pertama kali harus dirumuskan adalah bagaimana mensosialisasikan gagasan ini kepada umat beragama yang taat terhadap tatanan nilai yang sudah diyakininya. Menurut hemat saya, kebebasan atau semangat liberal mendorong pada suatu keadaan masyarakat di mana orang merasa aman dan tidak takut atau enggan untuk mengakui dan mengekspresikan keyakinan beragamanya. Yakni ketika warga negara Indonesia merasa tidak takut dan enggan lagi atau dilarang bila mengakui bahwa dirinya Ahmadiyah, Sikh, Yahudi, Parmalim, Kaharingan, Saptodharma dan seterusnya. Jadi, kebebasan di sini juga mempunyai hubungan, tidak saja dengan aspek hukum dan politik, tetapi juga dengan aspek sosial dan psikologis. Dalam pengertian lain kebebasan harus disertai dengan upaya menghargai yang lainnya.

Ada faktor penting yang dalam liberalisme harus terus ditanamkan, yakni bahwa menghargai hendaknya bukan sekadar faktor saya merasa bebas dengan Anda karena Anda menghargai saya, tetapi sebaliknya juga Anda merasa enak dan nyaman dengan saya karena saya menghargai Anda. Dari rasa bebas saya lantas memberi implikasi yang positif juga pada Anda atau orang lain. Sehingga, kebebasan baik dalam agama, ideologi, maupun lainnya, ada batas-batas atau patokan yang harus dipatuhi dan dihargai secara timbal balik. Ya, perlu ada etika hidup bersama dalam masyarakat yang plural.

Negara sama sekali tidak punya hak sehingga harus melegalkan status bahwa ini agama dan itu bukan agama. Negara hanya mengatur bagaimana agama-agama bisa hidup berdampingan secara baik, tetapi bukan dengan cara represif, melainkan sebagai badan “konsultatif” dan “fasilitator”.

Mengacu pada tradisi Protestantisme di mana sering dijadikan pemicu bahwa lantaran Martin Luther mengkritisi institusi gereja, lantas setiap orang berhak atas pemahaman agamanya, berhak untuk menafsirkan Alkitab tanpa harus ada satu otoritas tertentu. Hal ini berimplikasi jauh pada kebebasan terhadap ekspresi-ekspresi yang bersifat partikular. Artinya setiap orang boleh melakukan apapun dalam beragama, sehingga bermunculan paham-paham atau “sekte-sekte” dalam Kristen. Bagaimana Anda menanggapi fenomena tersebut, dan apakah itu pertanda positif bagi konteks kebebasan beragama?

Benar. Hal seperti itu merupakan keunikan dan sekaligus keanehan dalam tradisi Protestantisme, yang bila dilihat secara positif, tentu baik saja – walaupun tidak dapat dikatakan begitu saja bahwa keadaan ini pertanda perkembangan gereja. Mungkin benar bila diukur dari kuantitas jumlah gereja, tetapi belum tentu segi kualitasnya, terutama kaitannya dengan bentuk relasi kehidupan bermasyarakat. Tetapi, bila dicermati, bertaburnya berbagai paham Kristen bisa jadi menyisakan kekhawatiran: bukan saja menimbulkan persoalan yang dapat mengikis semangat kebebasan dan pluralisme karena dapat mengancam proses dialog serta kerjasama antaragama, tetapi, bahkan, lebih menarik lagi, terkait dengan menegangnya relasi dalam dunia intra-kekristenan (Protestantisme) itu sendiri. Kadang-kadang fenomena ini tidak hanya

mbingungkan tetapi juga menyulitkan, apalagi dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia.

Dalam memahami konteks reformasi *Lutherian dan Calvinian* maka kita dihadapkan pada suasana tradisi Protestantisme yang mendorong pada kebebasan umat, teolog atau awam untuk boleh membaca dan menafsir Alkitab dengan caranya sendiri. Juga terbuka kesempatan bagi siapapun untuk mempraktikkan hasil penafsiran terhadap apa yang dibaca, bahkan bila ingin membentuk satu komunitas baru sekalipun. Memang tentang hal ini tidak ada yang tertulis dengan jelas, tetapi lebih sebagai pengaruh atau implikasi dari tradisi Protestantisme yang ada selama ini. Perihal tradisi ini dalam Kristen, menyitir obrolan orang: gereja Protestan kerap disebut gereja yang suka protes!

Hal inilah yang kemudian dapat menjelaskan mengapa dalam sejarah Protestantisme di Indonesia bermunculan banyak gereja Protestan dengan beraneka ragam pemahaman yang dikembangkan dan diekspresikan secara berbeda-beda. Bahkan saya sendiri sebagai seorang Protestan kadang-kadang bingung dan tidak tahu persis dengan keberadaan beberapa gereja tertentu. Walaupun sebenarnya berkembangnya banyak gereja yang berbeda-beda tidak semata-mata karena perbedaan doktrin yang disebabkan oleh pembacaan dan penafsiran Akitab secara bebas, tetapi ada juga yang muncul lebih karena persoalan internal gereja, misalnya soal organisasi, kesalahpahaman antar-pimpinan, soal duit, dan macam-macam sebab lainnya. Menurut saya, keadaan ini tidak bisa langsung dikaitkan dengan faktor kebebasan beragama, tetapi lebih dari situasi sebab-akibat di dalam tradisi atau persoalan agama secara internal yang kemudian memproduksi kelompok-kelompok baru intra-agama. Barangkali ketika akan mendirikan atau membentuk gereja atau kelompok baru, orang-orang tersebut tidak berpikir sama sekali ihwal semangat kebebasan beragama, tetapi lebih mempertimbangan antara adanya alasan seperti kesempatan dan, tidak bisa dipungkiri juga, adanya duit. Mungkin lembaga seperti PGI sekalipun tidak tahu sama sekali motif munculnya kelompok-kelompok tersebut, dan baru tahu belakangan setelah timbul masalah. Termasuk, mungkin pihak pemerintah tidak tahu, atau tahu dan mengizinkan pendiriannya tanpa memahami secara baik dan benar apa alasan, apa esensi, apa implikasi terhadap kehidupan beragama dalam konteks masyarakat Indonesia. Kenyataan ini yang sering memunculkan kesalahpahaman dan barbagai persoalan di kemudian hari di antara umat beragama.

Jadi, bukan karena pertimbangan kebebasan beragama, tetapi karena hal-hal di atas. Walaupun akan dianggap sebagai wujud kebebasan beragama, maka harus diselidiki dan ditata kembali.

Lantas hal positif apa yang dapat dipetik dari fenomena tersebut atau fenomena itu memang hanya akan mengeraskan identitas keagamaan masing-masing?

Hal positif yang bisa saya lihat adalah, bila situasi seperti ini dimaknai secara konstruktif dalam kehidupan beragama kita di Indonesia. Artinya, perlu ada introspeksi dari masing-masing institusi dan komunitas agama-agama yang ada selama ini, demikian juga pemerintah. Tetapi, itu akan menjadi negatif bila dimengerti semata sebagai hak, tanpa konsep dan prospek yang jelas serta relevan dengan konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Lebih khusus dalam lingkungan gereja. Aspek positif yang dapat saya lihat adalah: *pertama*, muncul kesadaran untuk melihat apa kelemahan gereja. Mengapa tiba-tiba ada anggota gereja yang keluar dan membentuk gereja baru, yang tradisinya sama atau malah lain sama sekali. *Kedua*, walaupun saya setuju dengan kebebasan dalam mengekspresikan keagamaan, tetapi saya kurang begitu nyaman apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh banyak orang lebih berdasarkan aspek emosional, seperti rasa bosan, sehingga banyak orang keluar dari gereja dan ikut persekutuan yang lain, atau malah ikut kelompok-kelompok fundamentalis yang sempit cara keberagamaannya, yang orientasinya semata untuk mengkristenkan orang.

Menurut hemat saya, "kebebasan" atau semangat liberal mendorong pada suatu keadaan masyarakat di mana orang merasa aman dan tidak takut atau enggan untuk mengakui dan mengekspresikan keyakinan beragamanya. Yakni ketika warga negara Indonesia merasa tidak takut dan enggan lagi atau dilarang bila mengakui bahwa dia Ahmadiyah, Sikh, Yahudi, Parmalim, Kaharingan, Saptodharma dan seterusnya. Jadi, kebebasan di sini juga mempunyai hubungan, tidak saja dengan aspek hukum dan politik tetapi juga dengan aspek sosial dan psikologis. Dalam pengertian lain kebebasan harus disertai dengan upaya menghargai yang lainnya.

Jangankan yang bukan Kristen, orang-orang yang sudah Kristen pun bagi mereka dianggap belum Kristen, karena itu harus dibaptis ulang sesuai tradisi mereka. Kalau pemunculan kelompok semacam ini dianggap sebagai implikasi dari kebebasan beragama, maka pandangan seperti itu harus ditinjau kembali. Paling tidak, terhadap kelompok tersebut harus dijelaskan secara benar dan menuntut untuk mempraktikkan maksud dari semangat kebebasan beragama secara tepat dan relevan dalam konteks masyarakat Indonesia. Demikian halnya bagi pemerintah dan institusi agama lainnya. Tetapi, harus ditekankan bahwa ini semua tidak dalam arti melarang mereka, hanya meluruskan, mempersiapkan secara baik sehingga bila terjadi sesuatu maka kelompok-kelompok semacam ini memiliki sensitivitas sosial-budaya yang patut dihargai. Dalam konteks ini maka berkembang-biaknya kelompok-kelompok agama atau sekte-sekte semacam ini, dari segi kebebasan beragama, dapat dianggap positif.

Telah Anda singgung sebelumnya bahwa agama juga mempunyai aspek sosial, semangat nilai untuk pembebasan manusia dari ketertindasan. Namun demikian, aspek sosial dari nilai-nilai agama oleh kalangan tertentu kerap kali diseret ke dalam ranah politik, sehingga muncul gerakan-gerakan dalam Islam, misalnya, yang mencoba dan menuntut agar nilai-nilai Islam diterapkan dalam aturan publik atau dilegalformalkan dengan alasan penyelamatan umat. Apa pandangan Anda dengan upaya semacam itu?

Saya tidak setuju upaya melegalformalkan nilai-nilai agama, terlebih kemudian yang muncul justru ketidakadilan. Sebab, di sana sarat dengan kepentingan-kepentingan politik dan bukan kepentingan-kepentingan sipil. Apalagi bila kita berbicara dalam konteks Indonesia yang plural, yang *bhinneka tunggal ika*. Bila kita mau jujur, apakah upaya semacam itu mencerminkan sikap hormat dan menghargai kebhinekaan? Upaya semacam itu, menurut pandangan saya, lebih berorientasi kepada kepentingan politik kelompok atau orang tertentu. Oleh karena itu keberagaman kita harus dibersihkan dari motif-motif dan tujuan seperti itu. Kita harus keluar dari model beragama yang legalistik. Karena dalam konteks keindonesiaan hal ini hanya akan menjadi problem serius hubungan antaragama dan antara agama dan negara. Kita tidak bisa membiarkan diri kita terjebak dalam kepentingan-kepentingan sempit

dan sesaat. Agama-agama harus terbebas dari berbagai kepentingan itu, termasuk – dalam konteks ini – agama Islam.

Sebagai bagian dari minoritas (jika kamiizinkan mengatakan demikian), apa pendapat Anda perihal perda syariah yang belakangan marak diterapkan dan terus diusulkan di beberapa daerah. Bagaimana keberadaan kalangan minoritas di tengah peraturan semacam itu?

Sejak pertama kali isu syariat Islam mulai digulirkan, kira-kira beberapa tahun lalu, dengan kembali dimunculkannya Piagam Jakarta, saya tidak mempunyai problem ketakutan. Saya tidak mempunyai problem *minority complex* atau sejenisnya. Terus terang, saya malah menertawakan (mungkin, bernada agak mengejek dan mempertanyakan), apalagi yang dipikirkan dan yang mau dicapai oleh orang-orang yang berpikiran sempit itu? Karena, menurut saya, kalau benar-benar yang ingin diusung adalah syariat Islam dan mau diterapkan secara benar sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak ada masalah. Ini

selalu saya katakan pada kaum Kristen. Kita tidak usah takut dan khawatir kalau memang konsep syariat Islam itu bersumber dari ajaran yang sebenarnya dan akan dijalankan dengan tulus, murni dan sungguh-sungguh. Yang perlu kita perjuangkan adalah, supaya ada penjelasan dan diskusi terbuka tentang usaha dan kegiatan berkaitan dengan implementasi syariat Islam serta implikasinya bagi kita semua, pluralitas masyarakat di Indonesia.

Persoalan kita terkait dengan penegakan syariat Islam, paling tidak, ada tiga hal yang hendak dipertanyakan: 1) Syariat Islam seperti apa yang dimaksudkan di sini, karena ada berbagai konsep dan penafsiran, termasuk

Kecenderungan yang terjadi di masyarakat adalah, bahwa upaya memperjuangkan syariat Islam lebih merupakan kontestasi dalam ranah politik dengan berbagai kepentingan yang menempel di situ, termasuk kepentingan kelompok tertentu yang dicurigai sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Jadi motifnya sudah tidak murni lagi semangat keagamaan. Terlebih lagi, tidak semua kelompok di masyarakat, termasuk dalam komunitas masyarakat Muslim sendiri yang paham benar apa maksud dari perda syariat Islam.

di kalangan umat Islam sendiri? 2) Mengapa syariat Islam perlu ditegakkan di daerah-daerah atas nama mayoritas penduduk beragama Islam dan “menunggangi” otonomi daerah? 3) Apa dan bagaimana implikasinya dalam konteks kebangsaan Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang plural baik agama, etnis, jender dan sebagainya?

Kecenderungan yang terjadi di masyarakat adalah, bahwa upaya memperjuangkan syariat Islam lebih merupakan kontestasi dalam ranah politik dengan berbagai kepentingan yang menempel di situ, termasuk kepentingan kelompok tertentu yang dicurigai sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Jadi motifnya sudah tidak murni lagi semangat keagamaan. Terlebih lagi, tidak semua kelompok di masyarakat, termasuk dalam komunitas masyarakat Muslim sendiri yang paham benar apa maksud dari perda syariat Islam. Sebab tidak pernah didiskusikan secara terbuka dan melibatkan semua warga (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan paham keagamaan lainnya). Dapat dikatakan di sini, jika kelompok yang mengupayakan diberlakukannya perda syariah di daerahnya, entah itu pemerintah atau tokoh agama tertentu, adalah mereka yang tidak sensitif terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan setempat dan tidak peduli kepada kepentingan jangka panjang kehidupan masyarakat banyak. Misalnya, dengan munculnya ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran dari beberapa kelompok masyarakat minoritas terhadap perda syariah, hendaknya pemerintah dan para tokoh agama yang memperjuangkan hal itu, memberi kesempatan dan membuka peluang untuk membicarakan hal itu bersama-sama terlebih dahulu dalam suasana terbuka, tulus dan jujur. Artinya, terbuka juga untuk menerima pertimbangan dan masukan dari orang lain, yang sama-sama memiliki hak hidup bermasyarakat dalam lingkungan setempat.

Yang kemudian menjadi persoalan utama adalah: *pertama*, dalam konteks di mana perda syariah hendak diterapkan tidak terlebih dahulu terwujud kondisi ideal sebagaimana diutarakan di atas. Yang ada justru memperjuangkan perda syariah dengan ekspresi-ekspresi yang “mengerikan” dan jauh dari keadilan atau semangat kesetaraan. Jika demikian, lalu siapa yang tidak takut? Sebab kebanyakan dari mereka yang non-Muslim memang tidak terbekali dengan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan yang baik dan seimbang. Yang dekat dengan mereka hanyalah pengalaman dan trauma-

trauma kekerasan. Seperti trauma gereja yang pernah dilempari atau tindak kekerasan lainnya yang menimpa jemaatnya. Sehingga saya bisa maklum kenapa orang non-Muslim, terutama Kristen, merasa takut bila perda syariah diterapkan dan dikembangkan sebagai aturan formal dalam hidup bermasyarakat di tingkat lokal. *Kedua* adalah karena faktor perda syariah yang sudah banyak dipolitisir. Kepentingan politik sudah sangat jelas di sana. Saya kira kalau persoalan ini terbuka dan mereka mau membicarakannya dengan semua pihak dalam masyarakat plural, maka hal tersebut tidaklah masalah. Problemnya apakah keterbukaan seperti ini bisa terjadi? Tidak! *Ketiga*, saya kira persoalan kita di Indonesia, kaitannya dengan perda syariah, adalah salah satu bukti adanya campur tangan negara pada urusan agama. Mengapa negara turut campur dalam melegalkan perda syariah? Penyebabnya, antara lain, bahwa tampak jelas betapa negara ini tidak mempunyai gambaran yang jelas dan tegas perihal bagaimana meletakkan ruang privat dan publik dalam hidup beragama dan berkeyakinan di negeri ini yang dirumuskan oleh pemerintah.

Fungsi Depag sebagai institusi pemerintah adalah mengupayakan kesempatan dan ruang-ruang konsultatif bagaimana agar masyarakat memahami keberadaan kelompok-kelompok agama atau kepercayaan lainnya secara terbuka. Pada saat yang sama Depag juga mengupayakan bagaimana agar kelompok-kelompok agama atau kepercayaan dapat memahami bahwa keberadaan mereka masing-masing tidak lepas dari kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural, dan kebebasan beragama di Indonesia seyogianya ditempatkan dalam realitas atau konteks tersebut.

Apakah Anda hendak mengatakan bahwa dengan maraknya perda-perda syariah berarti bukti nyata ketidaknetralan negara? Sebab, semestinya negara tidak memberikan perlakuan khusus – dengan meluluskan aturan-aturan dalam perda syariah yang sejatinya bertentangan dengan konstitusi – kepada pihak mayoritas, dalam hal ini umat Islam yang mainstream, tentu saja, karena dalam tubuh Islam sendiri, terdapat kelompok-kelompok yang tersingkir seperti Ahmadiyah, Syi'ah, Lia Aminuddin dan sebagainya.

Persis, negara tidak netral. Saya pikir perda syariah salah satu bukti dari campur tangan negara yang *amburadul*. Jadi, persoalan mendasar dari rumitnya isu perda syariah adalah bentuk ketidaknetralan atau, lebih tepatnya, ketidakadilan negara. Bahkan, menurut saya, itu menjadi bukti kemunafikan negara (pemerintah). Karena negara tidak tegas dan berani menegakkan hukum secara benar. Karena apa? Karena di sana ada kepentingan tersembunyi pemerintah yang tidak bakal disampaikan secara terbuka demi kepentingan itu. Wibawa pemerintah kian runtuh, antara lain, dalam menyikapi persoalan hukum yang ditimbulkan oleh tuntutan diterapkannya perda syariah. Sebab, negara sekarang ini tidak mempunyai konsep yang memadai bagi keberlangsungan pemerintahan dalam mengatasi segala persoalan yang ada, termasuk di antaranya persoalan pluralisme agama di Indonesia, sebagai persoalan kebangsaan secara nasional. Semuanya telah kacau oleh kepentingan politik, kepentingan partai, kepentingan kekuasaan dan uang.

Anehnya, kadang-kadang, terdengar jawaban dari pihak pemerintah bahwa keadaan ini merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan otonomi daerah. Tetapi, bagaimanapun juga, kalau mau ditarik ke belakang, semua problem yang sekarang ini tidak pernah usai terutama bersumber dari ketidakadilan, ketidaknetralan dan kemunafikan negara (pemerintah). Sebab semua itu lebih banyak aspek permainan politik, ketimbang permasalahan yang sebenarnya. Lantas, sekarang setelah persoalan bermunculan pemerintah mengkambinghitamkan otonomi daerah yang berjalan tidak dengan semestinya. Padahal jika mengkajinya lebih jauh, peluang-peluang terjadinya segenap persoalan bangsa jelas ada. Itu tercermin dari minimnya kasus-kasus sensitif yang diambil tindakan hukumnya secara jelas, untuk tidak mengatakan tidak ada. Kasus-kasus yang menimpa Ahmadiyah saja, sebagai contoh, terus terjadi di beberapa tempat. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian hukum yang jelas, yang memberi keadilan bagi minoritas. Sementara warga Ahmadiyah di Jawa Barat dan di Lombok cukup lama terkatung-katung dalam pengungsian.

Dari kekecewaan Anda terhadap pelbagai kemunafikan negara, lalu dalam pandangan Anda seharusnya seperti apakah rumusan negara yang liberal, yang tegas secara hukum, yang dapat melindungi hak-hak sipil dan kebebasan sipil?

Saya ingin melihat secara positif peran Departemen Agama (Depag), sebagai representasi dari negara, walaupun saya salah satu orang yang sangat kritis terhadapnya dengan secara langsung membicarakan beberapa hal yang cukup krusial di Depag, termasuk pernah mengusulkan supaya Depag dibubarkan saja. Saya ingat bahwa saya pernah ditanggapi serius oleh para bapak yang mengaku dan mengklaim punya pengalaman dan pengetahuan lebih banyak tentang sejarah pendirian Depag. Kendati beroleh penjelasan yang bagi saya cukup logis, tetapi belum tentu dari refleksi pemaknaannya ke dalam konteks sekarang. Sebab, hal tersebut bisa tercermin dari omongan dan tingkah laku orang-orang semacam itu (mungkin saja tidak semua, tetapi dapat dikatakan umumnya orang-orang di Depag masih berpikiran sempit).

Keberadaan agama-agama di negeri ini luar biasa dari segi kuantitas, namun demikian dibutuhkan peran Depag untuk dapat mengatur dan mendorong perkembangan semua agama yang ada di Indonesia kepada kualitas yang pantas dihargai. Depag seharusnya mulai terbuka dengan kenyataan

Efek positif lain dari pendidikan yang benar adalah, supaya kita tidak terjebak pada sikap mudah menuduh, berprasangka dan menjustifikasi secara hitam-putih, tetapi melihat, mempelajari dan menilainya secara obyektif.

bahwa jumlah aliran di masing-masing agama kian marak. Bahkan, kalau kita mau benar-benar realistis dalam konteks menjamin dan melindungi kebebasan beragama, pemerintah juga harus mulai mengkomodir bukan saja agama-agama yang sudah tumbuh berkembang sebelumnya, yang di dalamnya terdiri dari pelbagai agama suku, tetapi juga agama-agama dari luar seperti Bahai, Sikh, Yahudi dan lainnya agar dapat saling hidup berdampingan di negeri ini. Tetapi dengan catatan seperti yang saya katakan tadi, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yakni perihal masih demikian lemahnya pemerintah menyikapi semua ini dengan serius.

Fungsi Depag sebagai institusi pemerintah adalah mengupayakan kesempatan dan ruang-ruang konsultatif bagaimana agar masyarakat memahami keberadaan kelompok-kelompok agama atau kepercayaan lainnya secara terbuka. Pada saat yang sama Depag juga mengupayakan bagaimana agar kelompok-kelompok agama atau kepercayaan dapat memahami bahwa keberadaan mereka masing-masing tidak lepas dari

kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural, dan kebebasan beragama di Indonesia seyogianya ditempatkan dalam realitas atau konteks tersebut.

Pandangan semacam itu sangat relevan untuk dikedepankan, karena kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan apapun menjadi hak manusia yang hakiki, tanpa harus dibatasi hanya pada enam agama. Pada sisi lain, tidak ada ketentuan tertulis dalam konstitusi bahwa negara mengakui enam agama saja. Padahal jaminan negara atas kebebasan warga negara untuk memeluk agama, apapun agama dan kepercayaannya, sangat jelas tertuang dalam pasal 29, terlebih lagi pasal 28, amandemen UUD 1945. Namun demikian, lagi-lagi, semua itu adalah cara negara membohongi kita.

Sebab, melalui rumusan-rumusan yang bagus seperti yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak berarti dalam praktiknya tidak bermasalah. Karena dalam implementasinya sama sekali bertolak belakang. Jadi, jika mengacu pada keberadaan Departemen Agama, institusi tersebut seperti halnya orang bingung, sakit. Fungsinya yang ideal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jangan heran, dari sanalah sering muncul persoalan di masyarakat seperti ketidakadilan, terancamnya pluralisme agama, terbakinya kerjasama antaragama, tidak jelasnya pendidikan agama, bahkan sekarang dengan soal kebhinnekatunggalikaan masyarakat Indonesia yang mulai tercerai-berai, yaitu dengan munculnya perda syariah di berbagai wilayah di Indonesia, dan masih banyak kasus lainnya.

Contoh lain lagi, mungkin kita kerap melihat dalam satu kecamatan atau satu kabupaten yang penduduknya cuma 100 ribu dengan mayoritas umat Islam, tetapi di sana terdapat 3 gedung gereja. Warga sendiri tidak mengerti gereja apa saja itu, bagaimana sifatnya dan apa denominasinya. Menurut saya kalau Departemen Agama benar-benar berfungsi sebagai sebuah lembaga dari agama-agama yang memperhatikan dan memikirkan kepentingan-kepentingan masyarakat, maka ia harusnya membuka kesempatan, memfasilitasi masyarakat di tempat yang seperti itu untuk berkumpul dan duduk bersama-sama guna membicarakan semua persoalan agama, termasuk keberadaan gereja-gereja atau kelompok-kelompok agama minoritas yang ada di situ, juga kelompok-kelompok Islam dengan paham yang bervariasi yang ada di wilayah itu. Bila tidak, maka masyarakat hanya akan saling curiga karena tidak mengerti dan tidak mendapat informasi

yang sebenarnya tentang apa yang sekarang sedang ada dan terjadi di lingkungan itu.

Dengan Depag membuka forum atau percakapan bagi semua warga, setidaknya akan ada orang yang bertanya, menjawab, menjelaskan atau klarifikasi ihwal persoalan yang dianggap penting dan tidak diketahui sebelumnya. Sehingga, paling tidak, kita yang ada di situ mengerti: ya di sana ada masjid-masjid dan tiga gereja; mereka adalah kelompok agama ini atau itu, alirannya jelas, dan lain sebagainya. Sebab, jangankan orang non-Kristen, sesama Kristen pun kita sering tidak mengerti gereja apa saja yang ada di tengah lingkungan kita. Karena forum semacam itu tidak pernah diselenggarakan oleh Depag, sehingga pemerintah membiarkan kecurigaan, kecemburuan, dan

prasangka berlangsung di antara warga. Di antara Islam sendiri, karena sebelumnya tidak ada ruang untuk membicarakan bersama persoalan perbedaan paham keagamaan, sehingga belakangan meledak kasus pengusiran, pengrusakan dan upaya kekerasan lainnya terhadap Ah-

Kita perlu semakin giat melakukan aksi bersama untuk kepentingan bersama, juga melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan alternatif yang terarah pada pembangunan masyarakat pluralis Indonesia yang merdeka, bebas dan demokratis.

madiyah, Syi'ah dan lainnya. Atau, walaupun ada ruang, tetapi tidak melibatkan semua pihak, melainkan lebih kepada menggalang kekuatan bagaimana supaya bisa melakukan penolakan terhadap kelompok semacam itu, bukan dengan semangat menghargai kemajemukan. Karena itu, cara kekerasan yang selalu menjadi pilihan dari ekspresi penolakan atas nama agama dan demi agamanya sendiri (menurut pikiran orang atau kelompok seperti itu). Begitupun kasus-kasus yang menimpa gereja-gereja. Jadi, masyarakat dibiarkan saling mencurigai dan berprasangka dengan melabelkan stereotip-stereotip terhadap agama atau paham lain yang berbeda tanpa terlebih dahulu memahami dengan baik apa sebenarnya. Untuk itu, yang sekarang kita lakukan, sebagaimana juga lembaga-lembaga seperti Interfidei, antara lain, mengambil alih peran yang seharusnya dilakukan oleh Depag yang tidak berjalan atau malah yang amburadul. Ini tantangan perkembangan masyarakat plural serta dialog dan kerjasama antar-agama ke depan.

Jika selama ini menurut Anda pemerintah, dalam hal ini Depag, tidak dapat berperan memfasilitasi warga untuk dialog antar-agama dan keyakinan, lalu rumusan praktis dan strategis seperti apa yang nantinya dapat menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan sipil dalam beragama sehingga tidak terulang terus kasus-kasus serupa – yang mencabut hak-hak dan kebebasan warga yang disebabkan perbedaan aliran atau, misalnya, alasan bahwa di sini bukan mayoritas Kristen sehingga tidak boleh mendirikan gereja, dan seterusnya?

Pada hematnya, perlu dipertanyakan bagaimana negara ini memahami pluralitas agama di masyarakat? Sebab, jika diperhatikan, negara lebih banyak terjebak dalam soal fisik. Artinya, negara sebenarnya mengetahui dan sadar bahwa masyarakat kita plural, baik dalam agama maupun etnis. Tetapi ketika interaksi terjadi di antara satu dengan yang lainnya, dari situ negara bukan berupaya menyikapi secara lebih serius dalam mengatasi persoalan yang ditimbulkannya, justru mulai memperhitungkan kepentingan-kepentingan yang dapat dimanfaatkan secara politis. Coba Anda bayangkan, ketika saya ikut *hearing* di DPR terkait dengan soal hak-hak minoritas, kemudian terdapat pasal yang membicarakan tentang agama, yang pada waktu itu terdapat dalam bab di bagian depan tentang ketentuan umum, tetapi di pasal-pasal berikutnya tidak ada yang menyinggung dan menjelaskan tentang hal agama tersebut. Kemudian saya menanyakan kepada mereka, para anggota DPR, mengapa tentang agama disinggung dalam ketentuan umum tetapi tidak diuraikan dalam pasal-pasal penjelasan berikutnya? Jawaban dan reaksi mereka mengejutkan saya. Mereka beralih bahwa persoalan agama terlalu sensitif untuk dibicarakan di Indonesia. Lantas saya bilang: bagaimana kita bisa berharap bahwa persoalan-persoalan berkaitan dengan agama di Indonesia akan teratasi, kalau lembaga yang setingkat DPR Pusat saja tidak berani membicarakan, tetapi lebih siap untuk menghindar? Aspek ini selama beberapa tahun terakhir bukan hanya merupakan isu yang menghangat, melainkan mengganggu, tetapi justru tidak dibicarakan dan tidak dirumuskan dalam RUU Hak-hak Minoritas?

Kenapa kita masih tidak berani dan takut menyentuh persoalan agama dengan alasan terlalu sensitif? Sudah waktunya kita harus berani keluar dari sensitivitas yang kaku seperti itu. Jangan terus-menerus kita pelihara dan mendiamkan problem sensitif dalam permasalahan agama. Model seperti ini menjadi pola khas Orde Baru, melalui doktrin SARA, toleransi,

kerukunan yang sama sekali tidak mendidik masyarakat Indonesia untuk hidup dalam realitas sesungguhnya secara jujur, terbuka dan saling menghargai. Doktrin seperti itu sangat tidak relevan dan tidak bisa dipelihara lagi. Pemerintah harus melakukan terobosan bila masih berharap bahwa Indonesia yang memiliki masyarakat yang plural, benar-benar bisa hidup bersama, saling menghargai dan membangun Indonesia dari potensi kemajemukan masyarakat untuk semua lapisan masyarakat.

Terancamnya pluralitas negeri ini diperumit lagi dengan pengharaman MUI yang diikuti dengan penolakan beberapa kalangan masyarakat terhadap prinsip pluralisme. Alasan resistensi MUI dan masyarakat terhadap pluralisme karena paham ini kerap dipahami sebagai sinkretisme, sebagai paham yang menganggap bahwa semua agama itu sama, benar, tidak ada yang salah. Dalam pandangan Anda, bagaimana semestinya pluralisme dipahami?

Saya tertarik Anda memulai pembahasan pluralisme ini dengan menyebutkan kata sinkretisme. Pada hemat saya, banyak orang keliru memahami konsep sinkretisme. Dalam banyak hal, sinkretisme dianggap negatif, karena mengaburkan agama, maka perlu dihindari bahkan ditolak. Pada saat yang sama, mereka yang menganggap agama yang dianutnya tidak sinkretis, karena itu, bagi mereka, harus dilindungi, dijauhi dari unsur-unsur atau kegiatan-kegiatan yang diduga atau dicurigai akan mencampurkan agamanya dengan agama lain atau hal-hal lain di luar agamanya, sehingga menjadi sinkretis. Karena itu kecenderungan atau potensi seperti itu harus ditolak juga oleh mereka.

Menurut saya ada dua hal yang memprihatinkan di sini : pemahaman yang keliru dan sikap yang salah. Sebab kalau kita paham betul tentang sejarah agama-agama, sejatinya semua agama sinkretis. Agama apa yang tidak sinkretis di dunia ini? Semua agama yang kita kenal dan dianut oleh penduduk bumi sekarang ini sinkretis, termasuk ketika sebuah agama masuk di Indonesia. Islam pun demikian, manakala muncul dan berkembang di dunia Arab yang latar belakang budayanya tidak tunggal. Bagaimanapun bila diperhatikan, agama Islam sangat kental dipengaruhi oleh budaya Arab karena dia lahir, berkembang dalam lingkungan sosial-budaya Arab. Makanya kita lihat di hampir semua karakter keagamaan dari agama Islam melekat kekhasan budaya Arab: bahasa al-Quran dengan bahasa Arab, pakaian,

arsitektur masjid, dan lain sebagainya. Dia sama sekali tidak tunggal, tetapi telah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan budaya dan lingkungan sosial setempat. Contohnya Islam di Indonesia. Agama Islam yang datang dari dunia Arab, sudah bercampur aduk dengan budaya lokal. Memang ada upaya untuk mempertahankan ciri keislamannya *ala* budaya Arab: memakai bahasa Arab, jilbab, arsitektur dan design yang khas Arab. Tetapi dalam kenyataannya setelah tiba di Indonesia, mulai terpadukan dengan budaya khas Indonesia, misalnya: memakai sarung, peci, intonasi suara adzan yang sudah disesuaikan dengan intonasi “lagu” lokal, model arsitektur masjid yang sudah disesuaikan dengan arsitektur lokal, dan lain sebagainya.

Demikian halnya dengan agama Kristen, tidak tunggal. Di hampir semua unsur dalam kekristenan sudah mengalami proses sinkretisasi sosial-kultural dengan lingkungan di mana agama Kristen itu lahir, bertumbuh, tersebar dan hidup berkembang. Dan ketika sampai ke Indonesia sudah melalui beberapa penyesuaian kultur dan peradaban serta tradisi dunia yang luas dan berbeda-beda termasuk tradisi lokal di mana gereja itu lahir dan bertumbuh.

Bagaimana kita bisa mempersalahkan atau menolak pandangan pluralisme karena alasan atau faktor sinkretisme? Itu sangat berlebihan. Sinkretisme diidentikkan dengan pencampur-adukan agama-agama sehingga bisa mengakibatkan “identitas” agama “saya” atau agama “kami” menjadi kabur, tidak jelas atau bahkan hilang, tergantikan dengan agama lain atau agama baru? Ini sangat berlebihan. Justru dalam pluralisme kita saling mengakui keberadaan dan perbedaan masing-masing agama. Tidak ada yang direlatifkan, tetapi perlu dengan kekhasan masing-masing. Perbedaan-perbedaan adalah niscaya yang dari padanya seseorang menjadi jelas dengan identitasnya. Pada waktu yang sama, orang lain mengerti dengan jelas identitas sesama lainnya. Karena kalau sudah sama, berarti tidal plural lagi.

Menurut saya, kesimpulan-kesimpulan yang dibayang-bayangi oleh faktor ketakutan, kecurigaan dan kekhawatiran akan semakin membuktikan betapa tidak tepatnya kita mendefinisikan suatu gagasan atau paham (pluralisme). Dan kita akan selalu menjelaskannya secara tidak benar.

Masyarakat kita plural. Sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak atau dihindari. Itu sudah merupakan *sunnatullâh*. Oleh sebab itu, ketika keluar fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme, menurut saya, hanya menunjukkan bahwa pemikiran MUI sempit. Celaknya pengharaman ini

muncul dari orang-orang berpendidikan – setaraf para petinggi dan ulama di MUI. Saya pernah secara langsung mengkritik Din Syamsuddin dengan mengatakan, aneh ketika MUI mentabukan pluralisme. Apa yang salah atau keliru dengan paham tersebut? Jawabnya: itu pemikiran para ulama dan hanya diperuntukkan bagi orang Islam; jangan sampai orang Islam terjebak pada sinkretisme. Pikir saya kemudian, apa ini tidak keliru? Mengapa MUI harus bersikap seperti “satpam” dalam soal kehidupan beragama masyarakat? Apa ini memang tugas dan fungsi MUI? Secara sederhana, benak saya menggumam: bahwa fatwa ini konyol sekali dan semoga tidak terjadi pada lembaga-lembaga keagamaan yang lain, sebab nantinya kehidupan beragama masyarakat yang plural menjadi semakin kacau dan akan melahirkan konflik-konflik baru, intra atau antar-agama.

Bagaimanapun bila diperhatikan, agama Islam sangat kental dipengaruhi oleh budaya Arab karena dia lahir, berkembang dalam lingkungan sosial-budaya Arab. Makanya kita lihat di hampir semua karakter keagamaan dari agama Islam melekat kekhasan budaya Arab: bahasa al-Qur'an dengan bahasa Arab, pakaian, arsitektur masjid, dan lain sebagainya. Dia sama sekali tidak tunggal, tetapi telah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan budaya dan lingkungan sosial setempat.

Jika mengikuti alasan mereka, terutama para ulama, kenapa menentang dan mengharamkan pluralisme dengan mengaitkannya pada sinkretisme, karena mereka sangat khawatir gagasan tersebut berakibat pada pendangkalan iman umat, lantaran keyakinannya tidak murni lagi karena telah terkontaminasi paham teologi dan agama lainnya.

Kekhawatiran itu tumbuh karena mereka tidak yakin dengan apa yang mereka percayai. Artinya, keyakinan atau keberagamaan mereka lebih diukur dari hal-hal yang sifatnya dogmatis, yang formal dan institusional belaka. Karena itu yang terjadi adalah, kecurigaan, kekhawatiran dan ketakutan; khawatir dan takut bila anggota atau umatnya berkurang. Tugas dan tanggung jawab mereka hanya bisa diimplementasikan melalui fatwa-fatwa seperti ini.

Mereka tidak memperhitungkan dengan wajar dan jujur bahwa apa yang dilakukan justru membatasi seseorang untuk bergaul secara luas dengan agama lain atau paham dan aliran yang berbeda di dalam agamanya sendiri – yang seharusnya tidak bisa dihindari apalagi ditolak atau dilarang. Mereka takut keislamannya tergerus, melemah dan imannya malah goyah terpengaruh dengan agama atau paham lainnya. Bagi saya, kekhawatiran seperti ini terlalu berlebihan, karena pikiran dan hati sudah kelewat banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan: religiusitas sempit kelompok, kepentingan politik negara dan poilitik agama, yang semuanya mengatasnamakan agama. Mereka tidak yakin tentang apa yang mereka percayai. Kalau saya bisa katakan, keyakinan iman mereka tentang agama yang dianutnya tidak tulus, tidak terbuka. Akibatnya mereka terus merawat rasa curiga.

Sebaliknya, semakin seseorang paham benar dengan agamanya, semakin yakin pula dengan imannya, tidak akan khawatir dengan apapun juga, bahkan bebas bergaul dan terbuka dengan orang yang berbeda agama. Kehidupan beragamanya dewasa. Artinya, dengan siapapun dia bergaul ia akan selalu percaya diri dan justru kian memperkuat keagamaannya. Dan pasti di sana tidak akan terjadi hal-hal seperti yang dikhawatirkan.

Justru yang mengharamkan pluralisme itu MUI atau para ulama yang merasa mempunyai umat yang banyak. Karena mereka beranggapan bahwa banyak dari umatnya yang kadar keimanannya masih belum stabil dan kuat. Untuk itulah mereka berkeras memagari iman umat dengan mengharamkan pluralisme.

Saya menghargai MUI dan menghargai maksud mereka dengan fatwa itu. Tetapi, saya harap MUI juga terbuka untuk menerima kritikan, pemikiran dari warga masyarakat lain yang turut merasakan efek dari fatwa tersebut dan merasa prihatin dengan dikeluarkannya fatwa seperti itu terutama dalam konteks masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang plural, yang sedang berupaya membangun rasa saling percaya, menghargai perbedaan dan mulai membangun suasana damai yang dinamis. Saya tidak akan menyinggung perihal urusan ajaran Islam ke dalam. Yang saya peduli adalah, tentang implikasinya dalam masyarakat Indonesia yang plural. Karena menurut saya seharusnya lembaga keagamaan seperti MUI, lebih terbuka dan realistis kepada hal-hal yang berbeda, sebagaimana tercermin dari realitas Indonesia, tanpa takut dan khawatir. Apalagi warga masyarakat kita dominan

Muslim – dari segi kuantitas. Menurut saya, seharusnya warga Muslim Indonesia menjadi contoh bahwa mereka tidak khawatir, tidak takut dengan kenyataan plural di masyarakat.

Tadi sudah saya kemukakan panjang-lebar, bahwa hal tersebut menunjukkan kalau orang-orang di MUI dan ulama-ulama yang menyokong pengharaman pluralisme tidak begitu percaya diri terhadap apa yang sudah terserap dan menjadi suatu keyakinan. Mereka adalah orang-orang yang merasa diri beragama Islam paling benar, tetapi ternyata masih terbersit kekhawatiran yang berlebihan. Saya pikir agama Islam tidak seperti itu, demikianpun pengikut Islam yang benar tidak bersikap seperti itu. Celakanya, kekhawatiran mereka lantas ditimpakan kepada umatnya, sehingga wujud dari kekhawatiran mereka akhirnya menghasilkan fatwa

yang justru menularkan kekhawatiran kepada umatnya. Umat mengikuti fatwa itu bukan karena ketaatan atau atas kekuatan iman di hatinya sebagai orang Islam, melainkan lebih karena cerminan rasa tidak percaya diri dan takut pada MUI atau aturan agama yang formal. Menurut saya ini salah satu didikan para tokoh, ulama atau pimpinan agama yang tidak benar.

“Liberalisme agama” sebagai wujud dari keterbukaan dan kemampuan melakukan “kritik diri”, yaitu sikap yang sangat penting dalam kehidupan yang majemuk, tanpa harus menghilangkan atau menghapus identitas keagamaan.

Ingat, masyarakat kita semakin dewasa dalam hidup beragama dan tidak mau diatur oleh berbagai aturan formal yang kaku dan menyempitkan hidup beragama mereka. Sudah banyak pengalaman yang menjadi bahan pembelajaran masyarakat dalam mendewasakan iman atau kepercayaan mereka. Dan mereka mampu untuk melakukan hal itu tanpa perlu diatur atau dilindungi dengan cara-cara seperti ini (fatwa).

Keberatan beberapa kalangan lain terhadap pluralisme lebih karena paham ini dianggap menyebarkan gagasan relativisme, yang melihat benar dan salahnya sesuatu tidaklah berada pada satu ukuran tertentu saja. Karena itu, segala sesuatunya, tanpa atau dengan mengikatkan pada ukuran benar dan salahnya masing-masing, diperbolehkan dan dipersilakan saja. Segalanya nisbi. Sebab, kebenaran pada satu ruang dan waktu tertentu tidak lantas benar pada ruang dan waktu lain yang berbeda.

Pengalaman kita di Interfidei juga dalam rangka *concern* terhadap isu pluralisme dan relasi antar-agama dan keyakinan, yang sama sekali tidak ada indikasi apapun ke hal-hal yang menjadi kekhawatiran tersebut. Saya sudah katakan di atas bahwa tidak ada yang relatif dalam pemahaman pluralisme dan dalam praktik serta pengalaman kami selama hampir 16 tahun. Kalaupun ada yang berpikir bahwa pluralisme punya kecenderungan demikian, itu hal yang pasti. Tetapi tidak ada hal yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kekhawatiran tersebut terjadi. Juga tidak ada di antara kami yang mempunyai agenda seperti itu. Artinya, kita tidak pernah mengaitkan pluralisme yang kita perjuangkan dengan relativisme. Maka, *pertama*, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan pluralisme sama sekali bukan relativisme. *Kedua*, kembali ke hal sebelumnya, bahwa pluralisme bukanlah gagasan yang menggerus iman. Berikutnya, pluralisme juga tidaklah menganjurkan perpindahan agama atau membuat, apalagi memaksa orang lain berpindah agama. Tentang ini kita bisa cek ke semua jaringan, teman, kenalan yang pernah mengikuti kegiatan Interfidei, atau kelompok-kelompok seperti Interfidei lainnya yang tersebar di Indonesia – dan jumlahnya lebih dari 100 kelompok.

Ada beberapa pengalaman yang bisa menjadi catatan di sini, misalnya, ketika ada peserta yang mencurigai bahwa kegiatan kami adalah untuk mengaburkan identitas agama, tetapi pada akhirnya yang bersangkutan sadar bahwa kecurigaan dan dugaan awal itu ternyata salah setelah mengikuti kegiatan sampai selesai atau ketika ada yang datang bercakap-cakap di Interfidei, kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan Interfidei itu sendiri. Menarik, karena tema besar kegiatan Interfidei selama ini adalah pluralisme, konflik dan perdamaian. Dari kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan, masyarakat justru mampu menceritakan pengalaman sehari-hari mereka dalam kaitannya dengan pluralisme dan merumuskan makna kata tersebut secara baik berdasarkan pengalaman mereka – tanpa ada kekhawatiran atau kecurigaan berlebihan seperti menghinggapi para ulama, MUI.

Jadi, menurut hemat saya, tidak ada hubungannya antara pluralisme dengan relativisme. Itu lebih hanya kecurigaan dan keraguan dari apa yang dipikirkan orang. Saya mempunyai banyak teman Muslim dan akrab dengan mereka. Mereka bebas salat di rumah dan melakukan kegiatan keagamaan mereka di tempat di mana saya berada. Pengalaman pergaulan yang tulus dan jujur seperti ini sama sekali tidak memberi indikasi relativisme.

Bagi kami menakar pluralisme dengan relativisme adalah tidak tepat, dan bukan itu maksud kami dengan gerakan-gerakan yang serupa ini. Kita tidak usah takut iman atau kepercayaan atau keberagamaan kita akan luntur karena faktor relativisme atau karena tercampur dengan agama lain. Yang perlu kita takutkan adalah diri kita sendiri, yang beragama tetapi tidak yakin dengan keagamaan kita.

Konsili Vatikan II yang menghasilkan kesimpulan bahwa “ada keselamatan di luar gereja” merupakan landasan bagi Katolik untuk menyokong gagasan pluralisme. Lantas apakah dalam Protestantisme juga tersedia landasan teologis yang mendukung pluralisme?

Dalam tradisi Protestan sebenarnya sudah sejak lama disadari dorongan menumbuhkan kehidupan saling menghargai dalam konteks masyarakat plural, terutama melalui gerakan *Oikumene*. Kita dapat mulai, misalnya dengan Konferensi Pekabaran Injil di Yerusalem, tahun 1911. Lalu beberapa kali pertemuan berikutnya yang masih terbatas pada kelompok-kelompok Protestan tertentu, antar-denominasi gereja. Maklum, gereja Protestan semakin mekar, jumlah bertambah, terutama jumlah komunitas/jemaat/gereja. Tahun 1948 ketika lahir Dewan Gereja-gereja se-Dunia di Amsterdam, di kalangan Protestan sibuk dengan perbincangan soal pergumulan gereja-gereja dengan situasi akibat perang dunia II. Tetapi dalam sidang-sidang selanjutnya mulai terbuka membicarakan lebih luas tentang agama-agama lain. Tahun 1961 di India sampai tahun 1975 di Nairobi, Protestantisme semakin terbuka membicarakan mengenai bukan saja agama-agama lain, melainkan juga ideologi-ideologi, termasuk membincang ideologi Komunis, karena dianggap sebagai realitas kehidupan yang perlu digumuli bersama oleh gereja-gereja. Tahun 1983, dalam Sidang Raya Dewan Gereja-gereja se-Dunia ke

Menurut saya seharusnya lembaga keagamaan seperti MUI, lebih terbuka dan realistis kepada hal-hal yang berbeda, sebagaimana tercermin dari realitas Indonesia, tanpa takut dan khawatir. Apalagi warga masyarakat kita dominan Muslim – dari segi kuantitas. Menurut saya, seharusnya warga Muslim Indonesia menjadi contoh bahwa mereka tidak khawatir, tidak takut dengan kenyataan plural di masyarakat.

VI di Vancouver, Kanada sudah diperluas sampai ke soal “Justice, Peace and the Integrity of all Creation”. Jadi, kalau dalam gereja Protestan, tradisi untuk mendorong umatnya lebih berpandangan pluralis memang sudah lama.

Tapi pada saat yang sama bermunculan juga kelompok Kristen Protestan yang disebut kelompok *Evangelical*, yaitu aliran dalam kekristenan Protestan yang secara teologis berbeda dengan kelompok Ekumenikal. Yang pertama lebih eksklusif; yang kedua, umumnya, inklusif. Keduanya tetap tumbuh dan berkembang termasuk di Indonesia. Kelompok Evangelikal ini biasanya aliran-aliran yang menuntut supaya semua orang menjadi Kristen. Sehingga, sebagaimana telah kami singgung di atas, jangankan kalian orang Islam, kita yang Kristen juga dikatakan belum Kristen, karena itu perlu dikristenkan lagi. Karena menurut mereka Kristen yang sedang saya anut bukanlah Kristen yang benar, jadi harus dibaptis lagi. Sedangkan kelompok Ekumenikal merupakan kelompok-kelompok yang pluralis, inklusif dan tidak jera mengkritisi gereja dan doktrin-doktrin yang menghalangi kemajuan dan keterbukaan, walaupun tetap saja ada gereja-gereja yang masih tertutup dan sulit untuk bisa terbuka. Tetapi paling tidak kelompok Ekumenikal dalam Protestantisme sudah lebih tercerahkan dari segi dogma dan doktrin – tetapi dari segi institusinya masih sulit.

Dalam setiap agama terdapat konsep tentang klaim kebenaran yang kerap menjadi pemicu atas pandangan umatnya untuk bersikap eksklusif terhadap agama-agama lain bahkan dapat menjadi sumber dari puritanisme. Sebab dengan klaim seperti itu, terbersit anggapan bahwa agamanyalah yang paling menjamin kebenararan hakiki sehingga kemudian tergerak untuk melakukan upaya-upaya meniadakan atau setidaknya memarjinalkan paham atau agama-agama lainnya. Bagaimana Anda memahami konsepsi ihwal klaim kebenaran?

Sebenarnya dalam beragama tidak ada persoalan ketika saya mengatakan bahwa agama Kristen itu yang benar. Namun demikian, keyakinan itu hanyalah menurut saya dan untuk agama saya. Tetapi jangan memakai keyakinan itu untuk mengatakan bahwa Islam atau agama lainnya tidak benar, sebaliknya hanya Kristenlah yang benar. Pada titik di mana kita menganggap bahwa agama lain tidak benar, hanya kita yang benar, menurut

saya itu berbahaya. Di situ letak kesalahannya. Sebab setiap orang beragama, termasuk teman-teman Islam, Budha, Hindu dan kepercayaan lainnya meyakini kalau agamanya yang benar. Tetapi, lagi-lagi, pandangan itu cukup berlaku bagi dirinya tentang agama yang diyakininya, tidak dalam rangka menjustifikasi agama lain sebagai sesat. Demikianpun di dalam kelompok agama-agama itu sendiri, antarpaham atau aliran atau denominasi hendaknya menghindari klaim kebenaran yang dianutnya untuk menuduh lainnya sebagai sesat.

Semua pemeluk agama merasa bahwa agama atau aliran agamanya yang benar. Menurut saya hal ini tidaklah masalah, logis dan dapat diterima. Karena dengan keyakinannya masing-masing itulah orang melakukan dan menjalankan tradisi keagamaannya. Tetapi, lagi-lagi, tidak lalu menjadikan hal itu sebagai dasar untuk mengatakannya yang lain tidak benar. Jika yang terjadi sudah semacam itu, apalagi secara demonstratif menganggap agama lain tidak benar, atau aliran yang lain tidak benar, sesat, maka tindakan semacam itu sudah mengacaukan gagasan pluralisme. Di samping tentunya sudah menjadi masalah hak-hak asasi manusia. Dan bila sampai terjadi kekerasan fisik secara terbuka, maka sudah menjadi tindakan kriminal.

Yang perlu dilakukan adalah,
bagaimana pendidikan pluralisme
mulai digagas dan digiatkan secara
konkret kepada seluruh masyarakat,
baik melalui pendidikan formal
maupun non-formal."

Apa yang saya katakan ini sedang terjadi di Indonesia. Bahkan masih ada praktik-praktik “mengkristenkan” atau “mengislamkan” orang lain hanya karena persoalan *truth claim*. Praktik ini tidak terjadi hanya antara orang yang beragama Islam dan beragama Kristen (Protestan, Katolik), tetapi juga di dalam satu agama, misalnya agama Kristen. Ada kelompok Kristen yang menganggap bahwa orang Kristen lain masih belum Kristen, makanya perlu atau harus dikristenkan sesuai “kekristenan” mereka. Mungkin juga dalam agama Islam, ada kelompok seperti ini, yang mengharuskan supaya orang lain yang berbeda kesilamannya, harus menjadi orang yang beragama Islam sama dengan agama Islam yang dianut oleh orang atau kelompok yang menuntut. Ini persoalan akut dalam pluralisme agama, berkaitan dengan *truth claim*. Ini merupakan sebuah keadaan yang memprihatinkan yang harus diatasi bersama-sama.

Anda memandang SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan), sebuah konsep kerukunan yang dulu dipopulerkan oleh Orde Baru, telah mencederai semangat pluralisme. Sebab SARA justru memunculkan bentuk intoleransi dan menguatnya gejala-gejala saling mencurigai di antara umat yang berbeda agama, sehingga terdapat potensi kuat dan benih-benih konflik yang mudah meledak menjadi tindak kekerasan. Jadi, dalam pandangan Anda konsep tersebut sebagai kebijakan pemerintah yang keliru dan seharusnya sudah ditinggalkan untuk menciptakan masa depan beragama yang terbuka, lebih menjunjung kedamaian dan saling menghargai?

Sejak dulu saya memang tidak setuju konsep SARA sebagaimana yang dimengerti dan disikapi oleh pemerintah Orde Baru. Pada waktu itu saya berpikir kenapa sampai pemerintah sebodoh itu? Apakah mereka tidak paham betul apa yang dimaksudkan dengan SARA dan apa implikasinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia? SARA itu sebenarnya menggambarkan kita semua, masyarakat Indonesia, yang berbeda baik suku, agama, ras dan golongan. Mengapa dulu, bila kita kumpul-kumpul, berdiskusi, apalagi membahas tentang topik-topik yang sedang aktual lalu mengkritisi apa yang berlangsung di masyarakat – selalu ada saja hambatan, entah diperintahkan supaya memohon izin kepada bidang sospol di pemerintahan atau polisi atau, bila tidak, yang akan terjadi diskusi tersebut dilarang atau peserta diskusi “diangkut” ke kantor polisi, diinterogasi, beberapa di antaranya ada yang ditahan dan ada yang “hilang”. Menurut saya, konsep tentang SARA yang dimunculkan oleh pemerintahan Orde Baru, merupakan bukti lain dari betapa represifnya pemerintahan penguasa saat itu. Mereka menciptakan istilah seperti “hantu” yang muncul tidak pandang siang atau malam. Hal ini membuktikan juga betapa lemahnya pemerintah saat itu untuk jujur kepada rakyat, bahwa sebenarnya pluralitas masyarakat sedang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Politik SARA adalah salah satu wujud dari upaya tersebut.

Mungkin pada waktu itu pemerintah hendak men-ciptakan toleransi?

Toleransi sebenarnya istilah yang politis saat itu. Toleransi atas nama agama, pada waktu itu, mendangkalkan seluruh dinamika realitas ke-

majemukan di masyarakat. Sebab, kata toleransi yang dipraktikkan pada era Orba bukan hanya membungkam kita, tetapi juga sama sekali tidak mendidik kita untuk jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Tentu saja itu berbeda dengan pluralisme yang kita dorong terus sekarang ini. Mengapa saya bilang begitu? Karena sebelumnya kita tidak dibiasakan untuk mengatakan dengan benar dan jujur tentang apa yang saya rasakan tentang orang lain ketika bersama-sama dengan mereka. Kita tidak terbiasa mengatakan atau tidak jujur dengan ketidaksenangan yang kita rasakan dari orang lain atau kita tidak terbuka untuk menerima teguran, kritikan dari orang lain yang merasa terganggu dengan praktik keagamaan kita. Ini karena faktor toleransi dan kerukunan yang diajarkan oleh pemerintah Orde Baru, dengan alasan supaya jangan sampai terjadi konflik – untuk itu pembicaraan seputar isu SARA tidak diperbolehkan. Pemerintah Orba memilih, daripada ribut-ribut, lebih baik jangan menyinggung soal-soal yang menurut pandangan mereka sensitif. Pertanyaan kami, mengapa harus menghindari? Mengapa harus takut? Mengapa tidak membuka kemungkinan ke arah itu sehingga masyarakat kian terdidik untuk menjadi masyarakat yang terbuka, jujur dan mampu mengembangkan hidup bersama dalam perbedaan dengan baik, obyektif dan kondusif? Karena, menurut saya, faktor melarang untuk membicarakan atau mendorong masyarakat untuk bersikap toleran secara sempit seperti ini justru yang menjadi sumber dan potensi konflik.

Orang sering bilang ketika zaman Soeharto semua aman, baik, dan sebagainya. Maka saya juga bilang, “Itu benar. Tetapi saat itu hal baik yang dimaksudkan adalah semu. Masyarakat tidak sadar bahwa mereka sedang dititipi “bom waktu”, mereka menabung untuk sesuatu yang sekarang kita rasakan: meledaknya konflik dan pertikaian yang melibatkan agama-agama. Seharusnya kita mulai mendidik diri kita untuk lebih terbuka, mendidik masyarakat untuk bisa hidup dalam realitas keanekaragaman, kemajemukan; tidak menghindari, apalagi melarang untuk saling mengenal. Itu sebenarnya salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh Departemen Agama bila ingin eksistensinya mempunyai manfaat positif bagi masyarakat. Tetapi yang terjadi tidak demikian, malah dalam banyak hal, fungsi Depag bukan hanya tidak jelas, tetapi merupakan kepanjangan tangan kekuasaan yang turut merusak hubungan-hubungan antar-masyarakat, khususnya dalam hal hubungan antar-umat beragama.

Interfidei, sebagai lembaga yang mendorong terciptanya dialog antariman, bagaimana upaya mendorong agar di antara warga mulai tumbuh kesadaran untuk menjunjung, menghormati, merawat dan merayakan perbedaan-perbedaan itu dalam konteks Indonesia?

Interfidei mulai hadir sejak tahun 1991 di Yogyakarta (dan hanya di Yogyakarta), kemudian mempunyai banyak teman dan jaringan di semua daerah di Indonesia di mana mereka memiliki *concern* dan perjuangan yang sama, termasuk dalam soal hubungan antar-iman dan agama. Ada beberapa hal yang menjadi *concern* dan harapan Interfidei: a) Penting untuk membangun masyarakat majemuk yang bukan saja sadar dengan kemajemukannya secara kuantitatif-eksistensial, tetapi dinamis dalam arti kualitatif dan memiliki kesadaran berinteraksi secara terbuka, apa adanya; b) Penting untuk membangun sebuah masyarakat yang memahami secara komprehensif-obyektif tentang makna kemajemukan agama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia; c) Penting untuk membangun sebuah masyarakat yang dewasa dalam menjalankan hidup keberagamaannya dalam konteks Indonesia yang pluralis; d) Membangun masyarakat yang mampu mengkritisi kehidupan keagamaannya dan terbuka kepada dinamika kemajemukan tanpa khawatir dan takut.

Persoalannya, dan ini dibutuhkan sikap saling terbuka, selama ini masyarakat terdidik dengan “doktrin” negara, bahwa hanya ada lima agama di Indonesia (sampai sekarang pun umumnya masih demikian, padahal sudah enam agama yang diakui oleh negara – hal yang bagi kami merupakan persoalan serius yang perlu dikaji secara kritis ke depan). Doktrin itulah yang dibangga-banggakan selama ini sebagai kenyataan kekayaan pluralisme agama di Indonesia, terutama pada era pemerintahan Orba. Lalu hidup beragama yang dikembangkan hanya sebatas yang ritual dan institusional, sementara hal-hal yang berhubungan dengan realitas kehidupan serta problem-problem kemasyarakatan masih dianggap tabu untuk disentuh. Kalaupun ada, biasanya lebih karena untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kenyataan ini lalu memunculkan pertanyaan, kalau begitu apa fungsi agama-agama dalam kehidupan bermasyarakat?

Kami juga melihat secara jelas bahwa dalam urusan dengan agama-agama, baik ke dalam maupun ke masyarakat, dalam banyak hal masyarakat belum menyadari bahwa mereka sendiri memiliki potensi pengalaman

berinteraksi dalam kemajemukan yang luar biasa, yang dapat mereka kelola sendiri. Suatu potensi yang dapat mereka manfaatkan untuk membangun masyarakat yang demokratis. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, selama ini masyarakat banyak bergantung kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada institusi atau pejabat lembaga keagamaan, atau istilah kerennya, kepada para elite – pemerintah atau agama, sama saja. Masyarakat tahu hanya sebatas bahwa kita majemuk, ada 5 atau 6 agama, tidak lebih dari itu.

Dalam kaitan dengan itu semua, Interfidei melakukan beberapa kegiatan. Selain untuk maksud sosialisasi gagasan tentang pluralisme, dialog serta kerjasama antar-iman, juga kegiatan-kegiatan yang mendorong masyarakat agar mampu mengelola potensi kemajemukan di tingkat lokal dan melihat serta melakukan aksi konkret bersama dalam menghadapi persoalan riil kemanusiaan, bagaimana menghadapi dinamika kemajemukan masyarakat. Kegiatan-kegiatan lain lebih kepada upaya membangun sebuah masyarakat kritis dalam menyikapi kemandegan dan kekakuan dalam kehidupan beragama, baik yang disebabkan oleh berbagai peraturan yang dikeluarkan negara/pemerintah maupun oleh institusi keagamaan.

Kegiatan-kegiatan ini terbagi dalam beberapa bidang: penerbitan, diskusi, penelitian, pendidikan yang terjadi tidak hanya di Yogyakarta/Jawa tetapi meluas sampai ke hampir seluruh daerah propinsi di Indonesia. Satu hal menarik yang kami pelajari dari pengalaman selama ini dengan berbagai evaluasi, adalah soal orientasi, dasar serta muara kegiatan Interfidei: apakah pada soal kesamaan untuk mencapai kesamaan yang ada pada agama-agama atau perbedaan untuk mencapai semangat bersama dalam kepelbagaian untuk kepentingan bersama? Di sini, kami lebih menekankan pada perbedaan bukan pada kesamaan. Artinya, bagi kami tentang kesamaan tinggal bagaimana ditingkatkan atau dikembangkan; sementara soal

Penting juga bagaimana masyarakat dididik untuk dapat melihat potensi pluralitas masyarakat sebagai potensi bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang demokratis. Karena, justru dalam konteks ini, sumbangan kemajemukan agama-agama di Indonesia kepada masyarakat dan bangsa Indonesia akan sangat bermakna.

perbedaan merupakan realitas yang harus tetap dihargai sekaligus dijadikan sebagai potensi otentik masing-masing masyarakat untuk membangun Indonesia. Selain itu, dengan menekankan pada perbedaan, kita berharap supaya tidak terjebak pada hal-hal yang sudah tidak ada persoalan atau dianggap tidak ada persoalan lagi, dan menjadi lupa atau sengaja menghindari dari realitas dengan problem-problem perbedaan. Itulah sebabnya apa yang kami lakukan selama ini sampai pada upaya-upaya yang menyentuh soal-soal yang berkaitan dengan doktrin, dogma dan teologi yang bagi banyak orang masih menganggap sebagai hal sensitif untuk disapa dan dijamah dalam kegiatan-kegiatan hubungan antar-iman. Untuk itu semua kami sudah melakukannya sepanjang 16 tahun dan respon dari masyarakat luar biasa. Dari berbagai evaluasi, mereka merasakan sangat bermanfaat. Kalau kita tidak berani menyentuh, mengungkapkan dan membicarakan perbedaan, kapan kita bisa saling menghargai dan menghormati dengan sesungguhnya?

Menurut hemat saya hal-hal seperti itu idealnya dilakukan dalam ranah civil society sebagaimana dilakukan dan didorong oleh beberapa lembaga, termasuk lembaga Anda. Tetapi perlukah negara menyentuh aspek atau wilayah normatif dan teologis untuk menyebarkan atau mendorong agar warganya sadar dan menghargai pluralitas?

Saya kira negara tidak perlu menyentuh sampai ke situ, tetapi negara mendorong dan memfasilitasi kemungkinan ke sana. Jadi tidak langsung negara mencampuri persoalan yang terkait dengan soal privat dalam agama-agama atau beragama, termasuk mengurus perbedaan doktrin seperti yang terjadi pada perda-perda syariah yang direstui pemerintah. Menurut saya hal ini tidak dapat dibenarkan. Yang perlu diatur pemerintah adalah sebatas pada hal-hal yang mana, ketika masyarakat, dengan komunitas keagamaan yang berbeda, ingin mengimplementasikan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di sini negara perlu membuka diri dan mendukung, memberi fasilitas serta semua hal dan kemungkinan ke arah itu. Tidak membuat aturan-aturan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan serta hak-hak kewarganegaraan, lebih-lebih peraturan-peraturan yang mengembangkan politik diskriminasi.

Jika melihat kembali kepada Departemen Agama, sebenarnya fungsi untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis di tengah keber-

bagian masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab institusi ini, sebagai kepanjangan tangan negara. Fungsinya seharusnya bisa memfasilitasi dan memberi ruang pada masyarakat agar terjadi komunikasi dan dialog yang lebih realistis tentang perbedaan. Satu contoh yang menarik seperti sudah saya ceritakan di atas, kalau di satu tempat ada banyak gereja, maka seharusnya Depag memfasilitasi bagaimana masyarakat di situ bisa saling mengerti dan saling menyapa, tidak hidup dalam kecurigaan atau persaingan tidak sehat. Mungkin ada anggota masyarakat yang tidak bisa mendirikan gereja karena hanya ada 7 keluarga di situ, tetapi ternyata mampu membangun gedung gereja. Bagaimana hal itu bisa dibicarakan bersama secara terbuka agar masyarakat tidak tetap pada kecurigaan, kecemburuan, dan lain sebagainya.

Soal kebijakan negara dalam mendorong affirmative action terhadap pengembangan kelompok atau agama minoritas sebagaimana dipraktikkan di Kanada, apakah hal ini sudah harus dimulai di Indonesia, di mana agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang dianggap

tidak mainstream mestinya diberikan media atau fasilitas agar mereka dapat sama-sama mengakses apa yang menjadi hak-hak mereka? Atau masih diperlukan atau menunggu waktu yang tepat karena masih banyak kecurigaan, di mana minority complex juga masih menggejala, begitupun dalam mayoritas juga belum bisa menerima dan siap untuk melihat kenyataan bahwa agama lain atau paham lain hendaknya dilindungi dan dijamin hak-hak, termasuk di dalamnya hak politik, dan kebebasannya oleh negara. Bagaimana Anda melihat affirmative action untuk konteks Indonesia saat ini?

Fungsi Depag sebagai institusi pemerintah adalah mengupayakan kesempatan dan ruang-ruang konsultatif, bagaimana agar masyarakat memahami keberadaan kelompok-kelompok agama atau kepercayaan ini secara terbuka.

Begini, menurut saya bila kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah berdasarkan kepentingan masyarakat dan realitas kehidupan masyarakat, maka tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu. Persoalannya, semua peraturan yang diproduksi oleh negara lebih berdasarkan pada rasa khawatir, curiga, takut, dan bimbang dalam menyikapi perbedaan. Bukan semata-mata karena memperhitungkan obyektivitas kebutuhan dan realitas

di masyarakat tetapi karena kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa kepentingan politik, bisa kepentingan kelompok agama tertentu, dan lain sebagainya. Akibatnya, peraturan bahkan perundang-undangan yang dibuat sulit diimplementasikan. Kalaupun bisa diimplementasikan belum tentu akan memberi efek positif bagi masyarakat. Contoh paling konkret adalah kasus Ahmadiyah. Mereka hidup dan berkembang di Indonesia sudah beberapa generasi, mengapa baru sekarang diperlakukan secara tidak adil? Tentu mereka juga memiliki kelemahan, tetapi apakah harus mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi semacam yang terjadi di Jawa Barat dan di Nusa Tenggara Barat? Lebih menyedihkan lagi, karena sampai saat ini sama sekali tidak ada usaha penyelesaian yang serius dari negara terhadap persoalan-persoalan seperti ini.

Misalnya saja, soal kebebasan beragama yang menurut UU sudah dijamin seluas-luasnya tapi ternyata di lapangan tidak terjadi. Menurut saya, *affirmative action* itu tidak apa-apa, lakukan saja. Tunggu sampai kapan lagi? Jangan sampai kita menunggu sesuatu yang tidak akan pernah berubah, sementara dinamika pluralitas masyarakat semakin konkret dialami dan berkembang. Apakah perlu menunggu perubahan di Departemen Agama? Bagi saya, justru orang-orang di Departemen Agama sebagai para pengambil keputusan dalam persoalan-persoalan ini masih tertutup, mempunyai pikiran dan pengalaman sempit tentang pluralisme. Mungkin, untuk tingkat pemerintahan, mulai dari mereka inilah yang hendaknya bisa berubah. Mereka harus memulai hidup baru dengan pikiran baru, sikap dan tindakan yang baru, yang relevan dengan kehidupan konkret masyarakat Indonesia. Bisa lewat pendidikan agama kalau hal itu masih bisa diandalkan dan dianggap lebih efektif, yakni pendidikan agama di sekolah-sekolah, atau mungkin dengan cara lain yang bisa jadi jauh lebih efektif.

Masalahnya, kita juga masih terhalang dengan problem institusi agama yang cenderung tertutup. Dalam banyak hal, institusi agama menjadi salah satu faktor yang menghambat juga. Antara negara dan institusi agama terkadang sama-sama mengambil jalan dan cara-cara yang “bodoh”. Padahal, secara ideal dalam konsepnya, baik agama maupun negara, sangatlah baik dan mendorong pada keadilan dan pluralisme. Saya kira belakangan ini ada beberapa kemajuan telah dicapai, tetapi masih banyak yang harus kita benahi.

Saya pikir sudah saatnya sekarang kita terbuka dengan semakin berkembang-biaknya kelompok-kelompok keagamaan di Indonesia,

termasuk agama-agama suku atau kepercayaan lokal. Kita tidak perlu takut bila mereka hidup dan berkembang di Indonesia. Tidak perlu menghalangi. Yang perlu dilakukan adalah, bagaimana pendidikan pluralisme mulai digagas dan digiatkan secara konkret kepada seluruh masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Bagaimana masyarakat bahkan terutama orang-orang di pemerintahan, dalam segala level dan bidang, dididik untuk menghargai perbedaan sehingga tidak takut lagi pada perbedaan, dengan menganggapnya sebagai persoalan sensitif.

Penting juga bagaimana masyarakat dididik untuk dapat melihat potensi pluralitas masyarakat sebagai potensi bersama dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis. Karena, justru dalam konteks ini, sumbangan kemajemukan agama-agama di Indonesia kepada masyarakat dan bangsa Indonesia akan sangat bermakna. Karena semakin dihalangi, semakin tidak berani untuk membuka diri, apalagi didukung dengan tidak tersedianya pendidikan pluralis seperti yang disebutkan di atas. Sehingga bisa dibayangkan bahwa masyarakat Indonesia tidak akan pernah maju, melainkan akan terus berkonflik dari generasi ke generasi, karena berbagai aturan yang konyol itu. Terlebih lagi, lembaga-lembaga keagamaan melakukan hal yang hampir serupa, tidak membuka peluang bagaimana umat masing-masing agama dimampukan untuk terbuka dalam hidup bersama dengan masyarakat yang latar belakang agamanya berbeda. Apalagi implementasi konstitusi juga tidak jalan. Jika demikian, maka kita sama sekali tidak bisa berharap apa-apa, kecuali harus tetap berusaha mengkritisi seluruh produk peraturan, perundang-undangan, kebijakan, serta segenap tindakan yang menghalangi terjadinya proses interaksi terbuka masyarakat pluralis di Indonesia. Kita perlu semakin giat melakukan aksi bersama untuk kepentingan bersama, juga melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan alternatif yang terarah pada pembangunan masyarakat pluralis Indonesia yang merdeka, bebas dan demokratis.

Percakapan dengan

F. Budi Hardiman



F. Budi Hardiman, pengajar di STF Driyarkara dan Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Ia memperoleh gelar Magister Atrium dan Doktor der Philoshopie dari Hochschule für Philosophie, München, Jerman.

Pemisahan antara agama dan politik dalam sekularisasi berkait erat dengan pemisahan antara ruang privat dan publik dalam liberalisme, yang menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antar-manusia, dan pluralisme. Dalam konteks pluralisme, liberalisme dikaitkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menganut bentuk-bentuk kehidupan tertentu. Liberalisme pun menegaskan: setiap pengambilan kebijakan publik harus dipisahkan antara problem-problem yang menyangkut publik secara luas (tanpa membedakan agama, etnisitas, dan orientasi politik) dengan bentuk-bentuk kehidupan spesifik. Itulah yang disebut sebagai *the problem of justice*. Maka, model ideal yang lebih tepat untuk Indonesia adalah masyarakat demokratis, pluralistik, dan multikultural yang diwadahi oleh budaya Islam yang moderat, liberal, dan toleran.

Sekularisme terlahir dengan sejarah yang berdarah-darah. Namun demikian, di samping ia memberikan jalan untuk terciptanya kemajuan, baik di bidang pengetahuan maupun politik dan hal-hal positif lainnya, di berbagai tempat dan oleh banyak kalangan ia juga ditolak dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah penolakan atau lebih tepatnya kekhawatiran dari kalangan agamawan bahwa pada akhirnya sekularisme hanya akan menimbulkan sikap antiagama. Untuk menjembatani tarik menarik isu seputar sekularisme itu, beberapa kalangan membuat distingsi signifikan antara sekularisme sebagai sebuah ideologi dan sekularisasi sebagai proses. Bagaimana Anda mengomentari hal itu?

Menurut hemat saya, sekularisasi itu berbeda dengan sekularisme. Sekularisme merupakan suatu ideologi yang berkembang sebagai akibat dari sekularisasi. Sebagai suatu proses, yaitu lepasnya simbol-simbol religius dari praktik-praktik dan institusi-institusi politik, sekularisasi mengacu pada sebuah proses sosiologis yang berkaitan dengan modernisasi. Namun sikap eksekif dari sekularisasi menimbulkan suatu anggapan bahwa segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan agama akan langsung dikaitkan dengan absolutisme agama Abad Pertengahan di Eropa. Berbeda dari sekularisasi, sekularisme bukanlah sebuah proses sosiologis, melainkan sebuah ideologi, yaitu suatu bentuk pandangan sempit yang beranggapan bahwa hanya proses-proses dalam kehidupan material yang ada di dunia kita inilah yang riil, sementara dimensi transendental, dimensi-dimensi yang bersifat adi-kodrati dalam hidup manusia dianggap sebagai bukan bagian dari realitas yang bisa diterima. Dalam arti ini, sekularisme dapat mendorong baik kepada tendensi-tendensi yang bersifat ateistik maupun yang bersifat deistik. Keduanya, baik ateisme maupun deisme, memusatkan diri pada kehidupan material di dunia ini – entah dengan cara menolak adanya dunia transendental, dalam kasus ateisme; ataupun menganggap bahwa dimensi transendental, dalam hal ini adalah Tuhan, tidak berperan langsung di dalam sejarah sebagaimana dimengerti oleh deisme. Pengertian inilah yang berkembang dalam sejarah Eropa sejak abad ke-18, baik di Inggris (deisme) maupun Prancis (ateisme dan materialisme).

Kata sekularisme itu sendiri adalah 'tipe ideal' (dalam pengertian Max Weber) untuk suatu bentuk pemikiran. Saya katakan tipe ideal karena kita, dalam konteks itu, mencoba mengidealkan suatu sikap. Meski demi-

kian kita tidak bisa mengatakan bahwa bentuk ideal itu akan dipraktikkan secara sama di berbagai negara. Lebih daripada itu, dalam kenyataannya tidak ada seorang manusiapun yang sangat sekularistis. Kalau bisa ditemukan orang yang seperti itu, maka dia adalah orang yang berpandangan sangat sempit sedemikian rupa sehingga hanya mengakui keberadaan atau eksistensi dunia ini seraya menolak dimensi transendental. Adakah orang seperti itu? Kita tak tahu isi hati orang. Andaikan orang seperti itu ada, tentulah dia begitu tidak peduli dengan ‘hati’-nya sebab ‘hati’ ini berciri transendental. Jadi, kita tidak dapat memastikan soal ini dari luar. Jika kita bicara tentang sekularisme, acuan kita bukan pada pengumpulan eksistensial itu, melainkan pada politik. Kita harus membatasi percakapan kita pada politik, yakni kehidupan bersama di dalam Negara.

Bentuk konkret dari institusi sekularisme adalah pemisahan sama sekali, bahkan penyingkiran, dimensi religius dari kehidupan sehari-hari sedemikian rupa sehingga ada sikap permusuhan dengan agama atau segala yang berbau religius. Praktik seperti pelarangan pemakaian jilbab di Prancis, negara yang sejak awal masa Pencerahan abad ke-18

Sekularisme merupakan suatu ideologi yang berkembang sebagai akibat dari sekularisasi. Sebagai suatu proses, yaitu lepasnya simbol-simbol religius dari praktik-praktik dan institusi-institusi politik, sekularisasi mengacu pada sebuah proses sosiologis yang berkaitan dengan modernisasi.

dikenal memiliki tendensi ateistik dan materialistis yang cukup kuat dalam proses sekularisasinya, adalah wujud dari politik sekularistis dan bukan sekedar sekular.

Pembedaan antara ruang publik dan ruang privat dalam sekularisme apakah sama atau tidak dengan pembedaan antara the problem of justice sebagai wilayah negara an sich dan the problem of good life sebagai wilayah individu atau agama. Apakah keduanya tidak boleh saling campur tangan, sehingga harus selalu dipisahkan?

Pertama-tama kita harus membedakan antara sekularisme dan liberalisme juga pluralisme, meskipun ketiga hal tersebut saling berkorelasi

satu sama lain. Dalam sejarah perkembangannya, kalau kita bisa petakan, yang disebut liberalisme itu setua zaman modern atau modernisasi itu sendiri. Liberalisme adalah ideologi modern *par-excellence*. Gagasan ini memiliki bermacam-macam sikap dalam ekspresinya. Prinsipnya adalah menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antarmanusia, dan pluralisme. Dalam konteks pluralisme itu, liberalisme dikaitkan juga dengan kebebasan dalam berekspresi dan kebebasan untuk menganut bentuk-bentuk kehidupan (*form of life*) tertentu. Oleh karena itu, yang sentral dalam liberalisme adalah pemisahan antara ruang publik dan ruang privat.

Mengapa demikian? Karena berabad-abad totalitarianisme agama di Abad Pertengahan Eropa telah dilihat sebagai tidak adanya pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Otoritas politis, pada masa itu, menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk mengarahkan sikap-sikap individual dalam nilai-nilai yang sangat personal, seperti agama, etika dan sebagainya. Akibatnya kekuasaan negara menjadi berlebihan. Ditambah lagi Eropa di awal jaman modern telah mengalami perang agama antara Katolik dan Protestan selama tiga dasawarsa. Salah satu hikmah dari perang agama yang kemudian ditarik oleh liberalisme adalah asas netralitas politik dari pandangan-pandangan hidup spesifik keagamaan. Di dalam perang agama ada klaim-klaim kemutlakan dari masing-masing agama yang saling berbenturan dan ingin memaksakan kalim-klaim itu kepada penganut agama lain. Hal itu menurut liberalisme hanya bisa diatasi dengan pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Pemisahan kedua hal itu sendiri, berbeda dengan pemisahan antara agama dan politik dalam sekularisasi, meskipun keduanya saling berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, liberalisme mengandaikan sekularisasi karena masyarakat dan negara dipisahkan seperti juga negara dan agama.

Yang disebut *the problem of justice* dan *the problem of good life* itu berasal dari diskursus etika politik abad ke-20 antara golongan liberalisme dan komunitarianisme, sebagaimana terjadi antara Michael Sandel, Alasdair McIntyre dan Charles Taylor di satu pihak dan John Rawls di lain pihak. Buku Sandel *Liberalism and the Limit of Justice* dan buku Rawls *A Theory of Justice* sangat sentral dalam diskusi itu. Diskusi itu sendiri, sejatinya, lebih matang dan progresif daripada liberalisme klasik. Duduk perkaranya

adalah bagaimana kita, dalam masyarakat modern yang sangat kompleks, dengan macam-macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai di dalamnya, tetap bisa memiliki kehidupan bersama secara politis yang damai dan saling mengerti satu sama lain. Kaum komunitarian mengedepankan kembali peranan nilai-nilai yang berakar pada komunitas konkret dan menolak konsep abstrak liberalisme tentang individu. Kontroversi ini di Jerman direspons oleh Jürgen Habermas yang mencoba mencari 'jalan tengah' lewat teori diskursus negara hukum demokratis dalam bukunya yang berjudul *Faktizität und Geltung* (terjemahan Inggris *Between Fact and Norm*).

Liberalisme abad ke-20 mencapai suatu sikap bahwa dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik harus dipisahkan antara problem-problem yang menyangkut publik secara luas tanpa membedakan agama, etnisitas atau orientasi politis dan problem-problem yang menyangkut bentuk-bentuk kehidupan spesifik. Yang pertama itu kurang lebih berciri kosmopolitan dan bersangkutan dengan hukum dan keadilan. Itulah yang disebut sebagai *the problem of justice*.

Cirinya adalah abstrak, tidak terkait langsung pada bentuk-bentuk kehidupan komunitas seperti agama, suku, dan organisasi dengan basis nilai-nilai tertentu. Yang menjadi sentral di sini adalah paham hak asasi manusia (HAM).

Sementara itu yang disebut *the problem of good life* adalah segala macam bentuk persoalan yang terkait dengan gambaran-gambaran dunia spesifik atau jalan hidup spesifik, misalnya tentang keselamatan hidup (apakah

Kata sekularisme itu sendiri adalah 'tipe ideal' (dalam pengertian Max Weber) untuk suatu bentuk pemikiran. Saya katakan tipe ideal karena kita, dalam konteks itu, mencoba mengidealkan suatu sikap. Meski demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa bentuk ideal itu akan dipraktikkan secara sama di berbagai negara. Lebih daripada itu, dalam kenyataannya tidak ada seorang manusiapun yang sangat sekularistik. Kalau bisa ditemukan orang yang seperti itu, maka dia adalah orang yang berpandangan sangat sempit sedemikian rupa sehingga hanya mengakui keberadaan atau eksistensi dunia ini seraya menolak dimensi transendental.

eksistensiku di dunia ini akan selamat atau tidak), tentang kebahagiaan, tentang karakter, dan keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan gaya hidup yang sangat khusus di dalam sebuah masyarakat. Problem ini berciri partikularistik, berkait dengan komunitas-komunitas tertentu entah agama, etnik, maupun organisasi-organisasi dengan basis nilai tertentu. Kelompok-kelompok yang beragam dalam masyarakat lebih sulit mencapai saling pengertian mengenai *good life* ini daripada mengenai *justice*. Karena itu negara liberal secara normatif membatasi dirinya pada *the problem of justice*. Kelompok-kelompok dari berbagai orientasi nilai religius, etnis, politis dan seterusnya. mesti sepakat tentang infrastruktur dan manajemen politik yang dapat mewujudkan keadilan sebagai *fairness* dalam masyarakat majemuk itu. Namun mereka tidak perlu mencari kesepakatan mengenai jalan keselamatan yang secara spesifik ditawarkan secara berbeda-beda oleh agama yang berbeda-beda. Kita bahkan boleh membayangkan penerimaan semacam pasar bebas penyebaran agama sebagai konsekuensi sikap liberal, sejauh misi pentobatan itu menjauhkan diri dari paksaan, manipulasi dan kekerasan. Negara bertindak hanya jika ada kebebasan individu atau kelompok yang dilukai atau jika ada masalah keadilan.

Sekarang marilah kita lihat masyarakat kita yang sangat majemuk. Di situ ada begitu banyak gaya hidup dan orientasi nilai. Sebut saja orang-orang kebatinan, komunitas Muslim, komunitas Kristiani dengan berbagai macam aliran dan praktik di dalamnya, yang masing-masing mempunyai cara berpikir spesifik, dan kelompok berambut *punk* yang juga ada di beberapa tempat. Belum lagi ada suku-suku yang masing-masing mempunyai bayangan-bayangan spesifik tentang bagaimana menjadi bahagia sebagai anggota kelompok-kelompok itu. Kaum kaya dan kaum miskin juga menambah cara kategorisasi sosial itu. Masing-masing memiliki orientasi nilainya yang berkembang lewat ruang dan waktu. Pemuda *punk* mungkin saja merasa berbahagia dengan perlawanannya terhadap kultur mapan. Para penjaga tradisi melihat kebahagiaan dalam pemeliharaan nilai-nilai kultural mereka. Belum lagi yang terkait iman religius, seperti ajaran-ajaran tentang keselamatan final dan kebenaran iman. Semua itu memiliki implikasi praktis dalam organisasi, visi, cara bertindak dan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok lain. Banyak kontradiksi nilai dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat kita, dan nilai-nilai yang dianggap benar oleh satu kelompok tidak dapat diuniversalkan begitu saja untuk

kelompok-kelompok lain, sehingga nilai-nilai itu tetap partikular. Itulah contoh aspek yang disebut *the problem of good life*.

Tentang kemajemukan ini liberalisme menempatkannya pada ruang otonom yang tidak dicampuri oleh negara. Salah satu kalimat termasyhur berasal dari seorang filosof Pencerahan Jerman di abad ke-18, Immanuel Kant, yang dalam posisi ini dikenal sebagai perintis liberalisme. Dia mengatakan bahwa tak seorang pun boleh memaksaku untuk menjadi bahagia. Menurutnyalah kebahagiaan adalah masalah personal dan privat. Kant mengatakan ini dalam kaitan dengan negara. Baginya, otoritas politis tidak berwenang untuk menentukan jalan hidup warganya agar menjadi bahagia. Negara juga tidak berwenang atas keputusan eksistensial individu atas keselamatannya, maka orientasi-orientasi nilai partikular seperti agama atau etnisitas berada di bawah wewenang kelompok-kelompok partikular itu.

Suatu otoritas politis seperti pemerintah negara yang merasa berhak untuk menentukan jalan hidup, kebahagiaan atau keselamatan final para warganya telah mengaburkan batas antara 'membahagiakan' dan 'menindas'. Misi untuk menyelamatkan jiwa dari api neraka yang dilakukan oleh negara macam itu pastilah dialami oleh para individu sebagai teror. Karena itu perpaduan antara agama dan politik di tangan satu otoritas akan mengancam kebebasan sipil warga negara. Doktrin keselamatan suatu agama, jika dipakai sebagai doktrin resmi negara, akan berubah menjadi ideologi keji yang menindas agama-agama lain.

Liberalisme adalah strategi untuk menghadapi suatu problem, yaitu absolutisme dan totalitarianisme agama.

Apakah distingsi semacam itu tidak akan condong pada suatu sikap pemisahan absolut, sehingga akan menjurus kepada ketidakadilan tertentu. Misalnya, terhadap kalangan pemeluk agama tertentu yang merasa harus menerapkan nilai-nilai yang diyakininya ke dalam aturan legal-formal?

Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa distingsi-distingsi itu harus kita terapkan dalam ranah yang berbeda-beda. Kalau berbicara tentang distingsi antara negara dan masyarakat, atau ruang publik dan ruang privat,

kita sedang berbicara secara institusional dan struktural, yakni tentang bagaimana masyarakat liberal menata dirinya. Sedangkan kalau berbicara tentang *the problem of justice* dan *the problem of good life* berarti kita sedang berbicara mengenai macam-macam tema persoalan dan bentuk kebijakan dalam demokrasi. Kita alokasikan di mana problem itu sehingga tidak tercampur satu sama lain, lebih dari kerangka metodologi dan epistemologi. Bila suatu konsensus atas norma publik tertentu merupakan ungkapan kepentingan kelompok tertentu dan tidak mencerminkan kepentingan umum, kita sebut itu sebagai *the problem of good life*, namun bila suatu diskusi melibatkan persoalan yang menyangkut kepentingan kemanusiaan, kita sebut itu *the problem of justice*.

Persoalan yang tadi Anda ajukan adalah apakah distingsi semacam itu tidak akan condong pada suatu sikap absolut pemisahan, sehingga akan menjurus kepada ketidakadilan tertentu juga. Itu benar. Namun, liberalisme itu sendiri terus berkembang. Kita bisa melihat bahwa dewasa ini, dari akhir abad ke-20, praktik masyarakat-masyarakat liberal tidak sungguh-sungguh liberal seperti dalam teorinya. Hampir setiap kelompok dalam masyarakat liberal mengklaim diri liberal, meski sebetulnya juga neo-konservatif. Bisa dikatakan bahwa ideologi liberalisme dewasa ini telah mengalami kemerosotan karena variasi-variasi dalam pelaksanaannya. Ide tentang pasar bebas dan sebagainya juga tidak secara murni diterapkan di berbagai negara. Begitu juga soal pemisahan ruang publik dan ruang privat. Sebab banyak kaum liberal sendiri yang justru menentanginya. Kaum feminis, misalnya, sangat tidak nyaman dengan pemisahan itu, karena justru begitu banyak proteksi ketidakadilan atas nama pemisahan itu.

Ada satu diskusi di Amerika dan Eropa tentang asas netralitas yang sangat sentral dalam proses legislasi dalam sistem hukum liberal. Asas itu mengatakan bahwa negara harus bersikap netral terhadap masalah *good life* tadi dan tidak mengintervensi apa-apa yang berada di ranah privat. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga lalu diproteksi dengan suatu alasan bahwa masalah itu adalah masalah privat yang tidak bisa dimasukkan ke dalam diskusi publik, tentu kaum feminis akan sangat berkeberatan.

Lantas, apa makna netralitas itu? Dalam diskusi itu beberapa pihak, seperti Habermas di Jerman, sampai pada kesimpulan bahwa asas netralitas tidak bisa dipahami secara mutlak. Artinya isu-isu di dalam ruang privat juga boleh ditampilkan ke ruang publik sejauh relevan sebagai masalah

publik. Lebih dari itu, karena isu-isu dalam ruang privat terkadang juga bersentuhan dengan masalah keadilan. Tegasnya, isu privat tidak bisa langsung diblokir untuk tidak boleh dibicarakan sebagai diskusi publik. Blokade semacam itu hanyalah alasan untuk melakukan represi terhadap problem-problem yang sebenarnya bisa masuk ke dalam ruang publik. Tetapi, hasil dari diskusi itu, meskipun ada inklusivitas dan *fairness* serta keterbukaan dalam masalah privat yang bisa diangkat ke ruang publik, tidak semua masalah dalam ruang privat bisa mendapat kualifikasi publik. Masalah itu harus terlebih dahulu diuji secara publik, apakah benar-benar bisa masuk ke masalah publik, atau tetap hanya menjadi masalah privat. Misalnya, seorang anak dilecehkan secara seksual oleh bapaknya, atau seorang istri diperkosa di dalam rumah tangganya. Masalah-masalah seperti ini sangatlah subtil. Apakah ini persoalan keadilan atau masalah privat? Determinasi itu haruslah diperiksa di bawah sorotan publik juga. Artinya, dalam diskusi publiklah kekerasan dalam rumah tangga dapat ditentukan sebagai persoalan privat atau publik. Itu tak boleh diblokade oleh aturan hukum begitu saja. Tema tidak boleh dibatasi dengan asas netralitas itu, namun prosedur diskusi publik sedapat mungkin harus tetap netral dari intervensi pemerintah dan kepentingan pasar.

Itu satu hal. Lain hal dengan yang Anda tanyakan. Agama, dalam berbagai ekspresinya, memang boleh berperan di dalam partisipasi demokratis. Kendatipun begitu, yang harus dipastikan sebelumnya adalah mana yang memang menjadi problem privat dan mana yang bisa masuk sebagai problem publik, seperti dalam bidang pendidikan yang cukup dilematis dalam menentukan garis batas privat-publiknya. Pendidikan bersifat publik, karena pendidikan membuka aksesnya kepada publik dan publik bisa secara luas berpartisipasi di dalamnya. Dan mengapa disebut privat? Karena diselenggarakan oleh masyarakat dengan orientasi nilainya masing-masing.

Liberalisme adalah ideologi modern *par-excellence*. Gagasan ini memiliki bermacam-macam sikap dalam ekspresinya. Prinsipnya adalah menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antar-manusia, dan pluralisme.

Lalu kalau itu diselenggarakan oleh lembaga agama dengan ekspresi keagamaannya yang sangat spesifik, bolehkah lembaga pendidikan ini ikut serta di dalam kebijakan publik pendidikan? Dalam politik sekular jawabannya adalah boleh, sejauh tidak membawa alasan religius ke dalam pengambilan keputusan publik. Misalnya, separasi antara pria dan wanita di dalam sekolah-sekolah dengan alasan norma religius yang melarang persentuhan di antara kedua jender. Masalah seperti itu seharusnya bisa dinalar tidak semata dari sudut teologi moral yang sangat spesifik dalam agama itu, melainkan juga dari sudut hak-hak asasi manusia universal. Dalam terang hak-hak asasi manusia itulah persoalan itu dapat dibahas pada level publik, sementara kebandelan untuk bertahan pada perspektif religius sektarian justru membuat persoalan itu tetap berciri partikular. Ternyata di hadapan norma universal hak-hak asasi manusia, alasan-alasan teologis moral spesifik yang mendasari pengaturan sosial-religius-pedagogis itu tampak sebagai problem ketidaksetaraan jender. Ini merupakan *the problem of justice*, maka menjadi minat publik. Memblokade kebijakan separasi itu sebagai persoalan privat kelompok religius tentulah semacam legitimasi bagi ketidakadilan jender. Publik yang lebih luas daripada komunitas eksklusif yang mengklaim privasi itu berkepentingan untuk mempersoalkan ketidaksetaraan jender. Sebab itu, pemisahan publik dan privat tidak bisa mutlak.

Sebaliknya, alasan-alasan religius kadang juga mengandung nilai-nilai universal. Misalnya, pandangan-pandangan tentang kemanusiaan universal dan solidaritas moral umat manusia yang berciri inklusif dan kosmopolitan tentulah merupakan impuls positif bagi pluralisme yang terkandung dalam setiap agama. Di samping ciri eksklusifnya dalam mengklaim solusi keselamatan final, agama-agama juga memiliki ciri inklusif dalam pandangan humanisnya dan keadilan sosial bagi semua manusia. Bagaimanapun modernitas dengan humanisme universalnya turut membebaskan potensi agama-agama untuk melihat manusia lebih luas daripada sesempit umat mereka saja. Vitalitas potensi ini merupakan kontribusi bagi toleransi.

Kembali pada pertanyaan Anda. Sebenarnya pemisahan itu tidaklah *rigid*. Itu hanya cara bicara dan cara memandang yang kemudian masuk ke dalam praktik-praktik hukum, yang masih fleksibel terhadap diskusi terus-menerus.

Ada kekhawatiran yang sangat akut bahwa kalau agama juga ikut terlibat ke dalam wilayah publik, dengan memaksakan nilai-nilainya menjadi aturan publik, yang akan terjadi adalah tindakan eksklusi terhadap agama dan keyakinan yang lain. Tetapi hal itu dibantah dengan contoh lain, bahwa gereja, sebagai simbol agama, seperti di Filipina atau di Amerika justru membantu mendiseminasikan wacana liberalisme. Makanya kemudian ada konsep deprivatisasi. Agama tidak lagi hanya menjadi urusan individu yang selalu berada di ruang privat, melainkan bisa menampakkan wajah publiknya dengan lebih menghargai nilai-nilai liberalisme dan pluralisme. Justru konteks itulah yang paling bisa dipakai untuk saat sekarang. Kita juga mengenal, kendati mungkin masih debatable, ada gagasan pos-sekular. Apakah masyarakat pos-sekular akan membuat wajah baru agama di muka publik menjadi ramah dan toleran; atau seperti apakah masyarakat pos-sekular itu sebenarnya? Dan bagaimana seharusnya wajah publik agama ditampakkan?

Ada sebuah buku baru yang ditulis oleh Peter Sloterdijk yang berjudul *Zeit und Zorn* (Waktu dan Murka). Tesis yang diwawakilinya adalah bahwa masyarakat Barat dibangun atas kemarahan. Filsuf kontemporer ini membuat interpretasi bahwa dari zaman ke zaman isi peradaban Barat adalah revolusi dan kemarahan. Salah satu bentuk kemarahan itu semestinya juga apa yang lalu menjadi

Negara liberal secara normatif membatasi dirinya pada *the problem of justice*. Kelompok-kelompok dari berbagai orientasi nilai religius, etnis, politis dst. mesti sepakat tentang infrastruktur dan manajemen politik yang dapat mewujudkan keadilan sebagai *fairness* dalam masyarakat majemuk itu.

liberalisme itu. Maksud saya liberalisme adalah suatu strategi untuk mengatasi suatu ekkses atau trauma yang ada di masa lalu dalam totalitarianisme agama. Untuk menghilangkan totalitarianisme agama, masyarakat Barat bertindak ekksesif dengan membuat pemisahan yang absolut (liberalisme). Namun dari situ, mereka juga menemukan kebijaksanaan dan sikap-sikap yang bisa mereka pakai untuk menghadapi pluralitas seperti yang ada sekarang. Liberalisme adalah strategi untuk menghadapi suatu problem, yaitu absolutisme dan totalitarianisme agama. Dalam arti ini, jalan sejarah Barat cukup khas. Namun jika menilik bahwa

modernitas di Timur juga berbenturan dengan feodalisme, proses emansipasi untuk menjadi liberal ternyata universal, meski tak harus lewat revolusi seperti di Barat.

Kalau melihat suatu persoalan, kita tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan liberal seolah-olah suatu tongkat ajaib yang dapat menyelesaikannya dengan seketika. Maka menjawab persoalan agama yang hendak ikut serta dalam kebijakan publik pun kita tidak bisa menjawabnya secara hitam putih. Memang peran agama dalam pengambilan keputusan publik tidak pasti mengacaukan. Akan tetapi pastilah mengacaukan jika politik agama itu bersikap picik, tidak dewasa, berkuat dengan perspektif etnosentrisnya, tidak mencoba mentransendensi perspektifnya dengan mengambil alih perspektif kelompok lain, dan bersikeras pada pandangan dunianya yang *immune* terhadap kritik dan masukan dari luar. Bahaya sesungguhnya tidak berasal dari alasan religius itu sendiri, melainkan dari sikap-sikap kaku dan tertutup untuk menolak komunikasi.

Saya membedakan antara para penganut agama pada umumnya dengan para penganut agama yang mengalami kepanikan. Sebut saja orang-orang yang panik ini adalah orang-orang yang tidak tahan melihat kemajemukan dan mencari sistem kepastian yang eksklusif dalam agama mereka. Oleh sebab itu mereka kemudian membentuk suatu pulau sendiri guna mengimmunisasi diri dari luar dan merasa bahwa sudut pandangnya itu adalah yang terbaik dan paling benar. Kalau orang-orang panik ini masuk ke dalam diskusi publik dan ikut campur dalam kebijakan-kebijakan publik bisa berbahaya karena perspektif triumphalistis mereka akan memacetkan dialog.

Fundamentalisme bukanlah sekadar persoalan politis atau ideologis. Ada akar-akar psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang menjadi begitu kaku, sempit dan tertutup dalam keyakinan religiusnya, yakni pencarian kepastian deduktif atas segala persoalan di tengah-tengah kepanikan hatinya berkonfrontasi dengan relativisme nilai dewasa ini. Dalam fanatismenya ia merasa mendapatkan tongkat ajaib untuk menyelesaikan segala persoalan itu. Tentu saja keyakinan semacam itu absurd, sebab dunia di luar kepala sang fanatikus tentulah lebih kompleks dan plural daripada dunia di dalam kepalanya. Kesulitan berdialog dengan mereka disebabkan antara lain oleh mekanisme sistem imun dalam jiwanya

yang sedang panik yang tanpa disadarinya telah beralih menjadi keyakinan berlebihan tentang dogma imannya.

Tetapi orang-orang beragama atau orang-orang beriman tidak semuanya panik seperti itu. Ada yang tenang, *sumeleh*, dan terbuka terhadap bermacam-macam nilai di dalam masyarakat. Bahkan dari agama sendiri ada nilai-nilai universal yang bisa dibangun untuk gerakan seperti yang ada di Filipina. Jadi persoalan sesungguhnya mungkin tidak semata-mata terletak pada agama itu sendiri, tetapi pada proses marginalisasi sosial, ekonomis atau politis. Marginalisasi akan menghasilkan dua sikap, mereka yang panik dan mereka yang, karena kultur dan kedalaman penghayatannya, lebih tenang dan tidak panik. Mereka yang panik, langsung akan merespons dengan fanatisme, merasa bahwa agama menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan. Di sini agama segera berubah menjadi alat kuasa. Yang sakral dalam agama dinodai dengan agresi dan arogansi.

Saya sepakat bahwa cukup banyak gerakan demokrasi di berbagai negara yang dimotori oleh kelompok-kelompok dengan orientasi religius. Karena dalam nilai-nilai agama juga terdapat motivasi untuk bergerak

Liberalisme mengandaikan sekularisasi karena masyarakat dan negara dipisahkan seperti juga negara dan agama.

sebagaimana diperlihatkan oleh Martin Luther King Jr di Amerika Serikat dan Mahatma Gandhi di India. Keduanya membangun *civil courage* dan motivasi untuk berkorban. Menurut hemat saya, semangat dan motivasi semacam itu tidak semata-mata berasal dari liberalisme, melainkan berakar jauh ke dalam spritualitas religius mereka. Liberalisme, jika hanya dimengerti sebagai kebebasan negatif, bahkan bisa menghasilkan krisis motivasi atau *lost of meaning*, seperti banyak diulas dalam teori-teori kritis tentang modernitas. Dalam agama ada sumber tak habis-habis untuk menimba motivasi guna keberanian bertindak dan membangun solidaritas. Jika orang memiliki kedewasaan iman, dari agama manapun orang ini akan memiliki cukup keyakinan diri dan kemantapan untuk menerima perbedaan nilai dalam berbagai agama. Karena itu kedewasaan iman juga memberi kontribusi motivasi yang signifikan untuk formasi keutamaan-keutamaan warga dalam masyarakat demokratis.

Selanjutnya tentang masyarakat pos-sekular. Masyarakat pos-sekular merupakan hasil refleksi dari masyarakat liberal yang sudah matang. Bagi masyarakat pos-sekular, sudah saatnya sekarang, dalam proses demokrasi, juga harus mengikutsertakan warganegara dengan latar belakang religius untuk berpartisipasi, dan tidak begitu saja memblokir alasan-alasan religius yang diberikan. Mereka yang mau datang dalam proses demokratisasi dengan membawa alasan-alasan religius, harus berusaha sedapat mungkin menemukan inti epistemis dari alasan religius itu, yaitu inti yang bisa dimengerti oleh orang-orang dari agama lain supaya bisa dikomunikasikan.

Ambil contoh ini: Suatu kelompok religius yang menerima bunuh diri sebagai tindakan religius yang sakral, tentulah sulit dimengerti oleh kelompok-kelompok lain, sampai kelompok ini memberikan 'alasan rasional' yang ada di balik doktrin tentang bunuh diri itu. Tentu pada akhirnya kelompok pro-bunuh diri ini harus melegitimasi posisinya dalam wawasan rasionalitas hak-hak asasi manusia universal agar dapat diterima secara rasional. Tingkat kesulitan untuk mencapai saling pengertian dalam hal ini tentu sangat tinggi, namun komunikasi rasional itu sendiri sedikit banyak dapat mengubah pandangan-pandangan sempit. Ini contoh ekstrem untuk menjelaskan bahwa dalam diskusi publik kita harus menerjemahkan alasan religius itu menjadi alasan yang lebih rasional. Ada banyak hal lainnya, seperti: praktik korban hewan versus sikap para penyayang hewan, sorban di kepala versus aturan pemakaian helm, dan seterusnya. Era pos-sekular dewasa ini telah membuka ruang diskusi antara pihak-pihak dengan latar belakang religius dan pihak-pihak dengan latar belakang sekular di atas *platform* yang sama, yaitu demokrasi dan pluralisme.

Tetapi bagaimana dengan konteks Indonesia? Seringkali orang mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara agama, sekaligus juga bukan negara sekular. Padahal kalau kita lihat beberapa elemen dasar negara, jelas bahwa negara kita dibangun atas dasar nilai-nilai yang sekular. Itu terbukti dengan kemenangan kelompok nasionalis pada pemilu pertama negara kita. Anda sendiri melihat negara ini seperti apa?

Kita adalah negara yang masih berada dalam formasi. Kita belum menemukan bentuk yang bisa diartikulasikan secara teoretis-epistemologis-

metodologis tentang negara macam apa yang sedang kita jalani ini. Kalau mengatakan bukan negara agama dan bukan negara sekular itu hanya “teologi negatif” untuk menentukan suatu identitas. Kalau bukan negara kapitalis, bukan sosialis, bukan negara agama dan negara sekular, kita akan ditagih untuk menjawab pertanyaan: lalu negara apa? Kalau disebut negara Pancasila, negara pancasila itu sendiri negara apa? Kita harus menjelaskan modelnya. Persisnya, model inilah yang belum terbentuk di negara ini. Model ini masih dalam eksperimen di dalam proses demokratisasi. Kita sedang ditantang untuk menemukan kesepakatan inklusif tentang model yang dapat mawadahi kemajemukan nilai dalam masyarakat kita. Untuk itu memang dibutuhkan tidak hanya kreativitas, melainkan juga kematangan.

Saya justru melihat bahwa proses pembentukannya dimulai dengan gerakan reformasi. Sebelumnya, yang lebih bertindak dalam eksperimen kita adalah sistem politik. Sekarang masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan modelnya. Publik “dari bawah” harus ikut serta membentuk model itu. Kalau kita lihat ke belakang, maka, agaknya, nasib menjadi Indonesia itu terkait dengan multikulturalisme dan pluralisme. Kalau mau membuat modelnya, kita tidak bisa lepas dari pluralisme dan multikulturalisme. Apakah multikulturalisme dan pluralisme ini lebih mempunyai nada dasar

atau tekanan komunitarian atau liberal, hal itu bisa berjalan hilir-mudik dalam zamannya. Kalau melihat negara-negara Asia, tampaknya, tekanan komunitarian akan sangat kuat. Yang saya maksud adalah meskipun masyarakat kita ini majemuk, pluralistik, dan multikultural, kita tetap ingin memberi sedikit banyak sisi substantif tentang keindonesiaan. Suatu

Dalam liberalisme, kebebasan itu dipahami dalam kerangka hukum: tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam liberalisme, orang yang melanggar hak orang lain bisa dikenakan sanksi. Hal seperti itu tampak dalam praksis kebebasan masyarakat liberal sendiri. Bila Anda berkunjung ke masyarakat liberal, Anda tidak akan menemukan anarki. Yang akan Anda temukan adalah tatanan liberal yang sangat hormat terhadap hukum. Kebebasan dalam masyarakat liberal distabilisasikan oleh *system of rights*.

komunitas politis selalu ingin mempunyai kesatuan, warna yang sama. Pancasila tentu merupakan titik-tolak yang visioner untuk menata pluralitas kultural masyarakat kita, artinya lebih komunitarian. Kutub ini akan selalu mempunyai lawannya, yaitu yang liberal. Jika kita mengambil jalan liberal, suatu gagasan induk seperti Pancasila tidak boleh dipahami secara substantivistis sebagai semacam *doctrina domus* (ajaran rumah), melainkan hanya secara kategorial sebagai ruang-ruang interpretasi bebas tanpa sabuk nilai-nilai komunitarian.

Mungkin model yang lebih tepat untuk Indonesia adalah masyarakat yang demokratis, pluralistik, multikultural yang diwadahi oleh budaya Islam yang moderat, liberal dan toleran. Kita tidak bisa lepas dari horison Islam sebagai agama mayoritas. Pluralitas yang lepas sama sekali dari budaya mayoritasnya itu hampir tidak mungkin. Yang perlu ditegaskan adalah bahwa rumusan atau model seperti itu mengandung suatu konsekuensi bahwa Islam yang menjadi horison Indonesia haruslah Islam yang toleran dan moderat. Katakanlah 'Islam kultural' dan bukan Islamisme atau Islam ideologis. Islam sebagai horizon kultural tentulah berbeda dari Islam sebagai bentuk politis. Pemisahan antara agama dan negara itu tak bisa ditawarkan, maka Islam kultural yang menjadi horizon itu memberi kontribusi motivasi utama dalam keutamaan-keutamaan publik dalam demokrasi pluralistis. Agama harus menghormati otonomi negara, seperti juga negara harus menghormati otonomi agama.

Bahkan negara liberal Barat pun tetap memiliki nada dasar Kristiani-kultural, kendati lebih pada multikulturalisme dan netralitas kulturalnya. Masalah dalam negeri kita akan muncul kalau Islam-nya menjadi *rigid*. Corak Islamisme macam itu justru akan berbahaya bagi koeksistensi damai dalam kemajemukan. Jika negara menerapkan kebijakan-kebijakan islamistis tanpa mendengar aspirasi minoritas, akan terjadi atomisasi, isolasi, bahkan bisa menjadi *apartheid* dan bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional. Nasib menjadi Indonesia adalah menjadi demokrasi pluralistik. Nada dasarnya mau bersifat komunitarian atau liberal, tergantung kekuatan politik yang masuk dan menguasai. Kalau mau komunitarian, nada dasar Islam toleran dan moderat harus ada di dalamnya dan kalau mau liberal, mungkin tendensi modernis Barat yang akan banyak berperan di sana. Tegangan ini sendiri mengasyikkan, karena darinya pemikiran-pemikiran sosial akan tumbuh di negeri ini.

Kendati Anda sudah banyak menyinggung masalah liberalisme, tetapi kami ingin mendapat klarifikasi tentang anggapan banyak orang yang mengartikan liberal sebagai kebebasan tanpa batas dan terkait dengan ekonomi kapitalis yang hanya memberi ruang kepada yang kuat. Itu tentu saja pandangan-pandangan yang sudah dimasuki oleh nilai-nilai tertentu. Menurut Anda apa dan bagaimana sebenarnya liberalisme?

Ada buku yang menarik dari Rainer Forst, *Kontexte der Gerechtigkeit* (konteks-konteks Keadilan). Di situ dikatakan bahwa secara historis memang liberalisme berjalan bergandengan dengan kapitalisme, karena liberalisme juga sebetulnya muncul sebagai *impuls* dari perkembangan filsafat dan ilmu-ilmu alam. Pandangan dunia mekanistik dalam ilmu-ilmu alam membebaskan manusia dari dikte alam dan dari takhayul. Ini disusul dengan emansipasi lain dalam liberalisme, yakni individu terbebas dari dikte kelompok. Karena itu, liberalisme juga terkait dengan proses ekonomi pasar bebas di mana individu boleh berusaha dan usahanya bisa tanpa batas. Batas usaha individu dalam konteks liberalisme itu hanya ketika berbenturan dengan kepentingan orang lain. Maka kepentingan diri, dalam liberalisme, merupakan suatu hal yang tidak diharamkan.

Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, liberalisme dan kapitalisme jelas menjadi dua hal yang berbeda. Mereka yang

Tentang kemajemukan, liberalisme menempatkannya pada ruang otonom yang tidak dicampuri oleh negara. Salah satu kalimat termasyhur berasal dari seorang filsuf Pencerahan Jerman di abad ke-18, Immanuel Kant, yang dalam posisi ini dikenal sebagai perintis liberalisme. Dia mengatakan bahwa tak seorang pun boleh memaksaku untuk menjadi bahagia. Menurutnya kebahagiaan adalah masalah personal dan privat. Kant mengatakan ini dalam kaitan dengan negara. Baginya, otoritas politis tidak berwenang untuk menentukan jalan hidup warganya agar menjadi bahagia. Negara juga tidak berwenang atas keputusan eksistensial individu atas keselamatannya, maka orientasi-orientasi nilai partikular seperti agama atau etnisitas berada di bawah wewenang kelompok-kelompok partikular itu.

merespons sisi negatif dari liberalisme, lebih mengacu gagasan tersebut pada abad ke-19, masa awal liberalisme. Liberalisme sekarang berkembang lebih jauh. Dalam buku Forst ini jelaslah bahwa liberalisme sebetulnya bukan kebebasan mutlak tanpa batas dari individu, melainkan suatu konsep hukum. Liberalisme bukan hanya sebuah ideologi, melainkan juga suatu *theory of right*. Dalam konsep hukum, seorang individu akan merasa bebas kalau hak-haknya dijamin secara hukum. Individu mempunyai ruang untuk bergerak karena ada jaminan hukumnya. Namun, untuk mendapatkan hak itu, seorang individu terlebih dahulu harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum tertentu. Jadi, konsep hak dan kewajiban itu komplementer dalam liberalisme. Dengan kata lain, dalam liberalisme, kebebasan itu dipahami dalam kerangka hukum: tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam liberalisme, orang yang melanggar hak orang lain bisa dikenakan sanksi. Hal seperti itu tampak dalam praksis kebebasan masyarakat liberal sendiri. Bila Anda berkunjung ke masyarakat liberal, Anda tidak akan menemukan anarki. Yang akan Anda temukan adalah tatanan liberal yang sangat hormat terhadap hukum. Kebebasan dalam masyarakat liberal distabilisasikan oleh *system of rights*.

Jadi kelirulah anggapan bahwa liberalisme adalah kebebasan semutlak-mutlaknya. Pada ide liberalisme awal memang ada ide seperti yang dibayangkan para penentang liberalisme di Indonesia. Misalnya pada Thomas Hobbes dalam *Leviathan*. Bagi Hobbes, kebebasan adalah tidak adanya kendala untuk bertindak. Kebebasan dalam arti ini diartikan oleh Hobbes sebagai hak untuk melakukan apa saja. Konsep hak semacam ini disebut *natural liberty*, tapi jelas bukan *civil liberty*.

Kebebasan alamiah semacam itulah yang tersirat pada anarki, yang mungkin menetap pada pikiran orang yang salah mengerti tentang liberalisme. Padahal, konsep Hobbes tentang hak itu sudah dikritik dan diatasi oleh Hobbes sendiri dengan mengatakan bahwa kita tidak mungkin mempertahankan hak alamiah semacam itu dalam liberalisme. Kita harus beralih menjadi *civil liberty*, kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu terjadi lewat kontrak. Sedangkan kontrak itu sendiri terjadi lewat melepaskan hak-hak natural untuk kemudian tunduk kepada hukum bersama. Hak dan kebebasan sipil itulah yang dianut oleh liberalisme. Masyarakat liberal akan tunduk kepada hukum yang dilegislati bersama.

Terkait dengan netralitas negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak individu, bagaimana negara mengupayakan suatu tatanan yang fair, adil bagi semua kelompok?

Fairness dan netralitas dalam bentuk konkretnya adalah tidak memihak kepada salah satu aliran termasuk yang mayoritas. Asas netralitas tidak menghendaki adanya regulasi publik yang dilakukan atas nama agama tertentu tapi mengikat orang dari agama lain. Itu pengertian pertama. Kedua, sebelum ada proses pengambilan kebijakan publik, sedapat mungkin negara mengikutsertakan berbagai macam bentuk kelompok di dalam masyarakat dengan bermacam-macam orientasi nilainya untuk memberikan kontribusi pandangan, sehingga akhirnya ditemukan suatu titik tengah yang bisa memuaskan semua pihak. Semua itu normatif. Pada faktanya, tidak semua keputusan publik akan mencapai titik tengah seperti itu. Yang bisa dilakukan adalah upaya dan adanya itikad baik untuk mencapai titik tersebut.

Apabila kebijakan publik kita secara terang-terangan memihak kelompok tertentu, dalam

masyarakat plural hal itu akan langsung dilihat sebagai pemihakan. Hal itu justru kontraproduktif. Maka peraturan-peraturan daerah yang berhaluan pada agama tertentu juga bisa kontraproduktif kalau semata-mata untuk memberi isi identitas. Hal itu adalah bentuk dari politik identitas di daerah-daerah dan akan berbahaya bagi negara secara keseluruhan. Regulasi-regulasi daerah semacam itu kontraproduktif karena akan mengundang sentimen masyarakat yang membuat mereka saling mengisolasi diri satu sama lain dengan ongkos raibnya solidaritas nasional. Identitas politis tak seharusnya ditimba dari agama, melainkan seharusnya dari konstitusi republik kita.

Pada level ini negara harus segera bertindak untuk menengahi prosesnya sehingga perda-perda itu lebih berorientasi nasional atau bahkan kosmopolitan. Tetapi suatu masyarakat yang hendak berorientasi nasional

Iman secara spesifik cenderung mengeksklusikan iman lain, jika hal itu berkaitan dengan identitas kolektif.

Namun jika iman menyentuh kedalaman kemanusiaan universal, dari iman itu juga termuat suatu harapan untuk melampaui identitas kolektif yang dikira berasal darinya.

atau kosmopolitan banyak bergantung pada pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kematangan kebudayaan, kontak dengan bermacam-macam elemen baik di dalam maupun di luar negeri, dan tentunya juga politik. Pemerintah harus sensitif dan tegas terhadap tendensi-tendensi politik identitas yang mulai marak di daerah-daerah.

Salah satu usul untuk menciptakan suatu tatanan ideal yang sering Anda kemukakan di beberapa media dan kesempatan adalah melalui public reasoning. Proses itu sendiri meniscayakan semua komponen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyumbangkan pendapatnya. Kalau dalam praktiknya, dalam konteks Indonesia, bagaimana public reasoning itu dapat dijalankan? Melalui negara atau civil society?

Tidak boleh melalui negara, harus melalui *civil society*. Kalau melalui negara, yang kita dapat hanyalah perpanjangan tangan kekuasaan, seperti dalam klompencapir di masa Orde Baru. Itu kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Saya sangat senang dengan radio-radio yang sudah mulai membicarakan tentang kebijakan presiden, menteri-menteri, bupati dan lain sebagainya, dan kemudian ditanggapi oleh pemirsa atau pendengar dengan sangat cerdas dalam memberikan alasan. Forum-forum seminar di kampus dan hotel-hotel, diskusi-diskusi di dalam surat kabar, LSM dan lain-lain juga vitalitasnya sangat menggembirakan di Indonesia. Jangan salah mengira bahwa diskusi-diskusi publik kita dangkal-dangkal saja. Kalau dibandingkan dengan apa yang ada di negara liberal, saya menduga, kedalaman komentar dan kritik dalam pembahasan persoalan, seperti UU pornografi, mungkin pandangan-pandangan yang dikemukakan masyarakat Indonesia lebih dalam, beragam, dan terbuka. Kita kadang-kadang memandang remeh apa yang ada di negeri kita dan mengagumi yang ada di luar. Padahal, ternyata, apa yang berkembang di Indonesia ini sangat menakjubkan.

Satu hal yang belum ada di Indonesia yaitu upaya untuk mendokumentasi, mengartikulasikan, mengingat dan menjadikan suatu peristiwa sebagai momentum yang selalu diingat bersama, lantas membuat suatu studi komprehensif untuk mengetahui arahnya. Sebut saja, seminar, diskusi dan problem besar yang ada di Indonesia, semuanya hampir hanya seperti *performance* atau *reality show* yang muncul sporadis lalu hilang dilupakan oleh zaman. Tidak ada upaya untuk mencari jalan keluar dan secara

komprehensif menyelesaikan masalah-masalah itu, sehingga kalau suatu ketika ditanya, kita tak mempunyai *progress report* yang jelas mengenainya. Di wilayah inilah orang kita sangat kurang memberikan respons. Mungkin karena masyarakat kita terlalu kompleks, atau karena masyarakat kita hanya senang berbicara namun kurang senang mendokumentasi. Masyarakat kita lebih gemar hidup dalam budaya lisan, kurang membiasakan diri dengan budaya tertulis, mendokumentasikan sesuatu, dan mengembangkannya. Akibatnya, begitu banyak peristiwa dan tragedi kolektif yang tidak terselesaikan karena kita tidak pernah mau membuka dan mendokumentasikannya.

Saya baru saja datang dari Hiroshima, kota yang dulu rata oleh bom dan hanya menyisakan satu gereja dan *dome*, yang mungkin karena konstruksinya lebih kuat dibanding bangunan lain. Sekarang Hiroshima menjadi kota modern dan penduduknya menjadi orang-orang yang anti-perang. Saya mengunjungi satu museum di sana yang isinya dokumentasi lengkap dari jumlah korban sampai cerita individual tentang korban yang dapat diakses melalui internet. Misalnya ada

cerita pengalaman seorang korban pengeboman yang berasal dari Jerman yang terdokumentasi secara lengkap. Ada juga cerita korban tentang anak yang pada saat pengeboman kota itu sedang membawa kotak makanan untuk makan siang. Kotak makannya masih ada dan cerita mengenai anak itu, mungkin melalui cerita ibunya atau orang-orang yang melihat dan tetap *survive*, semuanya lengkap terdokumentasi. Hampir semua rombongan pelajar yang berkunjung ke museum ini adalah anak-anak Jepang. Bagaimana mereka belajar dari sejarah sangatlah menakutkan.

Kita juga mempunyai cerita-cerita seperti itu. Kita punya peristiwa G 30 S/PKI, kerusuhan Mei, dan masih banyak lagi, yang sayangnya tidak pernah selesai diungkap. Orang kita perlu berani untuk jujur terhadap

Untuk menghilangkan totalitarianisme agama, masyarakat Barat bertindak eksekutif dengan membuat pemisahan yang absolut (liberalisme). Namun dari situ, mereka juga menemukan kebijaksanaan dan sikap-sikap yang bisa mereka pakai untuk menghadapi pluralitas seperti yang ada sekarang. Liberalisme adalah strategi untuk menghadapi suatu problem, yaitu absolutisme dan totalitarianisme agama.

sejarah, sehingga mampu juga melihat prestasi-prestasi sejarah di samping pengalaman-pengalaman negatif di dalamnya. Sejak reformasi, kita juga mempunyai prestasi-prestasi dalam deliberasi, misalnya kasus tentang RUU-APP (Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi) yang akhirnya direvisi. Artinya, sistem politik kita memperhatikan juga apa yang berkembang di publik. Itu salah satu prestasi deliberasi yang seharusnya juga terdokumentasi secara lengkap. Begitu banyak prestasi deliberasi lain yang harus dianggap sebagai capaian-capaian. Sebut saja kasus-kasus pengadilan HAM yang seharusnya disosialisasikan ke masyarakat. Banyak yang belum terungkap karena kurangnya kedaulatan pengadilan, namun setiap prestasi kecil yang dihasilkan perlu diapresiasi. Untuk terwujudnya semua itu, kita harus mempunyai *knowledge management* yang bagus sehingga sistem pendidikan kita dapat menyerap kejadian itu sebagai pelajaran yang objektif dan mencerahkan. Cerita di bangku-bangku sekolah jangan lagi hanya memuat cerita masa lalu, tetapi juga yang sekarang: prestasi deliberasi kita apa saja, apa yang menjadi demokratis, kebebasan pers bagaimana, dan sebagainya. Tentu semua ini harus berasal dari bawah. Jika tidak demikian, hal itu tak lebih daripada propaganda pemerintah lagi.

Public reasoning merupakan mekanisme yang hanya mengakomodasi wacana yang rasional. Bukankah hal ini sama artinya dengan upaya mengeksklusi atau meminggirkan pandangan-pandangan lainnya yang tidak rasional?

Jika Anda mempunyai seorang teman yang sedang marah. Salah satu sikap yang mungkin Anda lakukan adalah diam. Karena kalau diajak bicara, hasil pembicaraannya juga mungkin tidak akan produktif. Namun yang harus diperhatikan, orang yang marah itu pada dasarnya ingin menyampaikan sesuatu supaya Anda dengar. Cara yang memungkinkan itu, dia harus menenangkan diri terlebih dahulu untuk tidak marah kemudian baru berbicara. Kalau marah terus-menerus dia tidak pernah akan dapat menyampaikan apa yang dia inginkan, lalu kita tidak akan pernah saling mengerti. Jadi langkah yang harus dilakukan dalam kasus itu, *pertama*, Anda harus diam supaya dia tenang. Dan *kedua*, dia juga

harus menenangkan diri supaya bisa berbicara. Pada akhirnya *toh* dia juga bicara.

Kalau perumpamaan itu saya transfer ke dalam kehidupan bersama secara politis, kelompok-kelompok radikal di masyarakat adalah ibarat orang yang sedang marah. Mereka merasa dirugikan dan dimarginalisasikan. Tetapi sebenarnya mereka mau berbicara. Hanya saja, bicara dalam kemarahan adalah kontraproduktif. Oleh karena itu, mereka harus terlebih dahulu menenangkan diri. Harus mencari alasan rasional untuk bisa menyampaikan pesannya. Sebaliknya, kita yang mendengarkan juga harus menenangkan diri, jangan mengajak bicara terus-menerus karena hanya akan menghasilkan hal yang kontraproduktif dan hanya akan menyulut terjadinya perkelahian. Artinya, selama kelompok-kelompok radikal ini emosional dan menggunakan alasan-alasan yang tidak rasional, maka tidak akan pernah bisa memulai pembicaraan, selama itu pula tertundalah komunikasi. Tetapi hal itu merugikan kedua belah pihak. Maka, sekali lagi, dalam konteks hidup bersama secara politis, pihak yang sedang marah, agar gagasannya bisa diterima, harus terlebih dahulu menenangkan diri dan mencari argumen.

Pandangan-pandangan tentang kemanusiaan universal dan solidaritas moral umat manusia yang berciri inklusif dan kosmopolitan tentulah merupakan impuls positif bagi pluralisme yang terkandung dalam setiap agama.

Dalam demokrasi tidak ada jalan lain selain menjadi masyarakat yang rasional. Namun rasionalitas sendiri mempunyai berbagai macam variasinya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam konteks ini adalah rasionalitas publik. Melalui rasionalitas inilah sikap dan tindakan seseorang dapat dimengerti oleh publik. Melalui rasionalitas ini juga tindak kekerasan terhadap yang lain menjadi sesuatu yang terlarang. Kekerasan hanyalah efek dari frustrasi, dan frustrasi terjadi karena defisit rasionalitas. Defisit rasionalitas muncul karena kepanikan yang ada di dalam jiwa seseorang. Sedangkan sikap panik sendiri muncul karena marginalisasi dalam masyarakat.

Jadi terhadap alasan yang tidak rasional, dalam konteks demokrasi, ada dua sikap yang bisa dikedepankan. *Pertama*, menunda komunikasi

sampai lawan menemukan alasan rasional untuk berbicara dengan kita, dan kita sendiri menenangkan diri untuk mencoba mendekati lawan supaya dicapai titik temu yang saling bisa mendekati. Dan kemungkinan *kedua*, selama lawan yang emosional tidak sabar dan tetap melakukan kekerasan, polisi harus turun tangan. Dalam demokrasi, kita membutuhkan polisi yang kuat. Kalau polisi sudah bersikap netral, aktif, dan adil, keamanan akan bisa ditegakkan.

Jadi, mungkinkah dalam konteks Indonesia kesepakatan melalui public reasoning bisa dicapai, kalau pada faktanya Indonesia terfragmentasi sebegitu rupa sehingga sangat sulit menemukan titik temu?

Ini masalah yang sangat pelik. Tetapi, untuk tidak mematahkan harapan, dalam buku Niklas Luhmann *Soziale Systeme* (Sistem-sistem Sosial), ada suatu formula yang sangat penting bahwa sistem merupakan ‘reduksi kompleksitas’. Kalau masyarakat kita begitu kompleks, dan kompleksitas itu tidak direduksi, kita tidak akan pernah lepas dari krisis. Salah satu jalan untuk mereduksi kompleksitas adalah sistem manajerial negara yang bersih, *good governance*, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial masyarakat. Adanya berbagai macam pandangan di dalam masyarakat tidak akan menghabisi negara. Tidak membuat negara menjadi bubar. Mengapa? Mungkin jawabannya karena kita tetap memiliki kepentingan bersama, yaitu ingin fasilitas publik bersama, jalan-jalan umum yang tidak macet, ingin birokrasi negara yang tidak memihak, urusan surat-surat yang bebas korupsi, mengurus tanah mudah dan baik, mengurus izin usaha juga lancar, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara dengan macam-macam orientasi nilai tetap ingin mempunyai satu *platform* bersama hingga bisa saling kita mengerti dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Jangan membayangkan seolah-olah negara modern itu bisa menjadi monolitik seperti komunitas adat, karena bayangan itu juga berbahaya jika menjadi kebijakan politis. Yang perlu dicari adalah tatanan bagi pluralitas.

Apa yang disebut kepentingan bersama ini akan tetap ada. Salah satu kepentingan bersama yang tetap ada adalah bahwa seluruh pihak ingin menjadi masyarakat yang demokratis dan pluralistis. Kalau pemerintahnya

konsisten pada wilayah itu, disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan keadilan distributif yang baik, beragam pandangan pun akan bisa dikoordinasikan dan dimobilisasi untuk sepakat pada negara. Artinya, negara akan menjadi milik bersama. Tetapi kalau itu gagal, kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan negara (pemerintah) akan merasa mempunyai alternatif untuk memberikan solusi. Itulah bagian dari dinamika politik. Bisa saja suatu kelompok menawarkan suatu solusi, meskipun, bisa jadi, nantinya akan dilawan oleh kelompok lain. Namun demikian substratumnya adalah bahwa kita tetap ingin plural, di mana dalam pluralitasnya kita tetap menginginkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dengan keadilan distributif yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tentang perbedaan ideologi dan sebagainya, lama-kelamaan, dalam prosesnya, akan menjadi tidak begitu sentral lagi. Seperti dalam negara maju, perbedaan ideologi sudah tidak menjadi soal hidup dan mati, tetapi hanya menjadi cara berpikir. Masyarakat pada fase itu sudah berada pada tingkat moderasi tertentu. Kita belum mencapai tingkat itu, dan perlulah keyakinan bahwa suatu saat kita juga akan mencapainya.

Pluralisme harus dimengerti sebagai suatu tatanan sekaligus sebagai suatu kondisi kebebasan tertentu.

Dapatkah Anda mengomentari, pertama, perihal masa depan kemajemukan Indonesia yang iklimnya semakin tidak menggembirakan, terutama ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan pluralisme, dengan salah satu alasan bahwa pluralisme dapat berakibat pada sinkretisme, pembauran aneka ragam agama dan keyakinan menjadi satu, sehingga tidak jelas lagi yang mana iman Islam yang murni, yang mana Kristen, Hindu, Budha dan lain sebagainya, sehingga dapat mendangkalkan iman umat; kedua, pluralisme yang juga dinilai negatif karena hanya akan menghasilkan relativisme?

Pemahaman pluralisme seperti itu sangat spesifik MUI. Dan perlu ditekankan di sini juga bahwa MUI adalah suatu lembaga dengan *adresat*-nya umat Islam. Dalam konteks itu, berarti MUI bicara *pro-domo*, untuk rumah, bukan untuk publik, bukan untuk orang-orang dari agama lain. Institusi agama memang biasa seperti itu, karena mempunyai kepentingan

untuk integritas dan memberi identitas pada umatnya. Persoalan di Indonesia menjadi merembes ke mana-mana lantaran Islam menjadi mayoritas dan di kalangan Islam sendiri mungkin belum mempunyai kesepakatan mengenai sekularisasi (apakah agama dan politik itu dipisah atau tidak). Kalau di dalam gereja Katolik dan Protestan perihal sekularisasi sudah disepakati sejak lama. Sehingga kalau pemimpinnya mengatakan: “Lawan *New age!* atau lawan posmodernisme!” hal semacam itu akan ditanggapi sebagai masalah moral dan pembinaan iman, dan bukan masalah politik. Masalah di MUI juga seperti itu, yang lalu dikaitkan dengan politik, kelompok lain, dan sebagainya. Sejauh umat Islam bisa menyikapi bahwa itu adalah fatwa *pro-domo*, tidak masalah. Itu persoalan intern, diskursus dalam Islam di Indonesia. Saya tidak bisa menanggapi perdebatan itu. Tetapi kalau fatwa itu dimaksudkan untuk seluruh masyarakat, saya keberatan, karena pluralisme tidak sama dengan sinkretisme dan relativisme.

Lebih dari itu, sinkretisme bukan sesuatu yang mempunyai konotasi negatif. Dalam tingkat tertentu, agama-agama juga sinkretis. Setiap agama juga berdialog dan menghasilkan pencampuran tertentu dengan kebudayaannya. Meski setiap agama juga mempunyai suatu pretensi untuk murni dari budaya. Itu pretensi. Sementara faktanya setiap agama selalu tercampuri budaya tertentu. Kita bisa mengatakan bahwa mereka yang berpretensi murni sebenarnya hanya berpretensi untuk membentuk kebudayaan sendiri, yaitu kebudayaan puritan. Puritanisme bukan budaya hakiki, melainkan tetap salah satu bentuk kultural.

Karena itu, sulit untuk menerima begitu saja bahwa pluralisme dan sinkretisme secara umum negatif. Tetapi kalau fatwa itu diucapkan *pro-domo*, berarti hanya dimaksudkan untuk memberikan bimbingan spiritual. Kalau ini diterima umatnya, maka *no problem*. Tetapi kalau umatnya sendiri memberikan respon yang bertentangan dengan fatwa, itu tanda bahwa sebenarnya di situ terdapat masalah.

Banyak yang mengatakan bahwa pluralisme, dalam konteks Indonesia yang cukup majemuk ini, adalah suatu keniscayaan. Kira-kira model pluralisme seperti apa yang dalam pandangan Anda lebih santun dan bisa merawat kemajemukan tanpa ada pertikaian dan sebagainya?

Pertanyaan ini berbeda dengan pertanyaan tentang MUI. Sekarang kita berada di luar konteks *pro-domo*. Pembedaan publik dan privat tetap berguna, meskipun jangan terlalu *rigid*. Ketika kita berhadapan dengan konteks pluralisme di Indonesia, dengan kemajemukan agamanya, maka yang harus masuk adalah wacana nasional, bukan wacana agama. Tetapi jika untuk kalangan intern, wacana agama jelas diperbolehkan. Sebut saja kalau sebuah seminar dihadiri oleh orang dari bermacam-macam agama, maka kita tidak bisa berbicara hanya dalam terminologi agama sendiri. Harus ada *platform* bersama yang kita sepakati sebagai bangsa, *demos*, warga negara.

Modelnya seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, sejarah membuktikan bahwa pluralisme dikehendaki sejak awal oleh masyarakat kita. Tadi saya katakan, nada dasarnya bisa kita pilih, entah komunitarian atau liberal – yang dalam hal ini bisa hilir-mudik. Yang saya maksud komunitarian adalah ada warna kultural Islam yang menjadi horison utamanya, dan perlu diingat, Islamnya bukan yang islamisme, melainkan yang

toleran, Islam kultural. Hal itu akan bisa kita terima bersama. Bahkan orang Kristen yang ke luar negeri juga mengatakan bahwa mereka berasal dari masyarakat dengan mayoritas Islam, namun demikian mereka sebagai Kristen merasa mendapatkan ruang untuk berekspresi di Indonesia. Oleh karena itu, orang Kristiani Indonesia merasa berasal dari latar belakang kultur Islam dan tahu bagaimana Islam di Indonesia. Sungguhpun begitu mereka tidak merasa bahwa dengan cara demikian, lantas akan beralih iman menjadi Islam. Mereka adalah seorang Kristen yang memahami kultur Islam di Indonesia.

Tak ada pertentangan logis antara beriman dan menjadi toleran. Justru sebaliknya, toleransi bersumber dari iman yang benar dan seharusnya menjadi bagian identitas agama.

Seringkali militansi dan toleransi dipertentangkan satu sama lain, seolah tidak mungkin menjadi kesatuan: orang yang militan pasti tidak toleran dan sebaliknya orang yang toleran tidak militan. Toleransi militan adalah suatu pandangan bahwa perjuangan untuk mewujudkan toleransi antaragama merupakan bagian dari pengumpulan iman sejati para warganegara yang religius.

Atau, pilihannya kita menjadi liberal sama sekali. Artinya, kita tidak sama sekali berbicara tentang Islam. Ini adalah negara Republik Indonesia yang sekular. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa seperti itu? Tentunya hal ini tergantung kekuatan politik mana yang mau bergerak. Tampaknya kalau melihat dasawarsa-dasawarsa yang lalu, nada dasar komunitarianlah yang lebih diambil, meskipun hal itu tetap menggelisahkan mereka yang mencintai kebebasan individu. Indonesia akan memiliki wajah liberal jika makin banyak individu yang menghargai kebebasan dirinya dan kebebasan orang lain. Selera akan kebebasan ini belum cukup tampak, sementara banyak orang mencari tambatan pada komunitas dan otoritas.

Dalam perkembangan pemikiran, terutama di Barat, ada kecenderungan membenturkan antara pluralisme dengan monisme, yang dalam agama tercermin lewat semangat monoreligius dengan karakter menyingkirkan perbedaan agama dan keyakinan ke dalam paham agama yang tunggal. Demikian pun yang terjadi di negeri ini, di mana banyak kalangan warga yang melihat Indonesia hanya terjebak pada perbedaan-perbedaan besar, Islam-Kristen, Jawa-sunda, dan tidak melihat pada yang lebih mendasar, yaitu perbedaan-perbedaan nilai di masing-masing komunitas yang teramat plural. Bagaimana pandangan Anda tentang itu semua?

Semua itu, pada dasarnya, masalah stereotipifikasi kategori-kategori sosial. Dalam buku Clifford Geertz yang saya baca edisi Jermanya, *Die Welt in Stücken* (aslinya dalam bahasa Inggris. Artinya: Dunia yang Tercabik-cabik), ditunjukkan bahwa apa yang dikatakan Samuel P. Huntington tentang benturan peradaban, yang mana seolah-olah Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konfusianis merupakan kategori-kategori monolitik yang saling dibenturkan. Geertz membuktikan bahwa yang sebenarnya terjadi tidaklah demikian. Peradaban yang dibentuk oleh agama-agama itu dan praktik agama-agama itu sendiri tidaklah monolitik, melainkan sangat pluralistik. Dalam buku tersebut ditunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu contoh di mana begitu banyak kemajemukan yang terbangun dari sejarahnya, yakni formasi lapisan-lapisan nilai yang berasal dari etnisitas, bahasa, agama, birokrasi kolonial, modernitas dan seterusnya. Kalau melihat seperti itu, benturan antara monisme, dan pluralisme di negeri kita, seperti yang Anda katakan itu, merupakan akibat

tidak memahami fakta pluralitas negeri ini. Kita semua yang mendiami kepulauan nusantara ini mau tidak mau harus mengambil sikap pro-pluralisme, jika mau hidup bersama secara damai.

Sekarang persoalannya apakah pluralisme merupakan suatu kondisi yang kemudian hanya kita biarkan. Artinya, kita pasif dan tidak melakukan aksi sama sekali, atau kita mempunyai suatu proyek untuk memobilisasi sedemikian rupa sehingga plu-

 ralisme berada dalam tatanan tertentu yang bisa menjamin keutuhan sebuah masyarakat. Saya cenderung pada yang kedua. Pendapat yang pertama cenderung pada sikap *laissez-faire*, membiarkan pluralisme menjadi liar terpecah-pecah dan tidak saling mengerti satu sama lain. Dari sini akan terbentuk isolasionisme. Membentuk ‘pulau-pulau’ yang tidak saling mengerti satu sama lain. Maka dari itu pluralisme harus dimengerti sebagai suatu tatanan sekaligus sebagai suatu kondisi kebebasan tertentu. Jika di dalam sebuah agama, misalnya,

Iman yang benar tidak mendehumanisasi manusia-manusia dari kelompok lain sebagai musuh, kafir atau sesat, melainkan justru mendorong upaya-upaya saling pengertian. Seorang yang toleran secara militan bukanlah sosok yang mudah goyah di tengah-tengah pluralisme nilai, lalu menjadi *laissez faire* terhadap imannya sendiri. Dia malah berupaya menemukan acuan-acuan kosmopolitan dari khasanah religiusnya untuk mendukung toleransi.

terdapat bermacam-macam aliran atau sekte, sekurang-kurangnya ada suatu organisasi yang cukup fleksibel yang mencoba mendekatkan mereka untuk saling mengerti. Gerakan-gerakan solidaritas semacam gerakan ekumene dalam kekristenan adalah salah satu contoh upaya untuk saling mengerti di antara yang terpecah.

Fleksibilitas itu harus ditunjukkan sebagai gerakan solidaritas kemanusiaan yang inklusif, dan bukan sebagai kontrol atau dominasi doktriner. Kita tidak harus mereduksi pluralitas, melainkan menatanya. Gerakan untuk saling mengerti ini tidak boleh mengeksklusi pihak-pihak yang terlepas jauh, yakni yang sangat berbeda dari mayoritas, karena sikap eksklusif macam itu justru akan meradikalkan sikap pihak yang dieksklusi. Sikap yang tepat adalah mengajak bicara sambil membiarkan berkembangnya suatu kategori

yang lebih inklusif untuk menampung pluralitas. Kemampuan dan kemauan untuk bersikap inklusif ini tentu saja banyak tergantung pada sejarah identitas dan kedewasaan umat. Begitu juga pluralitas kultural dalam masyarakat kita perlu ditata secara inklusif dan bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang melampaui tembok-tembok agama, suku, ideologi, ras, dan seterusnya.

Apakah semua yang Anda paparkan tersebut terkait dengan proyek besar menuju apa yang Anda sebut sebagai toleransi militan?

Toleransi militan itu suatu konsep embrional yang lahir prematur, karena belum saya pikirkan secara sistematis. Inti dari konsep itu sendiri berangkat dari anggapan bahwa setiap orang mempunyai iman, keyakinan dan paham tentang kebenarannya sendiri-sendiri. Seorang yang beriman dengan tekun tidak bisa mengatakan bahwa semua agama sama saja. Adanya hal-hal yang sama dalam berbagai agama tidak berarti bahwa semua agama sama saja. Anggapan seperti itu juga yang mau dihindari oleh agama manapun. Kebenaran di dalam agamaku tidak bisa ditawarkan lagi, namun pengakuan kebenaran ini tidak harus dengan mengeksklusikan pihak lain sebagai tidak selamat. Sebagai suatu keyakinan yang menyentuh fondasi eksistensial manusia, agama memang cenderung menjadi sistem pandangan dunia yang absolut. Akan tetapi dalam agama manapun, juga yang sangat eksklusif, terkandung pandangan tentang kemanusiaan yang membuka diri terhadap bangsa-bangsa dan agama-agama lain. Iman secara spesifik cenderung mengeksklusikan iman lain, jika hal itu berkaitan dengan identitas kolektif. Namun jika iman menyentuh kedalaman kemanusiaan universal, dari iman itu juga termuat suatu harapan untuk melampaui identitas kolektif yang dikira berasal darinya.

Toleransi militan yang saya maksud adalah bahwa meskipun kita mempunyai identitas dari agama tertentu, tidak berarti kita tidak toleran. Tak ada pertentangan logis antara beriman dan menjadi toleran. Justru sebaliknya, toleransi bersumber dari iman yang benar dan seharusnya menjadi bagian identitas agama. Seringkali militansi dan toleransi dipertentangkan satu sama lain, seolah tidak mungkin menjadi kesatuan: orang yang militan pasti tidak toleran dan sebaliknya orang yang toleran tidak militan. Toleransi militan adalah suatu pandangan bahwa perjuangan

untuk mewujudkan toleransi antaragama merupakan bagian dari pengumpulan iman sejati para warganegara yang religius. Iman yang benar tidak mendehumanisasi manusia-manusia dari kelompok lain sebagai musuh, kafir atau sesat, melainkan justru mendorong upaya-upaya saling pengertian. Seorang yang toleran secara militan bukanlah sosok yang mudah goyah di tengah-tengah pluralisme nilai, lalu menjadi *laissez-faire* terhadap imannya sendiri. Dia malah berupaya menemukan acuan-acuan kosmopolitan dari khasanah religiusnya untuk mendukung toleransi. Toleransi militan adalah sebuah posisi inklusif yang mau relaks terhadap tendensi-tendensi triumphalistis dalam setiap agama. Relaks berarti berironi seperti seorang dewasa yang merasa geli mengenang kepicikan yang dilakukan di masa kanak-kanaknya.

Maka itu, tidaklah mengherankan bahwa dalam perbandingan spiritual, seorang rohaniwan Muslim yang memiliki kedalaman spiritual dan seorang rohaniwan Kristani atau Budhis yang juga sangat dalam spiritualitasnya akan dapat berjumpa satu sama lain untuk kemanusiaan, meskipun mereka melihat dari perigi rohani yang berbeda-beda. Bertolak dari keyakinannya dan

dari pengalaman mistiknya sendiri-sendiri, seorang beragama yang sangat tinggi spiritualitasnya dapat menemukan mistik kemanusiaan yang sama. Jadi, *platform* kemanusiaan di semua agama pada dasarnya sama. Mereka bisa bertemu satu sama lain. Persoalan kenapa umat kebanyakan malah saling bertengkar, tak lain karena ajaran-ajaran religius telah diideologisasi dan membentuk sikap doktriner dan dogmatis yang ekstrem bagi umat. Sikap ini yang bisa membentuk umat menjadi militan dan tidak toleran. Atau militan atau *laissez-faire* bukanlah sebuah pilihan real bagi toleransi militan. Militansi politis atas dasar agama seringkali justru berasal dari kurangnya kedalaman iman. Sebaliknya, sikap *laissez-faire* kerap merupakan

Seorang yang beriman dengan tekun tidak bisa mengatakan bahwa semua agama sama saja. Adanya hal-hal yang sama dalam berbagai agama tidak berarti bahwa semua agama sama saja. Anggapan seperti itu juga yang mau dihindari oleh agama manapun. Kebenaran di dalam agamaku tidak bisa ditawar lagi, namun pengakuan kebenaran ini tidak harus dengan mengeksklusikan pihak lain sebagai tidak selamat.

bukti ketidaktekunan dalam beriman. Toleransi militan memadukan kesalehan religius dan humanisme universal.

Setelah pemaparan panjang lebar di atas, bagaimana Anda melihat pluralisme di Indonesia ke depan? Apakah ada harapan bahwa pluralisme Indonesia akan menuju pada arah yang lebih cerah atau justru Indonesia akan semakin terancam dengan disintegrasi dan sebagainya? Cukup banyak alasan untuk pesimis, meski juga masih banyak alasan untuk optimis.

Sulit untuk memastikan akan seperti apakah Indonesia ini ke depan. Tapi kalau ingatan dan memori masyarakat kita cukup kuat, maka akan terlihat benang merah dalam sejarah, dan benang merahnya adalah kebersamaan dalam kemajemukan. Tampaknya di samping alasan yang sangat pesimis bahwa mungkin ada segmen-segmen radikal-ekstrem dalam masyarakat kita yang sewaktu-waktu dapat mengambil alih kekuasaan dan sebagainya, tetap ada alasan untuk optimis bahwa benang merah itu menunjukkan tendensi pluralisme yang cukup kuat. Itu bergantung pada banyak faktor, baik intern maupun ekstern. Termasuk ke dalam faktor ekstern ini adalah politik internasional dan politik HAM yang sewaktu-waktu bisa menekan kalau ada rejim militer atau rejim fundamentalis yang mengambil alih kekuasaan di suatu negara.

Jadi, benang merah itu akan memberi suatu harapan buat Indonesia bahwa ke depannya kita akan tetap bergerak pada jalur masyarakat majemuk, meskipun ini juga sebuah perjuangan. Orang-orang yang toleran dan berpikiran pluralis, yang sebenarnya bagian mayoritas dari masyarakat kita, harus semakin berani berbicara. Mereka sekarang adalah *the silence majority* yang harus mendapat akses lebih besar untuk berbicara dan menolak segala macam bentuk intoleransi dan monisme di negara ini. Inilah yang saya tulis dalam buku saya *Memahami Negativitas* (Kompas, 2005). Masyarakat kita itu mudah diprovokasi, karena banyak yang termarginalisasi. Mereka yang termarginalisasi kemudian menjadi panik dan mudah terprovokasi dalam gerakan-gerakan massa. Dalam masyarakat kita, bahkan di dunia pada umumnya, ada kelompok yang dapat memanfaatkan situasi seperti ini dengan sangat baik.

Ada pihak-pihak dalam masyarakat kita yang secara cerdas dapat memprovokasi massa, dengan memainkan politik uang dan sebagainya,

serta dapat menggerakkan semuanya dalam proses demokrasi, mungkin dengan semboyan pembersihan dari korupsi atau mencitrakan diri sebagai rejim yang jujur meski diarahkan oleh kepentingan ideologi tertentu. Situasi seperti itu juga yang terjadi dalam fasisme. Suatu bahaya yang juga tidak tertutup bagi masyarakat kita. Maka kelompok yang dapat memanfaatkan situasi itu akan muncul sebagai pesona baru, sebagai rejim yang cukup bersih namun keras, dan secara diam-diam akan membawa seluruh masyarakat ini pada ideologi yang diperjuangkannya. Itu bahaya dan kita harus terus mewaspadainya. Menurut saya, rejim monistis yang mungkin bersih dari korupsi itu, jika ada, akan berlangsung sementara saja. Setelah keuntungan yang diinginkannya diperoleh, mereka akan membawa masyarakat kepada maksud-maksudnya yang semula. Di situ kebebasan dan pluralisme dirugikan. Sekarang kita berada dalam situasi yang seperti itu. Menegangkan. Jadi, dua benang merah itu terdapat di negara kita. Kebebasan kita sebagai warga negara diberkati oleh pluralitas masyarakat kita, tetapi pada saat yang sama bahaya homogenisasi tetap mengancam, karena banyak kelompok dalam masyarakat kita masih dapat digerakkan sebagai “massa”.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 12 Juni 2007

Percakapan dengan

Fachry Ali



Fachry Ali, Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI). Ia memperoleh gelar MA dari Monash University, Australia. Ia juga pernah aktif di LP3ES.

Semua gagasan yang terkandung dalam Pancasila terlahir dari agama, apapun agamanya. Karena itu proses yang menempatkan hak agama dan non-agama secara terpisah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sehingga sampai beberapa dekade ke depan sekularisasi di negeri ini belum bisa berjalan alamiah. Harus diakui, pertumbuhan negara kita tidaklah kaya gagasan, kecuali yang tersedia dari agama-agama yang ada. Sedangkan langgengnya suatu agama lantaran kemampuannya memberi inspirasi bagaimana seharusnya dunia ini ditafsir dan bagaimana menstrukturkan sistem tingkah laku dalam menyikapi realitas. Karenanya, di tengah kehidupan bangsa yang beragam, harus tetap menjaga sikap kritis dan kesejatan kita sebagai rakyat. Maka, toleransi yang bersumber dari sikap etik, yang merupakan kata hati dan saripati agama, sangat penting ditanamkan.

Bagaimana pandangan Anda mengenai sekularisme? Apakah perlu dibedakan antara sekularisme, sebagai ideologi, dan sekularisasi, sebagai proses, sebagaimana pernah ditulis oleh Nurcholish Madjid?

Memperbincangkan gagasan tersebut sangat tergantung bagaimana kita memaknainya. Sekular yang dimaksudkan dalam pengertian Cak Nur adalah sekularisasi. Sekularisasi merupakan sebuah proses di mana orang diminta untuk menempatkan di mana hak agama dan di mana hak non-agama. Gagasan Cak Nur ini sebenarnya lebih merupakan sebuah usaha mendekonstruksi sistem pemikiran keagamaan yang sudah mapan pada waktu itu, yaitu ketika banyak hal-hal yang seharusnya tidak terlalu *urgen* disinggung dengan agama justru mengalami proses peng-agama-an. Yang paling konkret dicontohkan, misalnya, menjadikan partai sebagai barometer keislaman. Orang yang masuk ke dalam partai Masyumi atau NU dianggap telah beragama Islam secara benar atau berhak dipanggil sebagai aktivis Islam. Sedangkan mereka yang di luar itu, walaupun Muslim, tidak berhak menyandang predikat keislaman dalam perjuangan, karir, dan seterusnya.

Sekularisasi Cak Nur mengarah kepada pembetulan atau koreksi konseptual tentang apa yang dimaksud sebagai agama dan non-agama. Sebab apa yang dilakukan oleh para pengusung dan aktivis partai Islam lebih bersifat politis, dalam pengertian bahwa mereka yang beragama Islam, yang bergerak di luar institusi-institusi keislaman, berhak menyatakan diri sebagai Muslim dan di atas segala-galanya absah sebagai Muslim.

Sekularisasi Cak Nur berkaitan juga dengan proses desakralisasi, bukan saja atas tempat-tempat keramat, melainkan juga tokoh-tokoh yang dianggap suci. Para pemimpin agama, di dalam konsep sekularisasi ini, tidak secara otomatis menjadi tokoh paling suci, paling tidak berdosa, melainkan harus tetap dianggap sebagai manusia biasa. Juga tidak ada tempat-tempat yang lebih suci atau keramat ketimbang tempat lainnya. Semua tempat pada dasarnya sama.

Inti sekularisasi dalam pengertian Cak Nur tersebut adalah penggabungan dari dua hal. *Pertama*, Wahhabisme. Gagasan sekularisasi Cak Nur berakar langsung pada jantung keislaman, yaitu Wahhabisme. Sebab Wahhabi dalam hal tertentu sangat sekular dalam berpikir. Makam Nabi, bagi kaum ini, tidak boleh ada, sebab kalau ada akan dikeramatkan oleh

orang-orang terutama umat Muslim. *Kedua*, sebagai konsekuensi terjadinya pertemuan antara gagasan sekularisasi Cak Nur dengan gagasan Barat, perihal *the idea of progress*, yang menempatkan manusia pada status yang dominan (subyek) dan alam sebagai obyek. Maka, karena alam diposisikan sebagai obyek, alam boleh diperlakukan bagaimanapun juga, sepanjang perlakuan itu membantu tercapainya survivalitas manusia.

Sekarang, di dalam konteks yang dikembangkan oleh kaum intelektual dan para pemikir agama, sekularisme sebenarnya lebih dipahami sebagai pemisahan antara agama dan negara. Tuntutan pembubaran MUI, misalnya, atau ramainya protes terhadap perda-perda, yang secara sepihak dikatakan sebagai perda syariah dan seterusnya, adalah sebuah usaha untuk memisahkan antara agama dan negara. Jadi, demikianlah sekularisasi atau sekularisme yang saya pahami sebagaimana terpantul dari tuntutan-tuntutan para aktor *civil society* sekarang ini.

Pertanyaannya, apakah hal itu mungkin secara antropologis maupun sosiologis? Apakah mungkin agama dipisahkan dari negara di dalam konteks sejarah

Untuk konteks Indonesia, pemisahan negara dan agama masih tidak dimungkinkan, karena sangat terbatasnya persyaratan-persyaratan sumber daya gagasan. Jika tanpa agama, Anda mau mendirikan atau menjalankan negara ini dengan menggunakan sumber gagasan apa? Paling mengambil dari gagasan Barat seperti demokrasi. Tetapi untuk gagasan tentang keadilan, dari mana mau Anda ambil kalau bukan dari agama? Negara kita tumbuh memang tidak kaya dengan gagasan, kecuali dengan tawaran dari agama-agama yang ada. Karena itu, agama tetap ada karena dia memberikan inspirasi harus bagaimana dunia ini kita tafsirkan dan bagaimana kita menstrukturkan sistem tingkah laku dalam memperlakukan dunia. Artinya bagaimana Anda melihat diri Anda, bagaimana Anda melihat alam dan orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok, dan bagaimana Anda melihat orang-orang yang sama atau orang-orang yang berbeda pandangan dan agamanya, maka seluruh sumber gagasan atau cara pandang itu berasal dari agama.

politik Indonesia? Kalau kita lihat

kecenderungan sekarang, mengapa Aa Gym, Zaenuddin MZ dan kiai-kiai muda itu bermunculan, karena pada dasarnya sebagian besar masyarakat kita tidak mau bersusah payah untuk mencari sendiri pemahaman agamanya. Yang mereka butuhkan adalah tuntunan. Makanya ketika muncul pendakwah-pendakwah baru selalu diikuti dengan munculnya para pengikut. Yang mereka inginkan adalah semacam adanya *division of labour*. Sebagai contoh, baiklah saya bekerja dalam bidang yang selama ini saya tekuni, apakah pedagang, kaum profesional, dosen, politisi dan seterusnya, tetapi untuk urusan agama saya akan menyerahkan kepada orang yang memang secara khusus mempelajarinya. Inilah alasan *pertama* kenapa sulit melakukan pemisahan antara agama dan negara, khususnya dalam konteks Indonesia.

Alasan *kedua*, karena ada unsur *spiritual sanctions*, sangsi-sangsi dan persetujuan-persetujuan dalam persoalan keagamaan. Pada umumnya masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan untuk tidak terlalu masuk ke dalam persoalan agama karena mereka takut. Sebab, ada konsep surga dan neraka. Konsep ini merupakan konsep baku di tengah masyarakat, bukan hanya umat Islam, tetapi juga Kristen dan sebagainya. Karena mereka takut tergelincir menyalahgunakan agama, yang karena itu akan masuk neraka, maka sebaiknya mereka tidak ikut campur ke dalam persoalan agama. Faktor-faktor inilah yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh agama. Atau, inilah yang memberikan penjelasan kepada kita mengapa orang-orang seperti Zaenuddin MZ, Aa Gym dan sebagainya akan terus tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Contoh yang lebih menarik lagi adalah, sebagaimana saya saksikan di makam raja-raja Jawa, di Imogiri, saya melihat rakyat datang berduyun-duyun, naik tangga yang jumlahnya sangat banyak, lalu duduk di depan pintu gapura – padahal makam raja-rajanya itu masih sangat jauh – kemudian mereka berdoa. Jadi, secara antropologis maupun sosiologis, sebenarnya kebutuhan untuk penguatan spiritual masih sangat kuat sekali.

Bagaimana dengan konsep negara dan hubungannya dengan agama?

Di dalam konteks ini kita melihat bahwa konsep negara sebenarnya merupakan institusi asing di dalam pengalaman kolektif masyarakat kita. Hal ini terjadi karena mereka memang tidak secara langsung bersentuhan

dengan negara. Oleh karena itu, mereka tidak begitu mengenal simbol-simbol negara modern. Dengan kondisi seperti ini, maka yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana negara kemudian bisa dipahami dan melekat ke dalam sistem kognisi mereka. Jalan satu-satunya adalah melalui simbol-simbol yang mereka kenal, yaitu simbol-simbol agama. Di samping sikap masyarakat yang tampak asing dengan negara, celakanya kemudian negara juga memanfaatkan energi agama untuk melegitimasi kekuatannya, di mana pada saat yang sama juga menciptakan agamanya sendiri, yang disebut dengan *civic religion*.

Kalau Anda melihat upacara 17 Agustus, deru langkah orang baris-berbaris, menaikkan bendera, lalu presiden menerima bendera dari paskibraka, di tambah suasana upacara yang dibikin seheuing mungkin dengan lagu-lagu pemudaan terhadap negara-bangsa, itulah perwujudan *civic religion*. Artinya, bahkan negara sekalipun membangun dan menggunakan simbol-simbol dari agama untuk membangun ritual tersendiri. Maka tidak heran jika pemisahan antara agama dan negara adalah pandangan yang dalam realitasnya masih sangat jauh.

Di negara-negara maju, seperti Amerika dan terutama Australia, karena saya sekolah di sana, saya lihat bahwa praktik sekularisasi itu dijalankan oleh negara dengan tidak mendukung seluruh hal yang berhubungan dengan agama, baik itu pelajaran agama, organisasi gereja, ataupun perkumpulan-perkumpulan lain yang berkaitan dengan aktivitas agama. Kebijakan-kebijakan negara juga bukan merupakan kebijakan yang menguntungkan salah satu agama. Makanya, kalau Anda lihat perdebatan seperti di Prancis tentang larangan penggunaan simbol-simbol agama, baik jilbab, salib atau kopiah orang Yahudi adalah salah satu bukti dari praktik sekularisasi.

Di sana, pada masyarakat Barat, sangat mungkin terjadi sekularisasi, walaupun pasti tidak ada yang sempurna. Anda lihat George Bush sendiri

Tuntutan pembubaran MUI, misalnya, atau ramainya protes terhadap perda-perda, yang secara sepihak dikatakan sebagai perda syariat dan seterusnya, adalah sebuah usaha untuk memisahkan antara agama dan negara. Jadi, demikianlah sekularisasi atau sekularisme yang saya pahami sebagaimana terpantul dari tuntutan-tuntutan para aktor *civil society* sekarang ini.

sangat terinspirasi oleh agama dalam kebijakan-kebijakannya, termasuk kebijakan untuk berperang. Tetapi secara umum, sejarah ekonomi atau lebih tepat sejarah kemanusiaan masyarakat Barat sudah sangat lama dan memberikan kesempatan yang jauh lebih luas untuk mengkonstruksikan sistem ideologi sekular. Karena sejak jatuhnya Roma pada awal abad masehi, sebagaimana kita ketahui, kekristenan meluas ke wilayah-wilayah Eropa. Lalu Roma sebagai pusat keagamaan menguasai seluruh aspek, baik ekonomi maupun politik dan aspek kehidupan lainnya. Begitupun raja-raja Eropa juga lebih mempersepsikan diri mereka sebagai wakil dari Roma ketimbang sosok yang mewakili “bangsa”-nya sendiri. Kemunculan sekte-sekte agama yang lantas menguasai panggung politik, pada saat itu, cenderung disikapi dengan menyingkirkan sekte atau agama yang berbeda. Penekanan terhadap anti-Yahudi juga habis-habisan dilakukan dan sangat mewarnai perjalanan sejarah Eropa. Intinya, yang terjadi di Eropa sejak abad ke-9, 10 atau 11, sampai habisnya masa Abad Pertengahan, adalah dominasi gereja yang sangat kuat.

Kondisi seperti inilah yang kemudian melahirkan gejolak dan pemberontakan yang berkepanjangan. Namun demikian, pemberontakan yang dilakukan sebenarnya bukanlah pemberontakan pemikiran, melainkan lebih pada pemberontakan atas cengkeraman agama terhadap sistem sosial, politik, maupun ekonomi yang sangat dominan dalam masyarakat Eropa pada saat itu. Dalam beberapa hal, sistem feodal juga mencerminkan adanya peranan agama dalam menstrukturisasi sistem kemasyarakatan. *Land lord* atau kaum bangsawan bukan hanya sebagai pemimpin politik atau hakim, tetapi sekaligus juga menjadi pemimpin agama dan pemilik tanah yang sangat luas, pemilik sumber daya ekonomi. Jadi pada sistem seperti itu, antara kepemimpinan agama dan kontrol terhadap ekonomi dan politik memiliki hubungan yang sangat kuat. Kalaupun kemudian mereka, masyarakat Eropa, melakukan pemberontakan kepada gereja, hal itu lebih dikarenakan adanya *specific historical course*, jalan sejarah yang sangat spesifik dalam pengalaman sejarah kemanusiaan masyarakat Eropa pada waktu itu, bersamaan semakin menguatnya otonomi manusia dengan munculnya temuan-temuan teknologi sebagai basis bagi perkembangan industrialisasi. Dari prakondisi inilah pemberontakan terhadap agama yang sekarang kita kenal dengan sekularisasi, mendapatkan pembenaran strukturalnya. Dari kasus Eropa tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa sebetulnya

pemberontakan terjadi ketika kapital jauh lebih dominan menentukan sistem tingkah laku masyarakat secara kolektif, ketimbang yang lainnya.

Untuk Indonesia, sejarah negara modern kita sebenarnya sangat baru apabila diukur dari 17 Agustus 1945, hari kelahiran bangsa. Kalau kita ukur dari pertemuan antara Barat dan Timur, maka paling banter berumur sekitar 3 atau 4 abad. Meskipun demikian, persentuhan yang sudah mulai intensif, yang memunculkan sebuah masyarakat yang terdidik, masih sangat terbatas sekali. Kalau Anda melihat sejarahnya, pada tahun 40-an, orang-orang yang terdidik secara Barat (modern) di Indonesia tidak sampai 25 ribu orang dari 70 juta penduduk Indonesia. Coba Anda bayangkan bahwa sebagian besar masyarakat kita menjelang kemerdekaan bangsanya, ternyata masih *uneducated*. Orientasinya masih pada kerajaan, jauh dari sistem *nation-state* seperti sekarang. Pada 1946 atau 1947, saya melihat gambar-gambar ulang tahun kemerdekaan kita, tampak terlihat jelas bahwa masih dominan masyarakat yang menganggap negara ini sebagai kerajaan yang dipimpin oleh seorang maharaja. Di situ terlihat ada orang dari Jawa Barat yang pergi ke Yogyakarta, sebagai ibu kota negara pada waktu itu, yang membawa hasil-hasil pertanian untuk diberikan kepada presiden Soekarno. Lalu mereka meyembah Soekarno seperti halnya dahulu, yakni upacara ketika pemberian upeti kepada raja. Baginya, Soekarno bukanlah presiden yang memimpin negara, tetapi lebih sebagai raja dari sebuah kerajaan.

Kalau Anda lihat penelitian UIN Jakarta (PPIM UIN Jakarta) yang dipresentasikan baru-baru ini, hasilnya memperlihatkan bahwa responden ketika ditanya apakah Anda lebih merasa sebagai orang Indonesia atau seorang Muslim, sebagian besarnya masih mengatakan lebih merasa sebagai Muslim,

Buat saya, otentisitas keagamaan tetap harus dipertahankan. Sebab, agama adalah tempat kembali bagi orang-orang yang pernah berdiam di “rumah”. Dalam pengalaman keagamaan saya, momen ritual seperti pembacaan *shalawat* dan sebagainya itulah di mana saya merasa kembali ke “rumah” saya, meski saya juga tahu bahwa itu hanyalah simbol-simbol. Saya tidak akan menyanyi *Jingle Bell* dan lain sebagainya, yang memang dari dulu tidak terdapat di “rumah” saya.

baru setelah itu sebagai orang Indonesia. Sementara ketika ditanya akan lebih patuh kepada pemimpin agama atau presiden, mereka menjawab ulama.

Jadi, maksud saya, proses sekularisasi itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, sampai beberapa dekade ke depan. Dan sekularisasi di Indonesia belum bisa berjalan secara alamiah.

Yang justru akan terjadi adalah kesimpangsiuran persepsi. Apa yang terjadi di Turki, sebagai ikon negara yang sebagian besar penduduknya Muslim dengan sistem negara yang sekular, sekarang-sekarang ini sangat membingungkan. Tulisan Mahmud Ayyub, di *The Jakarta Post*, menyatakan bahwa kaum sekular di sana telah berkubu kepada kaum militer maupun *the establishment*, yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan baru yang dimotori oleh partai-partai Islam, yang berkiblat pada sistem ekonomi pasar dan mengarahkan atau menyesuaikan politiknya kepada sistem global. Di dalam konteks ini, kita melihat sesuatu yang terbalik. Orang-orang yang *vested interest*, yang mengaku sebagai benteng sekular, pada dasarnya adalah orang-orang yang berpikiran sempit. Karena kepentingan-kepentingannya terjepit, mereka kemudian mengatakan bahwa sekularisasi sedang berada dalam bahaya. Padahal dengan sekularisasi, mereka tengah mempertahankan struktur sosial-ekonomi yang menguntungkan mereka dan menolak perubahan yang lebih besar.

Sekularisme atau sekularisasi tidak hanya bermakna separation, pemisahan, ia juga diartikan differentiation, pembedaan, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Eropa. Bagaimana pendapat Anda?

Untuk konteks Amerika, sekularisme lebih merupakan anomali modernisasi. Bahwa setidaknya sepanjang partai Republik yang berkuasa, maka semakin modern masyarakat Amerika, semakin mereka beragama. Sementara itu, Eropa sudah sekular “habis-habisan.” Di dalam beberapa hal, Australia juga mirip dengan Eropa, di mana agama sudah tidak ada fungsinya lagi. Agama tidak lagi menjadi inspirasi secara resmi keputusan-keputusan politik di tingkat negara. Dengan mengatakan seperti itu, sebenarnya bukan berarti bahwa mereka tidak punya etika. Kesan saya melihat negara maju yang sekular di Eropa adalah bahwa di sana telah muncul etika publik yang telah menjadi substitusi atau pengganti

atas agama. Hal yang sama sulit kita temukan pada masyarakat Amerika. Anda akan melihat bahwa penyerangan terhadap Iraq justru dianggap sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang mereka lakukan. Inilah anomali. Oleh karena itu, orang-orang Amerika melakukan kritik keras terhadap Eropa. Pertama-tama tentu saja karena sikap Eropa yang tidak mendukung sikap Amerika dalam melakukan penyerangan ke Iraq, yang kemudian berbuntut pada kecaman mereka terhadap sekularisasi Eropa. Saya baca di majalah *The Economist* bahwa betapa Amerika telah mengorbankan anak-anak terbaik mereka pada Perang Dunia ke-2, dalam mempertahankan kedaulatan negara-negara Eropa dalam melawan fasisme dan Nazisme di Italia dan Jerman.

Tetapi mana bantuan mereka (Eropa) untuk perang Irak, terlebih mereka kini sudah tidak menganggap lagi adanya Tuhan. Gereja-gereja sudah dialihkan menjadi, kadang-kadang, tempat disko, klub malam dan sebagainya, yang sama sekali jauh dari nilai-nilai agama.

Proses sekularisasi itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, sampai beberapa dekade ke depan. Dan sekularisasi di Indonesia belum bisa berjalan secara alamiah.

Yang justru akan terjadi adalah kesimpangsiuran persepsi.

Untuk konteks Indonesia, pemisahan negara dan agama masih tidak dimungkinkan, karena sangat terbatasnya sumber daya gagasan. Jika tanpa agama, Anda mau mendirikan atau menjalankan negara ini dengan menggunakan sumber gagasan apa? Paling mengambil dari gagasan Barat seperti demokrasi. Tetapi untuk gagasan tentang keadilan, dari mana mau Anda ambil kalau bukan dari agama? Negara kita tumbuh memang tidak kaya dengan gagasan, kecuali dengan tawaran dari agama-agama yang ada. Karena itu, agama tetap ada karena dia memberikan inspirasi harus bagaimana dunia ini kita tafsirkan dan bagaimana kita menstrukturkan sistem tingkah laku dalam memperlakukan dunia. Artinya bagaimana Anda melihat diri Anda, bagaimana Anda melihat alam dan orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok, dan bagaimana Anda melihat orang-orang yang sama atau orang-orang yang berbeda pandangan dan agamanya, maka seluruh sumber gagasan atau cara pandang itu berasal dari agama.

Negara Indonesia, yang muncul karena revolusi, pasti bersifat dadakan. Satu hari sebelum 17 Agustus 1945, tentunya, Indonesia belum ada. Begitu

diproklamirkan, Indonesia ada, tanpa ada sebuah gagasan atau formulasi gagasan yang dianut sebelumnya, kecuali kata merdeka. Akhirnya, bagaimana kita mengorganisasikan kekuasaan *kecuali* harus kita pinjam pada tradisi orang lain. Sehingga negeri ini diberi nama republik – yang turunannya kemudian adalah parlemen, presiden dan wakil presidennya dan seterusnya. Jadi, republik itu sendiri bukan istilah Indonesia. Bagaimanapun harus diakui, di luar itu semua, sebenarnya kekayaan gagasan kita tidak ada. Kalau demikian, dari mana kita menggali etika publik kalau bukan dari agama?

Bukankah awal terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara melalui perdebatan panjang dan alot, misalnya, melalui PPKI?

Itu sebenarnya sama sekali tidak panjang. Terlebih lagi lembaga-lembaga itu terlahir lebih karena janji Jepang. Sebelumnya apakah motif orang untuk berontak? Tak lain adalah agama. Makanya, Clifford Geertz mengarang sebuah artikel yang berjudul *The Javanese Kijaji; the Changing Role of Cultural Broker*. Dia mengatakan bahwa ketika bangsa Indonesia baru bangkit, dengan kelahirannya yang secara tiba-tiba, masyarakat tidak kenal dengan apa yang dinamakan negara secara konseptual. Sehingga memaksa kiai untuk memerankan diri sebagai *cultural broker*, sebagai mediator yang menjembatani antara kelahiran negara yang begitu modern dengan massa yang *uneducated*. Negara tidak punya apa-apa; *qua* simbol, *qua* gagasan, *qua* sumber-sumber etik. Kita hanya mempunyai agama. Maka kemudian kita membutuhkan dan mengambil pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan keagamaan untuk membangun negara kita supaya dikenal dan *recognized*, diakui.

Kalau saya ceritakan tentang Aceh, di sana dapat dikatakan bahwa Indonesia itu lahir di masjid ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh, pemimpin Islam di Aceh, mengatakan siapa saja yang gugur mempertahankan kemerdekaan berarti dia (mati) *syâhid*. Itu gagasan dari mana kalau bukan dari agama. Pidato Bung Tomo yang kita dengar pada 10 November 1945, yang memakai pekikan *Allâhu akbar* segala, dari mana gagasannya, kalau bukan dari agama. Lalu sekarang orang seenaknya saja mau memisahkan agama dari negara. Itu artinya mau enak sendiri dan, bagi saya, itu tidak masuk akal.

Gagasan seperti itu adalah upaya menempelkan sesuatu yang asing ke dalam struktur tradisi kita, yang lain, yang dirasa tidak cocok. Lantas kita katakan semuanya salah, yang benar adalah gagasan yang asing itu.

Agama dalam konteks sekularisasi berperan sebagai inspirasi bukan aspirasi. Artinya, konsep-konsep umum yang dimiliki oleh agama, seperti konsep tentang keadilan dan kesetaraan, dalam sekularisasi, kemudian diturunkan menjadi bukan lagi dalam bahasa agama, melainkan dalam bahasa publik yang sekular. Bagaimana menurut Anda?

Sekarang saya mau tanya: dalam praktiknya yang merumuskan undang-undang itu siapa? Tentunya DPR. Makanya anggota DPR kemudian disebut *law maker*, pembuat undang-undang. DPR dipilih oleh rakyat. Sebelumnya, ketika berkampanye, yang dijual oleh anggota-anggota yang sekarang terpilih adalah agama, karena konstituennya adalah masyarakat yang berbasis agama. Hal yang sama bisa dilihat pada pemilihan baik presiden, gubernur, maupun pimpinan-pimpinan lainnya. Calon yang akan maju pada pemilihan gubernur Jakarta, misalnya, mendadak memakai sorban dan perlengkapan baju Muslim lainnya ketika hendak menemui konstituennya. Hal itu dilakukan karena dia sadar bahwa para calon pemilihnya merupakan masyarakat yang masih menjadikan agama sebagai basisnya. Lantas setelah terpilih, kalau keputusan yang diambil kemudian ternyata *radically different* dengan aspirasi rakyat yang sudah memberikan wewenang kepadanya, misalnya dengan membuat undang-undang yang sama sekali di luar harapan mereka, apakah tidak akan membuat *discrepancy*?

Oleh karena itu, yang harus dipahami oleh mereka, para pembela sekularisasi, adalah sejarah sosialnya. Sejarah itu memberitahukan bahwa kita tidak bergerak dari nol. Sekarang cobalah Anda baca *Babad Diponegoro*. Maksud dan tujuan dia memberontak terhadap penjajah tak lain adalah

Di dalam kehidupan kita, pluralisme itu terjadi, bahkan di dalam Islam itu sendiri. Karena itu, kita harus menerima adanya perbedaan pandangan semacam itu. Penerimaan perbedaan pandangan itu tentunya didasarkan pada sebuah etik publik yang berlaku di Indonesia, dan itu tetap berujung pada agama.”

sebagai upaya melawan orang kafir. Pemberontakan para petani di Banten juga demikian. Pada dua contoh kasus itu, seandainya tidak ada gagasan agama, pastilah semuanya akan menyerah begitu saja kepada penjajah. Hanya karena ada Islam yang menolak keberadaan penjajah yang kafir, sehingga terjadilah perlawanan. Muncullah apa yang dinamakan *boundary*, batas antara kita dan mereka. Sekali lagi saya katakan bahwa agama terlalu kaya untuk memberikan inspirasi tentang bagaimana realitas itu diinterpretasikan. Hal ini dapat menjelaskan kenapa kemarin SBY harus datang juga ke tempat seorang habib yang meninggal, dengan memakai kopiah, sorban putih dan berpidato. SBY sebagai representasi dari *state* datang karena dia tahu membutuhkan konstituen yang percaya terhadap kekuatan agama. Karena itu konstituen memberi dukungan kepada SBY bukan dengan cek kosong. Sehingga, harus ada kebijakan-kebijakan negara yang menguntungkan mereka. Kalau tidak demikian, ia akan ditinggalkan.

Apakah hal semacam itu bukan politisasi agama?

Secara struktural kebijakannya harus berjalan seperti itu. Sekarang, yang sebenarnya dibutuhkan dan perlu ditekankan adalah toleransi. Itu yang tadi saya katakan sebagai etika publik, yang sebenarnya bersumber dari agama juga. Yang harus ditekankan adalah bagaimana berhadapan dengan perbedaan, tetapi juga jangan dengan cara yang *norak*, jangan dengan cara memancing-mancing emosi orang. Kalau umat Muslim, misalnya, dikasih “pantat,” seperti yang dilakukan oleh Inul Daratista, apakah mereka tidak akan marah? Kalau saya, sebagai orang beradab, akan tersinggung, karena pantat adalah simbol dari penghinaan. Coba Anda lakukan itu kepada dosen Anda, pasti dia akan marah. Lantas kenapa “pantat” ini yang malah kalian bela? Sungguh sebuah hal yang sangat lucu. Inul yang tidak memberikan sumbangsih peradaban apapun, kalian bela. Ketika dia kasih “pantat”, kalian bersorak. Ditaruh di mana otak kalian semua? Hal-hal seperti itulah yang harus dipikirkan oleh kaum sekular.

Bukankah founding fathers negara kita sendiri sepakat untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, sekaligus juga tidak secara eksplisit menjadikan Indonesia sebagai negara sekular? Alternatifnya, rumusan yang diberikan oleh para pendiri negara, adalah Pancasila.

Pertanyaannya, kalau tidak ada agama bisakah ada Pancasila? Apakah tanpa agama akan terpikirkan oleh para pendiri negara ini tentang gagasan keadilan sosial, musyawarah dan lain sebagainya? Semua itu diambil dari agama.

Sebelum Islam datang ke Indonesia, pada masa-masa kerajaan sudah ada nilai-nilai keadilan sosial, musyawarah, bahkan pemilihan ketua suku dilakukan berdasarkan suara rakyat, dan sebagainya.

Itu betul. Tetapi, semua gagasan Pancasila terlahir dari agama, apapun agamanya. Taruhlah agamanya Hindu, karena dia lebih awal daripada Islam, sungguhpun demikian, tetap namanya adalah agama. Maksud saya, mereka, kaum sekular, berpikirkannya ahistoris. Tiba-tiba saja karena di Amerika seperti ini, kita harus begini. Tanpa melihat komposisi dari kekuatan masyarakat kita yang terbentuk oleh sejarah yang khusus. Sangat susah untuk melakukan standarisasi pada semua hal. Kalau selera mungkin bisa, seperti apa yang kita kenal sekarang dengan istilah *McDonaldization*. Kamu bisa makan Mc Donald sekaligus gudeg, nasi Padang, dan sebagainya pada saat yang sama. Tetapi orang yang makan Kentucky dan sebagainya, jalan pikirannya tetap saja agama. Jadi, maksud dari seluruh uraian tadi, saya hendak betul-betul menganjurkan, khususnya kepada kaum sekular, agar berpikir secara historis. Karena demikian itulah fakta kita.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa seruan tentang toleransi, dan macam-macam pandangan yang moderat dan liberal, bagaimanapun harus disampaikan tidak dengan cara meledek, menyindir atau cara semacamnya.

Lantas, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara agama?

Kalau kita perhatikan dari sejak berdirinya negara ini sampai sekarang, sama sekali tidak ada yang dinamakan negara agama. Bagaimanapun negara kita – yang, konon, bukan negara agama dan bukan negara sekular – berasal dari rumusan yang dibangun oleh Orde Baru. Karena itu, bagi saya, sebenarnya hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang harus diper-

debatkan lagi. Yang perlu dilakukan adalah toleransi. Toleransi harus berangkat dari sikap etik. Sikap etik adalah kata hati.

Kalau Anda menyaksikan di tv dan media lainnya yang memberitakan tentang rumah dan tempat beribadah orang Ahmadiyah diserang oleh sekelompok masyarakat di Mataram dan di beberapa daerah lainnya, kata hati kita pasti akan menolak sikap semacam itu. Kita akan mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang salah dan bukan merupakan tindakan yang didasarkan pada agama, karena telah merusak nilai-nilai kemanusiaan. Kalau Anda melakukan pengeboman di pasar, seperti yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawan, maka tidak bisa mengatasnamakan Tuhan untuk membenarkan perbuatannya. Pada titik itulah perlunya mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan. Tetapi jangan pula berharap bahwa toleransi itu akan *taken for granted* berjalan. Sebab pada dasarnya mereka, yang sekarang bersikap kurang atau tidak toleran itu, juga melihat ketidakadilan di tingkat dunia. Siapa yang mau mengadili Amerika? Urusan apa Amerika datang ke Irak dan Afghanistan? Lantas, kenapa orang-orang sekular tidak memprotes Amerika beramai-ramai? Apakah karena akan mengganggu harmonisasi agama di Indonesia sendiri? Bukankah mereka tidak melakukan protes itu? Sebaliknya, yang mereka serang malah MUI.

Bukankah pada 2003, semua masyarakat, termasuk kalangan liberal-sekular juga melakukan protes atas perang yang dilakukan Amerika di Afghanistan dan Irak?

Demonstrasi ada, tapi uangnya kalian terima juga. *Point* yang ingin saya katakan untuk hal-hal yang telah saya sebutkan di atas adalah bahwa harus ada sikap kritis dari kita sebagai akademisi. Itulah yang dikritik oleh Harry J. Benda terhadap pendekatan Herbert Feith, ketika dia menulis *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Di situ Feith mencoba menerapkan sebuah pendekatan atau kerangka penglihatan yang asing. Lalu Feith, sebagaimana kata Benda, mengatakan bahwa demokrasi Indonesia sudah gagal. Padahal, kata Benda, lapisan dasar masyarakat juga merupakan sistem bernegara yang dipakai oleh Indonesia, di mana itu semua adalah sebuah sejarah pembentukan kemasyarakatan yang berbeda dari Barat, yang tampilannya seperti kita sekarang ini. Lihat saja, begitu demokrasi muncul, yang bermunculan adalah partai-partai Islam. Per-

tanyaannya, dari manakah mereka muncul? Bagi saya, mereka tetap ada, bahkan pada masa Orde Baru pun sebenarnya ada, hanya saja tidak diberi ruang gerak oleh pemerintah. Itu yang harus Anda lihat dalam konteks seperti ini. Kritik di atas yang saya maksudkan adalah dilakukan secara logis. Kalau tidak, kita hanya menjadi “pion-pion” mereka saja.

Termasuk tentang Pancasila yang sebenarnya tidak ada yang tidak cocok dengan agama. Sekarang apakah Pancasila bekerja? Dulu Pancasila bekerja karena dukungan kekuasaan. Kita semua dulu mengikuti penataran P4 sebelum masuk SLTP atau SLTA. Praktik seperti itu tak lain karena kekuasaan. Yakni kekuasaan yang kemudian berpretensi untuk melakukan penyeragaman penafsiran atas Pancasila. Oleh karena itu, menurut saya, agar Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, harus dibiarkan untuk diinterpretasikan secara agama, karena memang agamalah yang mereka kenal. Kalau Anda membiarkan dia sebagai sesuatu yang sekular, maka akan asing di dalam sistem kognisi masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila tidak akan berjalan, kecuali jika Anda paksakan lagi.

Hemat saya, substansi dari liberalisasi pemikiran harus diarahkan atau mencerminkan apa yang pada esensinya dibutuhkan oleh masyarakat lintas kelas.

Jika Pancasila dipahami secara sekular, apakah menurut Anda ia menjadi kurang memadai sebagai dasar negara?

Saya tidak tahu apakah sekarang ini Pancasila berlaku atau tidak. Buktinya sekarang perekonomian kita menggunakan sistem ekonomi pasar, bukan ekonomi Pancasila. Bagi saya, sesuatu atau sistem yang dikatakan berlaku atau berjalan haruslah sistem yang dibangun dari gagasan yang menggambarkan struktur sistem tingkah laku kita secara individual maupun kolektif. Lalu keputusan-keputusan sosial, politik, dan ekonominya semua berlangsung atau berasal dari gagasan yang sama. Pada tingkat gagasan dan praktiknya sekarang ini, apakah negara ini sudah seperti itu? Apakah Undang-Undang Penanaman Modal yang baru disahkan oleh DPR, yang memberikan kesempatan kepada investor asing untuk bisa menguasai lahan Indonesia selama seratus tahun dan kalau masih kurang

masih ditambah 2x25 tahun lagi, artinya bisa 150 tahun, adalah cerminan dari ideologi Pancasila? Pada hemat saya, sama sekali bukan. Karena aturan tersebut secara struktural tidak punya akar, bahkan di dalam susunan keputusan-keputusan yang bersifat kenegaraan. Jadi, sistem berpikir kita yang harus kita lihat kembali secara kritis.

Anda hampir selalu menyimpulkan bahwa kalau mau membicarakan Indonesia maka tidak bisa lepas dari agama. Bukankah sebuah negara seperti Indonesia tidak hanya cukup diurusi memakai pendekatan agama?

Memang tidak harus negara ini selalu dikaitkan dengan agama.

Nilai-nilai seperti toleransi dan sebagainya diharapkan akan mampu menopang demokrasi yang sedang kita bangun. Artinya, toleransi kita pahami bersama sebagai penyamarataan bagi semua warga negara, komunitas, agama, dan bahasa, sehingga terwujud masyarakat yang demokratis. Bagaimana tanggapan Anda?

Bagi saya pemikiran seperti itu akan menjebak diri sendiri. Sekarang, yang mayoritas di Indonesia adalah Islam, dan dalam demokrasi, yang menang adalah yang mayoritas. Makanya, sebagaimana saya katakan tadi, lagi-lagi, yang perlu diajarkan di sini adalah toleransi. Toleransi di sini artinya bagaimana orang melihat perbedaan sebagai gejala alamiah. Pertanyaannya, apakah itu tidak diajarkan oleh agama? Pasti diajarkan. Oleh karenanya interpretasi kita terhadap realitas juga harus obyektif.

Dulu, ketika ICMI muncul, kaum sekular pada ribut. Sekarang kamu cari di negeri lain, adakah Beni Moerdani-nya Islam di Filipina, misalnya? Ada atau tidak menteri di Filipina yang beragama Islam? Makanya, daripada mendera orang Islam Indonesia terus-menerus seperti itu, bikinlah perbandingan: di mana ada orang minoritas menguasai ekonomi secara mayoritas kalau bukan di Indonesia. Apakah fakta seperti itu menunjukkan masyarakat Indonesia tidak toleran? Meski mungkin juga karena kebodohan, misalnya. Siapa yang menguasai panggung wacana publik? Siapa yang mempunyai koran-koran besar dan stasiun-stasiun televisi di negeri ini? Koran Islam tingkat nasional di Indonesia cuma ada dua buah, yaitu *Republika* dan *Pelita*, yang saya yakin kalian, orang-orang sekular, tidak membaca. Kalian pasti hanya membaca *Kompas*. Lihatlah di Filipina,

adakah orang Islam yang mempunyai koran? Itu yang saya maksud dengan berpikir kritis tadi. Jangan hanya mencuci otak kita dengan pandangan dan nilai-nilai baru tanpa ada sikap kritis yang memadai. Di dalam kehidupan kita pluraslisme sudah secara otomatis terjadi, bahkan di dalam Islam sendiri. Karena itu, kita harus menerima adanya perbedaan pandangan semacam itu. Penerimaan perbedaan pandangan itu tentunya didasarkan pada sebuah etika publik yang berlaku di Indonesia, dan itu tetap berujung pada agama.

Faktanya, sikap tidak toleran justru seringkali muncul dari kelompok mayoritas keagamaan terhadap kelompok minoritas, seperti komunitas Eden, Ahmadiyah, dan pengrusakan terhadap rumah ibadah kelompok minoritas.

Persis pada titik itulah toleransi harus diajarkan. Tetapi bahwa orang mau memperjuangkan sesuatu untuk masuk menjadi keputusan negara, sepanjang itu dilakukan secara demokratis, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Soal toleransi ini memang menjadi problem paling besar di negara kita. Makanya, seperti tadi telah saya katakan, cara untuk tetap melestarikannya adalah dengan tidak membuat panas perasaan orang lain. Mas Dawam saya kritik waktu acara peluncuran bukunya, karena dia berkata “asal saya tidak disebut Muhammadiyah”. Kalau sikap orang-orang atau kelompok yang konon menjunjung toleransi dan pluralisme saja seperti itu, lantas kapan toleransi benar-benar dapat diwujudkan, sementara kelompok yang ingin mendiseminasikan toleransi sendiri tidak toleran. Dalam al-Quran disebutkan panggilan mereka dengan panggilan hikmah, *bi al-hikmah wa al-maw'izhah al-hasanah*. Nilai-nilai toleransi seperti itu sudah ada di dalam Islam, masa mau dibuang juga.

Substansi dari gagasan keagamaan yang baru, seperti Islam Liberal atau apapun namanya, itu seharusnya jangan terjebak pada kecenderungan kelas di mana kita berada. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah jangan menghabiskan energi kita hanya untuk melayani pertentangan-pertentangan pemikiran, sementara tidak memperhatikan dan mencurahkan energi kita untuk pemberantasan kemiskinan, penegakan keadilan ekonomi dan lain sebagainya, yang lebih esensial.

Bagaimana sikap intoleran yang ditunjukkan oleh sebagian umat Muslim?

Coba Anda lihat di India atau Amerika; coba baca *Catatan Pinggir* Goenawan Mohamad hari ini (Edisi 21-27 Mei 2007) tentang seorang pendeta Kristen yang fundamentalis. Ternyata intoleransi dan fundamentalisme bukan hanya terjadi pada orang Islam saja. Jadi, janganlah selalu mendera orang Islam Indonesia seperti itu.

Akhir-akhir ini banyak aksi dan tuntutan memberlakukan syariat Islam, bahkan di beberapa daerah sudah sampai tingkat peraturan daerah, meskipun tidak disebut sebagai perda syariah. Menurut Anda apakah kecenderungan seperti ini sebagai pertanda makin menguatnya tuntutan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam?

Kalau Anda lihat sejarah, sebenarnya yang berjuang untuk kemerdekaan itu siapa? Yang paling banyak tentunya orang Islam. Mereka melakukan semua itu atas nama agama. Masalahnya, mereka yang berjuang atas nama agama itu adalah orang-orang yang *uneducated*, karena memang didiskriminasi oleh Belanda. Pada waktu itu, semua yang memiliki kedekatan dengan Islam disingkirkan. Bacalah buku *Heather Sutherland* yang menceritakan bagaimana orang-orang yang dekat dengan kiai tidak bakal bisa menjadi bupati. Orang-orang seperti inilah yang berjuang untuk negeri ini dengan mengatasnamakan agama. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menulis dan sebagainya. Oleh karena itu, pada periode berikutnya, orang-orang yang mendapat pendidikan Belanda yang merumuskan negara. Coba saat itu diberi opsi untuk melakukan referendum, mungkin hasilnya bisa lain. Karena para *founding fathers* kita kebanyakan memperoleh pendidikan dari Belanda, maka dapat dipahami jika kemudian yang menuntut tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yang merupakan orang Islam, dibujuk oleh Hatta untuk tidak usah memasuk-kannya ke dalam dasar negara. Fakta ini juga seharusnya diungkap, supaya kita bisa jernih melihatnya. Demikian kira-kira konteks sejarahnya.

Dari awal saya sudah mengatakan bahwa toleransi yang harus terus dibangun. Saya sama sekali tidak setuju dengan orang yang melakukan pengrusakan dan penghancuran terhadap fasilitas agama lain atau fasilitas umum. Yang paling dramatis seperti penyerangan rumah-rumah orang

Ahmadiyah. Bagi saya, polisi memang harus menangkap mereka, karena itu tindakan yang sama sekali bukan persoalan agama. Itu sama sekali bukan tindakan *islami*. Justru negara wajib melindungi warga negaranya apapun latar belakang agamanya.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa seruan tentang toleransi, dan macam-macam pandangan yang moderat dan liberal, bagaimanapun harus disampaikan tidak dengan cara meledek, menyindir atau cara semacamnya. Makanya, saya tidak setuju dengan si Oneng (Rieke Dyah Pitaloka) yang sangat meledek orang-orang yang mendukung RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Mereka yang diledek itu juga tahu, karena di rumahnya juga terdapat alat untuk mengakses

informasi seperti tv dan lain sebagainya. Yang dilakukan kebanyakan orang-orang yang sekular terhadap kalangan Islam yang tidak disetujuinya bukan dengan cara mendamaikan, bukan *al-maw'izhah al-hasanah*. Cara yang lebih baik untuk mengkampanye-

Hemat saya, substansi dari liberalisasi pemikiran harus diarahkan atau mencerminkan apa yang pada esensinya dibutuhkan oleh masyarakat lintas kelas.

kan toleransi tetap harus santun. Kalau tidak, sama saja dengan membuang bensin dalam api yang sudah terbakar. Saya mengatakan kepada kawan-kawan yang menolak RUU APP, kalau kalian turun dengan cara-cara seperti itu, maka yang muncul nanti adalah reaksi balik, yaitu kemarahan dari pihak yang merasa ditentang. Jadi, hendaknya kalian turun ramai-ramai menentang pornografi dan RUU APP dengan santun, pasti akan lain ceritanya. Menurut saya, yang menjadi problem di sini sebenarnya adalah diplomasi.

Bagaimana pandangan Anda tentang liberalisme? Dan apakah liberalisme yang masuk ke dunia Islam di Indonesia bersifat produktif atau malah sebaliknya?

Kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya gerakan kaum Padri, atau gerakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang berdiri pada 1939, misalnya, adalah pemberontakan terhadap dominasi adat. Pemimpin-pemimpinnya yang menjadi aktor utama dalam gerakan perlawanan terhadap penjajah pada saat itu adalah kaum liberal. Dengan pengertian bahwa liberal pada

waktu itu lebih sebagai usaha untuk melepaskan diri dari kungkungan adat dan tradisi. Makanya Snouck Hurgronje cenderung mengatakan bahwa mereka adalah kaum perusak, karena selalu berusaha mentransformasikan masyarakat.

Pada konteksnya, gerakan pembaharuan yang mereka lakukan sudah sangat produktif. Masalahnya kemudian, gerakan pembaharuan itu mengalami institusionalisasi, seperti Muhammadiyah, dan dalam beberapa hal juga Nahdlatul Ulama (NU). Institusionalisasi inilah yang kemudian memunculkan elite-elite tersendiri, yang mengambil otoritas sebagai penafsir realitas berdasarkan pandangan-pandangan keagamaan yang ada. Di situ kebekuan muncul.

Proses pemapanan pandangan yang dikangskangi oleh elite-elite tadi inilah yang menyebabkan gagasan-gagasan keagamaan yang sebelumnya transformatif lantas menjadi fosil. Cak Nur, dalam konteks ini, adalah pemberontak paling awal dengan gagasan sekularisasinya. Itulah kenapa kemudian Cak Nur yang tampil? Karena dia yang paling menguasai persoalan. Dialah, pada saat itu, yang menguasai baik persoalan keagamaan maupun perkembangan di luar agama. Dia bisa menggabungkan keduanya secara bertanggung jawab. Kalau Anda tidak paham agama dan tiba-tiba mau menjadi liberal, bagaimana akan mempertanggungjawabkan persoalan itu secara etis. Makanya wajar atau menjadi alamiah jika pemikir liberal, saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah ini, jumlahnya sedikit.

Hal itu tak lain karena untuk mencetak orang seperti Cak Nur membutuhkan persiapan dan waktu yang cukup lama. Kecuali mereka yang terdidik seperti Ahmad Wahib, yang mengatakan bahwa setiap orang sebenarnya berhak untuk mempunyai mazhab sendiri, dalam konteks bahwa individu harus mencari, menginterpretasi, dan menginternalisasi sendiri gagasan atau ajaran-ajaran keagamaan yang mereka anut. Persoalannya apakah orang punya waktu? Lihatlah para petani. Kita punya waktu karena kita tahu bahwa besok kita masih bisa makan. Tetapi para petani, tukang becak, pembantu rumah tangga, buruh, dan sebagainya, kapan mereka punya waktu untuk, misalnya, sekadar membaca buku. Oleh karena itu, secara struktural mereka memang mau tidak mau hanya bisa taklid dalam berbagai urusan, khususnya keagamaan. Lebih dari itu, walaupun semua orang ingin menjadi pembaharu, maka sebenarnya sudah tidak

ada lagi yang dinamakan pembaharu, karena semua orang sudah berada pada kondisi yang sama.

Di dalam sejarah Jawa, kenapa pada waktu dulu hanya kaum priyayi yang bisa menulis adalah karena mereka tidak bertani, hanya duduk di kursi goyang, melihat burung peliharaan, dan semuanya serba dilayani. Mereka punya banyak waktu. Maka wajar kalau kemudian merekalah yang bisa melahirkan ajaran-ajaran, karya sastra, dan lain-lain. Namun, karena secara sosiologis, mereka belum bisa melepaskan diri dari status kelasnya di masyarakat, sehingga karya yang dilahirkan pun akhirnya tetap bias dengan kelasnya.

Jadi pada hemat saya, substansi dari liberalisasi pemikiran harus diarahkan atau mencerminkan apa yang pada esensinya dibutuhkan oleh masyarakat lintas kelas. Pertanyaannya, apakah gagasan Islam liberal atau liberalisasi Islam tidak bias pada kelas para penyokongnya? Saya pernah berkata kepada Ulil Abshar-Abdalla ketika dia mengeluh “*masak* ada anak ITS (Institut Teknologi Surabaya) yang bertanya kepada saya, ketika ingin membuat skripsi, tentang spa yang *islami* – seolah-olah Islam mengatur segala persoalan”. Saya katakan kepada Ulil, “itulah realitas keberagamaan di Indonesia”. Ulil tidak dilihat sebagai tokoh sekular, justru dilihat sebagai salah satu kutub kiai yang baru muncul, seperti mereka memahami munculnya Aa Gym, Zaenuddin MZ, dan sebagainya.

Oleh karena hal-hal seperti itulah, bagi saya, sekali lagi saya katakan, sikap kritis kita dan kesejatian kita sebagai rakyat yang harus tetap dijaga.

Di negara-negara maju, seperti Amerika dan terutama Australia, karena saya sekolah di sana, saya lihat bahwa praktik sekularisasi itu dijalankan oleh negara dengan tidak mendukung seluruh hal yang berhubungan dengan agama, baik itu pelajaran agama, organisasi Gereja, ataupun perkumpulan-perkumpulan lain yang berkaitan dengan aktivitas agama. Kebijakan-kebijakan negara juga bukan merupakan kebijakan yang menguntungkan salah satu agama. Makanya, kalau Anda lihat perdebatan seperti di Prancis tentang larangan penggunaan simbol-simbol agama, baik jilbab, salib atau kopyah orang Yahudi adalah salah satu bukti dari praktik sekularisasi.

Kritik saya kepada Islam Liberal adalah saya utarakan dengan pertanyaan yang sangat struktural, untuk apakah menyesuaikan agama dengan modernitas? Pertanyaan ini saya lontarkan dengan beberapa refleksi, *pertama*, dia (agama) akan kehilangan otentisitasnya. *Kedua*, bukankah modernitas itu merupakan barang baru, sedangkan Islam muncul jauh lebih awal. Selanjutnya, *ketiga*, sebagaimana dikatakan gagasan Marxis, bahwa seluruh gagasan kita tidak lain adalah refleksi dari superstruktur. Karena superstruktur kita kapitalis, sadar atau tidak sadar, maka gagasan keagamaan, sistem hukum, dan sistem pendidikan kita juga bersifat kapitalis. Semuanya dibuat untuk menyerap tenaga kerja. Gerakan keagamaan harus mempunyai kesadaran struktural seperti itu. Kalau tidak, maka bisa jadi setiap hari akan bermunculan gerakan yang berbeda-beda dan kita senantiasa harus selalu menyesuaikannya.

Permasalahan yang dapat muncul, ketika ide modernisasi diterapkan dalam agama, akan sangat banyak. Di antaranya adalah persoalan *religious intimacy*. Secara naluriah, begitupun dalam konteks beragama, ketika berada dalam situasi tersendiri kita akan merasa asing, tidak tahu lagi tempat untuk pulang. Lantas ke mana lagi tempat itu dapat kita temukan kalau otentisitas agama kita sendiri telah hilang? Cobalah Anda sekolah ke luar negeri. Di sana Anda tidak bisa mendengar lagi suara azan, orang mengaji dan lain sebagainya. Mau kembali ke manakah kita pada saat seperti itu? Jawabannya adalah agama.

Jadi, buat saya, otentisitas keagamaan tetap harus dipertahankan. Sebab, agama adalah tempat kembali bagi orang-orang yang pernah berdiam di “rumah”. Dalam pengalaman keagamaan saya, momen ritual seperti pembacaan *shalawat* dan sebagainya itulah di mana saya merasa kembali ke “rumah” saya, meski saya juga tahu bahwa itu hanyalah simbol-simbol. Saya tidak akan menyanyi *Jingle Bell* dan lain sebagainya, yang memang dari dulu tidak terdapat di “rumah” saya.

Substansi dari gagasan keagamaan yang baru, seperti Islam Liberal atau apapun namanya, itu seharusnya jangan terjebak pada kecenderungan kelas di mana kita berada. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah jangan menghabiskan energi kita hanya untuk melayani pertentangan-pertentangan pemikiran, sementara tidak memperhatikan dan mencurahkan energi kita untuk pemberantasan kemiskinan, penegakan keadilan ekonomi dan lain

sebagainya, yang lebih esensial. Selama ini, yang terjadi di kita adalah saling ejek antarkelompok yang berseberangan. Islam liberal terus dikritik dan dihujat, sementara kemiskinan tetap didiamkan.

Dulu, ketika saya di LP3ES, kita bersatu dalam satu paradigma pembangunan yang menekankan keadilan dan pemerataan, di situ tidak ada persoalan agama. Dengan ini jugalah, kemudian kita menentang negara yang otoriter. Kenapa sekarang hal seperti itu seolah-olah tidak terlihat lagi? Salah satu faktornya, bagi saya, kalau kita lihat lagi pada sejarah, adalah penghancuran ICMI. Karena dalam sejarahnya, ICMI didirikan, saya ingat sekali karena saya juga ikut hadir pada waktu itu, di rumah pak Habibie, justru bertujuan untuk mengantisipasi munculnya Islam radikal, di samping (tujuan lainnya) agar Islam memiliki representasi yang kuat di dalam negara. Sayangnya, oleh kaum sekular, ICMI malah dihancurkan pasca-presiden Soeharto. Maka sangat wajar kalau kemudian kotak pandora itu pun terbuka dan *unpredictable*.

Wawancara dilakukan di Jakarta